RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta sebagai program berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, selalu mendapatkan prioritas dalam pembangunan di Kota Yogyakarta. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan kota yang dilakukan oleh semua potensi yang terdiri dari masyarakat, swasta, dan pemerintah secara sinergis dan berhasil guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di samping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengikuti mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan lima tahunan berdasar dokumen perencanaan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045. Penyusunan Rencana Strategis merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Strategis ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta pada lima tahun mendatang yaitu tahun 2025-2029.

Yogyakarta, 15 September 2025
Kepala,

drg. Emma Rahmi Aryani, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP [redacted]

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 6
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.3.1. Maksud 8
1.3.2. Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN 11
2.1. Tugas , Fungsi Dan Struktur Organisasi 11
2.1.1. Dinas Kesehatan 11
2.1.2. RSUD Kota Yogyakarta 20
2.1.3. Rumah Sakit Pratama 22
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 23
2.2.1. Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Kesehatan 23
2.2.2. Sumber Daya Manusia RSUD Kota Yogyakarta 26
2.2.3. Sarana dan Prasarana RSUD Kota Yogyakarta 30
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 31
2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 74
2.4 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 75
2.4.1.1. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinkes 81
2.4.1.2. Analisis Keselarasan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Kementerian Kesehatan 82
2.4.1.3 Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis 84
2.4.2 Permasalahan dan Isu Strategis RSUD Kota Yogyakarta 85
2.4.3 Permasalahan dan Isu Strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 88
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 91
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 91
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas 96
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 101
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 101
4.2 Program Prioritas Kesehatan 196
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan 198
4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan 200
BAB V PENUTUP 203

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Distribusi Pegawai menurut pangkat Dinas Kesehatan dan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025 23
Tabel 2. 2 Distribusi Pegawai menurut tingkat pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025 24
Tabel 2. 3 Distribusi Pegawai Menurut Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025 24
Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Puskesmas Tahun 2025 29
Tabel 2. 5 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 31
Tabel 2. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024 31
Tabel 2. 7 Pencapaian Target Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024 36
Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Sasaran dan Program RSUD Kota Yogyakarta 49
Tabel 2. 9 Capaian Indikator SPM Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024 52
Tabel 2. 10 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 54
Tabel 2. 11 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024 61
Tabel 2. 12 Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2020 - 2024 65
Tabel 2. 13 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pratama Tahun 2020 - 2024 66
Tabel 2. 14 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Bidang Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan 72
Tabel 2. 15 Teknis Penyimpulan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 76
Tabel 2. 16 Keselarasan Indikator RIBK dengan Indikator Renstra Dinas Kesehatan 2025-2020 82
Tabel 2. 17 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis RSUD Kota Yogyakarta 86
Tabel 2. 18 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 89
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Pd 94
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 96
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 98
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) 2025-2029 102
Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah (RSUD Kota Yogyakarta) 2025-2029 137
Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah (Rumah Sakit Pratama) 2025-2029 145
Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan 149
Tabel 4. 5 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Rsud Kota Yogyakarta 177
Tabel 4. 6 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 191
Tabel 4. 7 Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Kesehatan, RSUD dan RS Pratama dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 196
Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 199

Tabel 4. 9 Indikator Kinerja Kunci (Ikk) Urusan Bidang Kesehatan 201

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 20
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta..... 21
Gambar 2. 3 Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 22
Gambar 2. 4 Grafik Jumlah Kematian Ibu Tahun 2020 s/d 2024 32
Gambar 2. 5 Grafik Angka Kematian Bayi Tahun 2020 - 2024..... 33
Gambar 2. 6 Grafik Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang Tahun 2020 - 2024..... 34
Gambar 2. 7 Grafik Prevalensi Stunting Tahun 2020 s/d 2024..... 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28h dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat . Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah.

Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan, menurut **UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** dan **UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas kesehatan Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah bertanggung jawab terhadap:

a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
b. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
c. Ketersediaan sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
d. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
e. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan
f. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau
g. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Pembangunan kesehatan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi

non-pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, industri, pangan, dan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan dan merata, diperlukan perencanaan strategis yang adaptif terhadap dinamika perubahan kebijakan, tantangan global, serta kebutuhan masyarakat. Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan kesehatan di daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor strategis, antara lain:

1. **Arah Kebijakan Nasional dan Daerah**
   Renstra ini diselaraskan dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinkronisasi ini diperlukan agar program dan kegiatan Dinas Kesehatan turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. **Implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**
   Undang-undang ini membawa perubahan paradigma dalam sistem kesehatan nasional, menekankan pada integrasi layanan, penguatan sistem kesehatan, serta pendekatan promotif dan preventif. Renstra Dinas Kesehatan perlu mengakomodasi amanat UU tersebut dalam perencanaan strategis.
3. **Evaluasi Capaian Renstra Sebelumnya**
   Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan kesehatan ke depan. Capaian, hambatan, dan pelajaran dari pelaksanaan program sebelumnya dianalisis untuk memperkuat strategi baru.
4. **Tantangan dan Isu Strategis Kesehatan**
   Permasalahan seperti stunting, penyakit menular dan tidak menular, pelayanan kesehatan dasar, ketimpangan akses layanan, serta dampak perubahan iklim terhadap kesehatan menjadi isu utama yang harus dijawab dalam dokumen Renstra.
5. **Penguatan Sistem Kesehatan Daerah**
   Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas SDM kesehatan, sistem informasi kesehatan, ketersediaan dan pemerataan sarana-prasarana, serta pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan menjadi bagian dari kerangka penguatan sistem kesehatan daerah.

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan arah, tujuan jangka panjang, dan strategi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Dalam bidang kesehatan, perencanaan ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program yang terukur dan berkesinambungan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki peran untuk mendukung pelayanan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang kesehatan masyarakat yang

menyediakan sarana kesehatan untuk pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan penunjang pemeriksaan, serta pelayanan penunjang lainnya. Tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada Dinas Kesehatan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian serta kearsipan.

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, disebutkan bahwa RPJP Nasional Tahun 2025-2045 mempertimbangkan berbagai aspek dalam pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). RPJP Nasional 2025-2045 sebagai perencanaan Pembangunan Nasional yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi, serta dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan 3 (tiga) kriteria yang berwawasan lingkungan hidup, yaitu: (1) tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam; (2) tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; dan (3) kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resources. Agenda dari SDGs tersebut di atas adalah untuk mencapai 17 (tujuh belas) tujuan dan sasaran Tahun 2O3O yaitu untuk mewujudkan masyarakat global dan nasional salah satunya adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan Rencana Kinerja/ Renja PD; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Bappeda dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Periode tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas *(Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan juga memuat dokumen perencanaan RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta.

Arah Pembangunan Kesehatan yang tertuang dalam Visi Misi Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Tahun 2025-2029 tercantum dalam :

1. 8 Misi Asta Cita ke -4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dengan cara Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional
2. 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Win ke-2 yaitu: Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan angka TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap.

3. 17 Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 ke-7 yaitu Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.

Pembangunan Kesehatan di Kota Yogyakarta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dengan ditandai oleh penduduknya yang berperilaku hidup bersih dan sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh pemerintah kota, masyarakat, maupun swasta.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta, termasuk rumah sakit, puskesmas, serta program kesehatan masyarakat. Selain itu, juga bertugas untuk mengelola program imunisasi, gizi, pengendalian penyakit, dan promosi kesehatan di tingkat kota. Peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sangat vital dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan fokus pada program-program preventif dan promotif serta peningkatan pelayanan kesehatan yang berbasis pada kebutuhan lokal.

Melalui program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2025-2029 diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan tiap tahun. Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra tersebut juga bersinergi dengan RPJMN dan Renstra Dinas Kesehatan DIY. Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta kemudian dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga merefleksikan rencana program yang ada di dalam renstra Dinas Kesehatan Provinsi DIY agar tetap sinergis dalam penyusunan perencanaan kegiatan tiap tahunnya.

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti yang dijelaskan diatas, maka perlu penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra). Penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 tertuang dalam dokumen Review Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Indonesia Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Praktek Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
13. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
14. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah sakit;
21. Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan;
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
30. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
31. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;

34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
35. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada Dinas Kesehatan;
36. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
37. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
38. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;
39. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
40. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek kesehatan dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, termasuk di dalamnya RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan maksud menyediakan acuan kerja penyelenggaraan program dan kegiatan, serta bertujuan untuk:

1. Menetapkan Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029.
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029.
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dalam jangka waktu 5 tahun.
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama dalam penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.
7. Mengidentifikasi isu-isu strategis dan menetapkan strategi untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada.
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan melalui indikator-indikator yang jelas dan terukur serta menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
9. Menjadi alat evaluasi kinerja untuk melihat capaian dan perbaikan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;

3.2. Sasaran Renstra Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;

3.3 Strategi Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan

3.4 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Uraian program;

4.2 Uraian kegiatan;

4.3 Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

4.4 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Lampiran : Pohon Kinerja, Cascading Renstra, Data Kinerja (Metadata Renstra

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

2.1. Tugas , Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta serta mendasar pada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dimana disebutkan Visi Kota Yogyakarta yaitu "**Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".** Adapun 5 misi Kota Yogyakarta yaitu**:**

1. Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan;
2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal
4. Mewujudkan tata pemerintahan daerah dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
5. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri atas:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
      1. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
      2. Seksi Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
   d. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
      1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat.

e. Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan, terdiri atas:
   1. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi;
   2. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
f. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
   1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Komplementer;
   2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok jabatan fungsional.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah menetapkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Sekretaris.

a. Tugas
   1. Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
b. Fungsi
   1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
   2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
   3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Sekretariat;
   4. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kerja pada bidang, dan seksi;
   5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
   6. pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
   7. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
   8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
   9. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
   10. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
   11. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;

12. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
13. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
14. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
15. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
16. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
17. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

B. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya kesehatan.

b. Fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan sumber daya kesehatan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
5. penelitian dan pengembangan sertifikasi dan lisensi di bidang kesehatan;
6. bimbingan administrasi, bimbingan teknis, visitasi/ asesmen sertifikasi dan lisensi di bidang kesehatan;
7. pelayanan perizinan tenaga kesehatan dan fasilitasi pelayanan kesehatan;
8. pelayanan non perizinan sarana kesehatan, sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga, dan tanda daftar bagi penyehat tradisional;
9. pembinaan dan pengawasan sertifikasi dan lisensi di bidang kesehatan;
10. monitoring dan evaluasi pengelolaan sertifikasi dan lisensi di bidang kesehatan;
11. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kefarmasian, alat kesehatan, dan makanan minuman;
12. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
13. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;

14. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
15. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
16. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

C. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kesehatan masyarakat.

b. Fungsi

1. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan kesehatan masyarakat;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
5. penelitian dan pengembangan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
6. pembinaan, bimbingan teknis, dan pengawasan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
7. fasilitasi dan koordinasi kesekretariatan penyelenggaraan Kota Sehat;
8. monitoring dan evaluasi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
9. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan masyarakat;
10. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
11. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
12. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
13. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
14. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Kesehatan Masyarakat; dan

15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

D. Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan

Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan, pengendalian penyakit, dan pengelolaan data dan sistem informasi.

b. Fungsi

1. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pencegahan, pengendalian penyakit, dan pengelolaan data dan sistem informasi;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pencegahan, pengendalian penyakit menular, dan imunisasi;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa;
6. penelitian dan pengembangan surveilans kesehatan, epidemiologi, serta pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan;
7. pengelolaan surveilans kesehatan dan penyelidikan epidemiologi;
8. pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan;
9. penyusunan rekomendasi tindak lanjut kebijakan kesehatan berdasarkan analisis surveilans kesehatan;
10. kewaspadaan dini dan respon Kejadian Luar Biasa/ wabah;
11. komunikasi risiko penyakit, masalah kesehatan, dan/ atau Kejadian Luar Biasa/ wabah;
12. bimbingan teknis dan supervisi kegiatan surveilans kesehatan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
13. monitoring dan evaluasi surveilans kesehatan serta pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan;
14. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan;
15. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan;

16. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan;
17. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan;
18. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan; dan
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

E. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

c. Fungsi

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional komplementer;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penjaminan dan peningkatan mutu kesehatan;
7. pengelolaan jaminan kesehatan;
8. penilaian dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
9. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di bidang kesehatan;
10. pembinaan, pendampingan, dan pengendalian penjaminan dan peningkatan mutu kesehatan;
11. bimbingan teknis dan supervisi pelayanan jaminan kesehatan;
12. monitoring dan evaluasi pelayanan jaminan kesehatan dan peningkatan mutu kesehatan;
13. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
14. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
15. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pelayanan Kesehatan;

16. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
17. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

F. Unit Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Masyarakat

Berdasar pada Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan, disebutkan bahwa Unit Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terdiri dari:

1). **UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services**

a. Fungsi :

UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang kegawatdaruratan medis prafasilitas kesehatan.

b. Tugas :

1. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT;
3. pelaksanaan penanganan kegawatdaruratan medis di lokasi kejadian di Daerah;
4. pelaksanaan stabilisasi pasien sebelum dan pada saat dilakukan evakuasi medik;
5. pelaksanaan evakuasi medik pasien gawat darurat dari lokasi kejadian ke fasilitas pelayanan kesehatan;
6. penggantian biaya penanganan kegawatdaruratan medis prafasilitas kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan jejaring sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas;
7. pelaksanaan koordinasi penanganan kegawatdaruratan medis antar institusi yang terkait;
8. pelaksanaan edukasi dan informasi pertolongan pertama pada kegawatdaruratan;
9. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
10. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
11. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
12. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
13. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;

14. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

2). **UPT Laboratorium Kesehatan**

a. Fungsi :

UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan

b. Tugas :

1. Menyusun perencanaan kegiatan UPT;
2. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT;
3. Mengelola dan pelayanan laboratorium kesehatan;
4. Pengujian parameter kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara, kualitas makanan, dan surveilans;
5. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen laboratorium kesehatan sesuai dokumen mutu laboratorium;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT; g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
7. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
8. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
9. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

3). **UPT Puskesmas**

a. Fungsi

Pelayanan kesehatan strata pertama, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

b. Tugas

1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat
2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan puskesmas;
3. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
4. Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat;
5. Melaksanakan upaya kesehatan perorangan;

6. Melaksanakan pelayanan upaya kesehatan/ kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya serta pembinaan pengobatan tradisional.
7. Melaksanakan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada puskesmas pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
8. Melaksanakan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;
9. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan;
10. Melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga upt;
11. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja upt;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang terdiri dari:

(1) Puskesmas Danurejan I
(2) Puskesmas Danurejan II
(3) Puskesmas Gedongtengen
(4) Puskesmas Gondomanan
(5) Puskesmas Gondokusuman I
(6) Puskesmas Gondokusuman II
(7) Puskesmas Jetis
(8) Puskesmas Kotagede I
(9) Puskesmas Kotagede II
(10) Puskesmas Kraton
(11) Puskesmas Mantrijeron
(12) Puskesmas Mergangsan
(13) Puskesmas Ngampilan
(14) Puskesmas Pakualaman
(15) Puskesmas Tegalrejo
(16) Puskesmas Umbulharjo I
(17) Puskesmas Umbulharjo II
(18) Puskesmas Wirobrajan

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat diangkat jabatan fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan. Kebutuhan jabatan fungsional tersebut ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

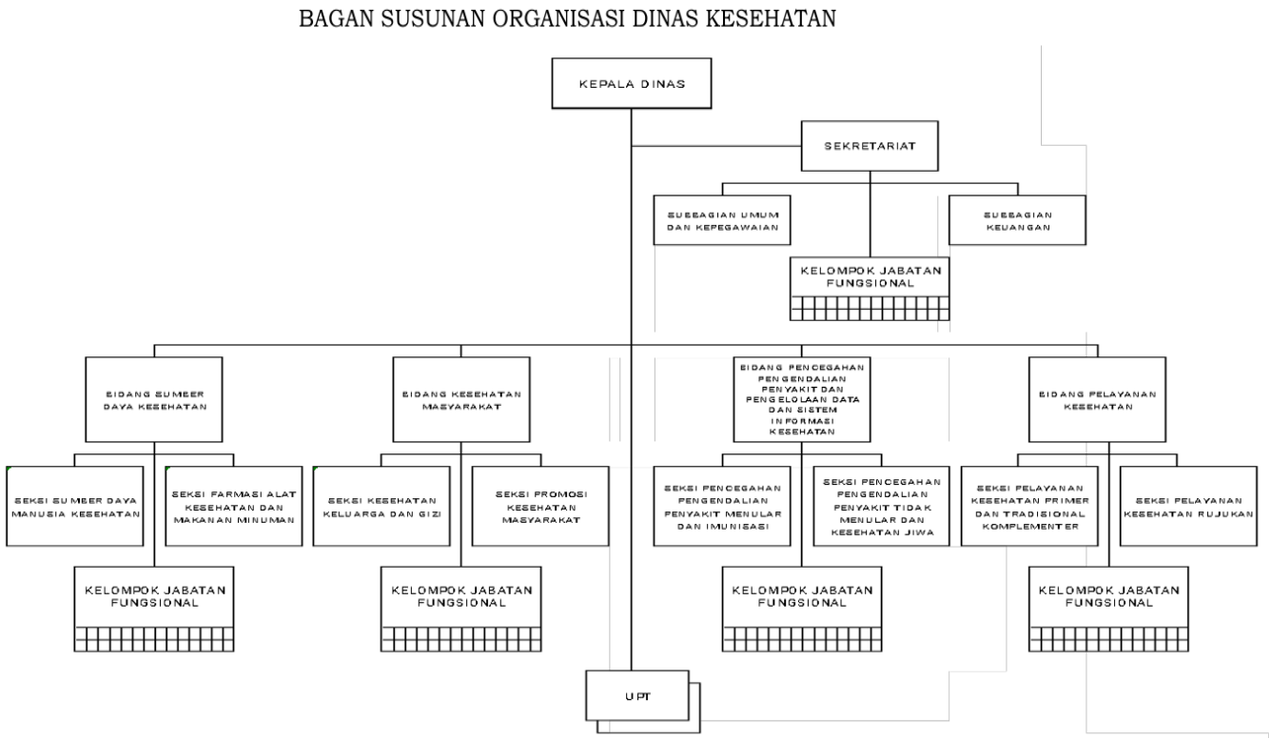

Sumber : Perwal No 37 tahun 2023

2.1.2. RSUD Kota Yogyakarta

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta disebutkan bahwa Pada Dinas Kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas, terdapat rumah sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Untuk selanjutnya tugas pokok, fungsi, kedudukan dan struktur organisasi ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan.

Selain Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta juga dirumuskan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Tugas pokok dan Fungsi sesuai Perwal Nomor 39 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a) Tugas

RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna:.

b) Fungsi

RSUD dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan;
4) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas RSUD.

c) Struktur Organisasi

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

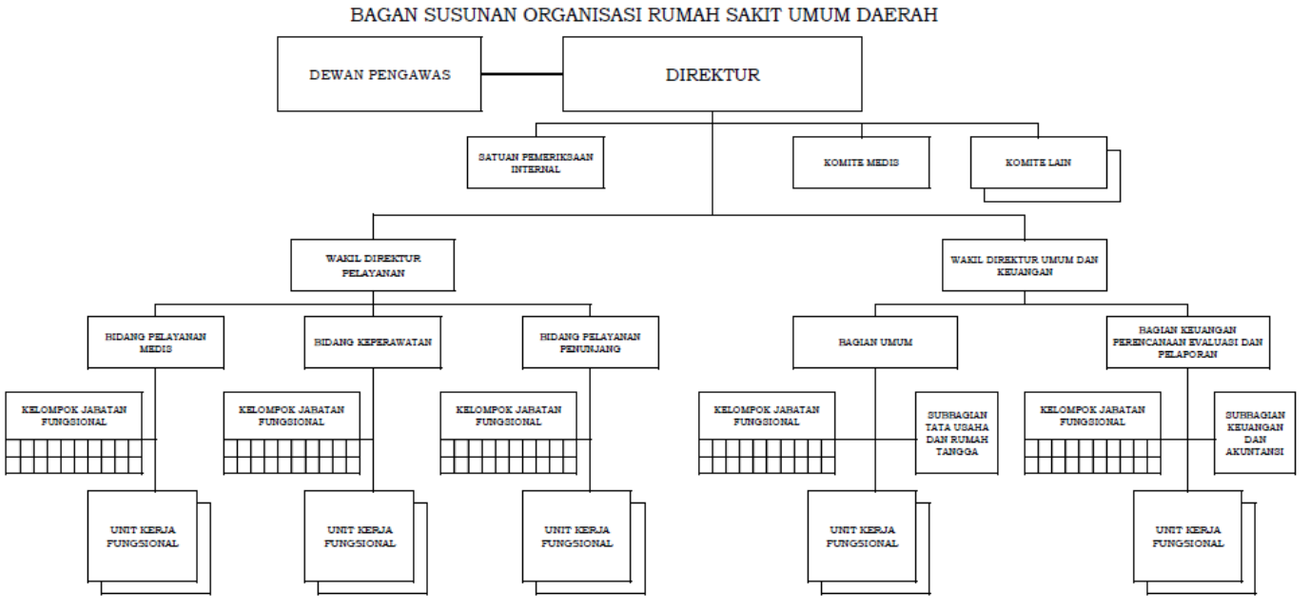

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan, susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari :

a. Direktur;
b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas:
    1. Bidang Pelayanan Medis;
    2. Bidang Keperawatan; dan
    3. Bidang Pelayanan Penunjang.
c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri atas:
    1. Bagian Umum, terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
    2. Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, terdiri atas Subbagian Keuangan dan Akuntansi.
d. Satuan Pemeriksaan Internal;
e. Komite Medis;
f. Komite Lain; dan
g. Unit Kerja Fungsional.

Secara umum berikut bagan struktur Organisasi RSUD Kota Yogyakarta

2.1.3. Rumah Sakit Pratama

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada Dinas Kesehatan, susunan organisasi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 3 Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

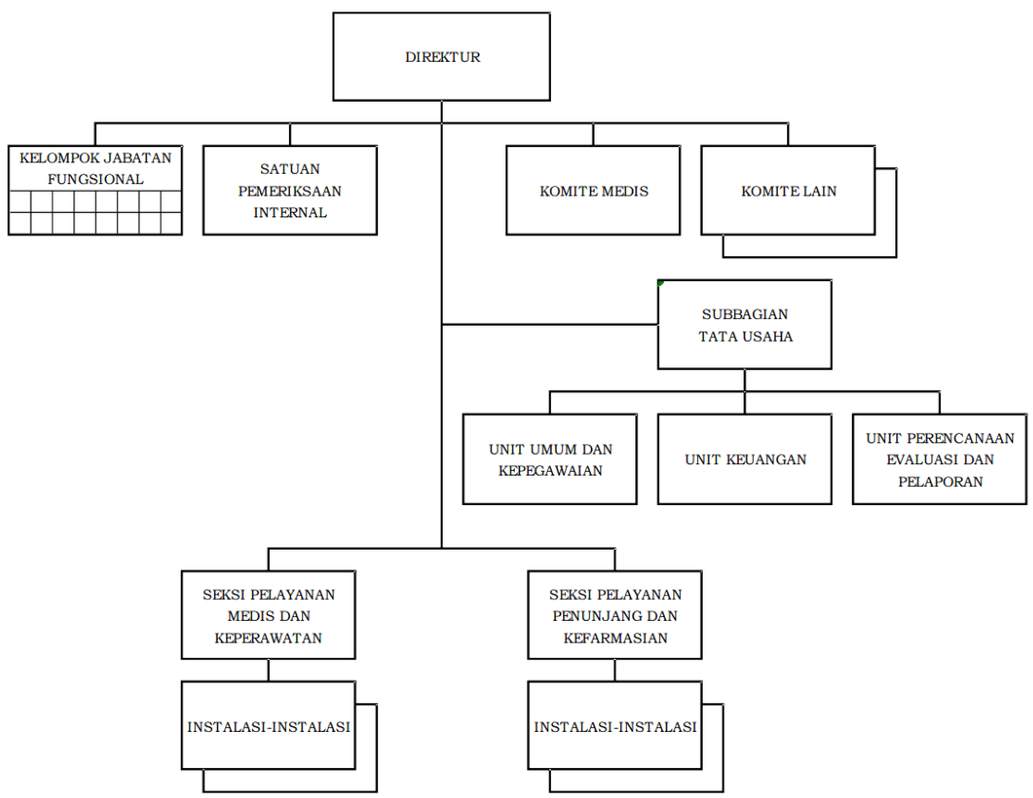

Struktur Organisasi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dipimpin oleh Direktur, yang membawahi :

- Kelompok Jabatan Fungsional
- Satuan Pemeriksaan Internal
- Komite Medis
- Komite Lain
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan
- Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi Unit Umum dan Kepegawaian, Unit Keuangan, Unit Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan membawahi Instalasi-instalasi medis
- Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian membawahi unit pelayanan penunjang

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Kesehatan

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada Tahun 2025 sebanyak 812 orang ASN tersebar di Dinas Kesehatan termasuk UPT (Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan, dan UPT PSC YES 119) dan RS Pratama Kota Yogyakarta. Distribusi pegawai menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Distribusi Pegawai menurut pangkat Dinas Kesehatan dan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025

NO	PANGKAT	GOL	DINAS	PUSK/UPT	Jumlah
1	Pembina Utama	IV/e	0	0	0
	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0
	Pembina Utama Muda	IV/c	2	34	36
	Pembina Tk I	IV/b	1	38	39
	Pembina	IV/a	17	26	43
2	Penata Tk I	III/d	10	156	166
	Penata	III/c	9	47	56
	Penata Muda Tk I	III/b	10	88	98
	Penata Muda	III/a	17	20	37
3	Pengatur Tk I	II/d	3	112	115
	Pengatur	II/c	6	138	144
	Pengatur Muda Tk I	II/b	0	0	0
	Pengatur Muda	II/a	0	1	1
4	Juru Tk I	I/d	0	0	0
	Juru	I/c	0	0	0
	Juru Muda Tk I	I/b	0	0	0
	Juru muda	I/a	0	0	0

NO	PANGKAT	GOL	DINAS	PUSK/UPT	Jumlah
5	PPPK	X	0	5	5
		IX	2	1	3
		VII	0	68	68
		V	0	1	1
	JUMLAH TOTAL		**77**	**735**	**812**

Sumber data : Dinas Kesehatan 2025 (data diolah)

Selain menurut jenis kepangkatan, pembagian pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan juga dibagi menurut tingkat pendidikan, adapun distribusi menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Distribusi Pegawai menurut tingkat pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	185
2	S1/D4	132
3	D3	461
4	D1	1
5	SMA/SLTA	32
6	SMP	1
7	SD	0
	JUMLAH	812

Sumber data : Dinas Kesehatan 2025 (data diolah)

Tabel 2. 3 Distribusi Pegawai Menurut Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi	9
5	Kepala Sub Bagian	2
6	Kepala Sub Bagian TU	20
7	Kepala UPT	2
8	Direktur	0
9	Administrator Kesehatan Ahli Muda	6
10	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	10
11	Analis Kebijakan Ahli Madya	0
12	Analis Kebijakan Ahli Muda	3
13	Apoteker Ahli Madya	6
14	Apoteker Ahli Muda	10
15	Apoteker Ahli Pertama	21
16	Arsiparis Terampil	1
17	Asisten Apoteker Mahir	2
18	Asisten Apoteker Penyelia	10
19	Asisten Apoteker Terampil	27
20	Asisten Penata Anestesi Terampil	1
21	Bidan Ahli Madya	5
22	Bidan Ahli Muda	1
23	Bidan Mahir	5

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
24	Bidan Penyelia	34
25	Bidan Terampil	55
26	Dokter	4
27	Dokter Ahli Madya	33
28	Dokter Ahli Muda	21
29	Dokter Ahli Pertama	43
30	Dokter Gigi Ahli Madya	25
31	Dokter Gigi Ahli Pertama	6
32	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	4
33	Epidemiolog Kesehatan Terampil	13
34	Fasilitator Pemerintahan	2
35	Fisikawan Medis Ahli Pertama	1
36	Nutrisionis Ahli Madya	4
37	Nutrisionis Ahli Muda	1
38	Nutrisionis Mahir	4
39	Nutrisionis Penyelia	12
40	Nutrisionis Terampil	22
41	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	1
42	Penata Anestesi Ahli Pertama	2
43	Penata Layanan Kesehatan	3
44	Penata Layanan Operasional	5
45	Penelaah Teknis Kebijakan	15
46	Pengadministrasi Perkantoran	14
47	Pengolah Data dan Informasi	32
48	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	1
49	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	12
50	Perawat Ahli Madya	7
51	Perawat Ahli Muda	6
52	Perawat Gigi Ahli Madya	7
53	Perawat Gigi Mahir	1
54	Perawat Gigi Penyelia	15
55	Perawat Gigi Terampil	3
56	Perawat Penyelia	45
57	Perawat Terampil	68
58	Perekam Medis Penyelia	10
59	Perekam Medis Terampil	32
60	Perencana Ahli Pertama	0
61	Pranata Komputer Ahli Muda	1
62	Pranata Komputer Ahli Pertama	4
63	Pranata Komputer Terampil	1
64	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	19
65	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2
66	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	34
67	Psikolog Klinis Ahli Pertama	2
68	Radiografer Terampil	6
69	Sanitarian Ahli Madya	4
70	Sanitarian Ahli Pertama	1
71	Sanitarian Penyelia	2
72	Sanitarian Mahir	3
73	Sanitarian Terampil	5
74	Teknisi Elektromedis Terampil	2

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
75	Teknisi Transfusi Darah Terampil	2
76	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	5
71	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	4
78	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	5
	Jumlah	812

Sumber data : Dinas Kesehatan s/d. Juli 2025 (data diolah)

2.2.2. Sumber Daya Manusia RSUD Kota Yogyakarta

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan sampai dengan 31 Desember 2024 yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis	PNS / CPNS	PPPK	JLOP	BLUD	Kontrak Klinis Penuh Waktu	Kontrak Klinis Paruh Waktu / Konsultan/ Supervisor	Jumlah
	TENAGA KESEHATAN							
A.	***Tenaga Medis :***	**44**	**5**	**4**	**2**	**6**	**10**	**71**
1	Dokter Umum	10	1	4	2		-	17
2	Dokter Spesialis	28	3	-		4	6	41
3	Dokter Sub Spesialis	3	1	-	-	-	4	8
4	Dokter Gigi, termasuk Drg.Sps	3	-	-	-	2	-	5
	TENAGA KESEHATAN DAN STRUKTURAL	**355**	**14**	**14**	**57**	**0**	**0**	**440**
B.	***Tenaga Keperawatan:***	**218**	**2**	**9**	**39**	**0**	**0**	**268**
1	S2 Keperawatan Anak	1	-	-	-	-	-	1
2	S2 Medikal Bedah	1	-	-	-	-	-	1
3	S2 Medikal Bedah + profesi	1	-	-	-	-	-	1
4	S2 Keperawatan Kritis	1	-	-	-	-	-	1
5	S2 Keperawatan Kronis	1	-	-	-	-	-	1
6	S1 Keperawatan + Ners	57	1	-	12	-	-	70
7	D IV Keperawatan Gadar + Ners	4	-	-	-	-	-	4
8	D IV Keperawatan Bedah + Ners	3	-	-	-	-	-	3
9	D IV Keperawatan Anak + Ners	3	-	-	-	-	-	3
10	DIV Keperawatan Gadar	1	-	-	-	-	-	1
11	DIV Keperawatan Bedah	1	-	-	-	-	-	1
12	D III Keperawatan	144	1	9	27	-	-	181
C.	***Tenaga Psikologi Klinis :***	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
1	S2 Psikologi (Psikolog Klinis)	1	-	-	-	-	-	1

No.	Jenis	PNS / CPNS	PPPK	JLOP	BLUD	Kontrak Klinis Penuh Waktu	Kontrak Klinis Paruh Waktu / Konsultan/ Supervisor	Jumlah
D.	***Tenaga Bidan :***	**26**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**29**
1	D III Bidan	20	-	-	3	-	-	23
2	DIV Bidan Klinik	6	-	-	-	-	-	6
E.	***Tenaga Kefarmasian:***	**33**	**1**	**1**	**5**	**0**	**0**	**40**
1	Apoteker + S2 Farmasi Klinis	2	-	-	-	-	-	2
2	Apoteker	10	1	1	-	-	-	12
3	D III Farmasi	21	-	-	5	-	-	26
F.	***Tenaga Kesehatan Masyarakat:***	**6**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**7**
1	DIV Keperawatan	-	-	-	-	-	-	0
2	DIV Keperawatan (alih jabatan Promkes)	1						1
3	S1 Kesehatan Masyarakat (Kesling)	1	-	-	-	-	-	1
4	D III Kesehatan Lingkungan	4	-		1	-	-	5
G.	***Tenaga Gizi/Dietisien:***	**8**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**
1	S1 Gizi	1	-	-	-	-	-	1
2	D IV Gizi	1	-	-	-	-	-	1
3	D III Gizi	6	1	-	-	-	-	7
H.	***Tenaga Keterapian Fisik:***	**8**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**9**
1	D IV Fisioterapi	3	-	-	-	-	-	3
2	D III Fisioterapi	2	-	-	-	-	-	2
3	D III Okupasi Terapi	1	-	-	-	-	-	1
4	D III Terapi Wicara	2	-	-	-	-	-	2
5	DIII Akupuntur	-	-	1	-	-	-	1
I.	***Tenaga Keteknisian Medis:***	**27**	**5**	**2**	**7**	**0**	**0**	**41**
1	S1 Kesehatan Masyarakat (SIMRS)	2	-	-	-	-	-	2
2	D III Perekam Medis	17	-	2	6	-	-	25
3	D1 Teknisi Transfusi Darah	-	5	-	-	-	-	5
4	D VI Perawat Gigi	1	-	-	-	-	-	1
5	D III Perawat Gigi	3	-	-	-	-	-	3
6	D IV Keperawatan Anestesi	3	-	-	1	-	-	4
7	D III Anasthesi	1	-	-	-	-	-	1
J.	***Tenaga Teknis Biomedika:***	**28**	**5**	**1**	**2**	**0**	**0**	**36**
1	D IV Teknik Radiologi	2	-	-	-	-	-	2

No.	Jenis	PNS / CPNS	PPPK	JLOP	BLUD	Kontrak Klinis Penuh Waktu	Kontrak Klinis Paruh Waktu / Konsultan/ Supervisor	Jumlah
2	D IV Teknologi Nuklir	1	-	-	-	-	-	1
3	D III Teknik Radiologi	3	3	1	-	-	-	7
4	SI Teknik	2	-	-	-	-	-	2
5	D III Teknik Elektromedik	2	-	-	-	-	-	2
6	D IV Analis Kesehatan Laboratorium	2	-	-	-	-	-	2
7	D III Analis Kesehatan Laboratorium	15	1	-	2	-	-	18
8	S1 Fisikawan Medik	1	1		-	-	-	2
9	D III Ortotis Prostetis	-	-	-	-	-	-	0
	TENAGA NON KESEHATAN DAN STRUKTURAL	**48**	**1**	**44**	**94**	**0**	**0**	**187**
	Struktural	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**
1	S2 Manajemen	0	-	-	-	-	-	0
2	Dokter Umum	2	-	-	-	-	-	2
3	S2 Kesehatan	1	-	-	-	-	-	1
4	S2 Ekonomi Pembangunan	1	-	-	-	-	-	1
5	S2 Akuntansi	1	-	-	-	-	-	1
6	S2 Administrasi Publik (MAP)	1	-	-	-	-	-	1
7	S2 Asuransi Kesehatan	1	-	-	-	-	-	1
8	S2 Promosi Kesehatan	1	-	-	-	-	-	1
9	S2 Manajemen Rumah Sakit	2	-	-	-	-	-	2
10	S1 Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	-	-	1
11	DIV Teknologi Nuklir	1	-	-	-	-	-	1
	Pelaksana	**36**	**1**	**44**	**94**	**0**	**0**	**175**
10	S2 Hukum Kesehatan	1	-	-	-	-	-	1
11	S1 Ekonomi Manajemen	-	-	-	2	-	-	2
12	S1 Akuntansi	1	-	-	-	-	-	1
13	S1 Pendidikan Akuntansi	-	-	-	1	-	-	1
14	S1 Ekonomi	-	-	-	1	-	-	1
15	S1 Teknik Informatika	3	-	1	2	-	-	6
16	S1 Hukum	1	-	-	2	-	-	3
17	S1 Psikologi	-	-	1	-	-	-	1
18	S1 Kesehatan Masyarakat	2	-	-	4	-	-	6
19	S1 Komunikasi	-	-	-	3	-	-	3

No.	Jenis	PNS / CPNS	PPPK	JLOP	BLUD	Kontrak Klinis Penuh Waktu	Kontrak Klinis Paruh Waktu / Konsultan/ Supervisor	Jumlah
20	S1 Keperawatan	1	-	-	-	-	-	1
21	Apoteker	-	-	1	2	-	-	3
22	D IV IPDN	2	-	-	-	-	-	2
23	D IV Teknologi Nuklir	-	-	-	-	-	-	0
24	D III Akuntansi	2	-	-	3	-	-	5
25	D III Manajemen	-	-	1	2	-	-	3
26	D III Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	0
27	D III Keperawatan	1	-	-	-	-	-	1
28	D III Boga	1	-	-	-	-	-	1
29	D III Teknik Elektro	-	-	1	-	-	-	1
30	D III Farmasi	-	-	2	4	-	-	6
31	D III Kebidanan	-	-	1	1	-	-	2
32	D III Gizi	-	-	-	3	-	-	3
33	D III Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
34	D1 Administrasi Rumah Sakit	-	-	1	-	-	-	1
35	SPK	1	-	-	-	-	-	1
36	SMF	1	-	-	-	-	-	1
37	SLTA	10	-	20	30	-	-	60
38	SMK	5	-	12	33	-	-	50
39	SLTP	3	-	1	1	-	-	5
40	SD	1	-	2	-	-	-	3
Jumlah		**447**	**20**	**62**	**153**	**6**	**10**	**698**

Sumber: Data Kepegawaian tahun 2024 data diolah

2.3.1. Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Pendukung Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki sarana pendukung pelayanan sebagai berikut:

1. UPT Puskesmas : 18 unit (8 Puskesmas Pembantu)
2. UPT Laboratorium Kesehatan : 1 unit
3. UPT PSC YES 119 : 1 unit
4. Rumah Sehat Lansia (RUSELA) : 1 unit
5. Rumah Pemulihan Gizi (RPG) : 1 unit

Prasarana yang mendukung kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah tersebut di bawah ini :

Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Puskesmas Tahun 2025

No	Puskesmas	Kelengkapan			Kumulasi
		Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
1	DANUREJAN I	69.05	35.42	47.9	57.22

No	Puskesmas	Kelengkapan			Kumulasi
		Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
2	DANUREJAN II	59.52	39.62	40.65	49.99
3	GEDONGTENGEN	61.9	32.08	38.52	49.57
4	GONDOKUSUMAN I	59.52	32.65	31.72	45.72
5	GONDOKUSUMAN II	50	30.19	56.79	50.73
6	GONDOMANAN	54.76	33.33	59.71	54.6
7	JETIS	71.43	40	24.24	49.41
8	KOTAGEDE I	64.29	33.33	32.69	48.55
9	KOTAGEDE II	64.29	27.78	30.79	47.24
10	KRATON	61.9	33.33	27.87	45.43
11	MANTRIJERON	69.05	33.33	34.57	51.69
12	MERGANGSAN	64.29	31.48	32.95	48.47
13	NGAMPILAN	59.52	33.33	57.19	55.97
14	PAKUALAMAN	54.76	20	34.52	43.19
15	TEGALREJO	69.05	38.89	53.84	59.95
16	UMBULHARJO I	50	33.33	51.11	48.78
17	UMBULHARJO II	54.76	29.63	32.52	43.35
18	WIROBRAJAN	52.38	26.92	44.44	46.66

Sumber : Aplikasi ASPAK data sd. Juli 2025

Sesuai dalam peraturan Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, standar **ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan)** untuk **Puskesmas** mendasar pada **persyaratan sarana, prasarana, dan alat kesehatan minimum** yang ditetapkan pemerintah, agar Puskesmas dapat berfungsi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Standar yang harus dipenuhi dalam pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas minimal 60% berdasarkan ASPAK dan telah tervalidasi 100% oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

2.2.3. Sarana dan Prasarana RSUD Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta selalu berupaya untuk meningkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit. Rencana pemenuhan secara bertahap sarana, prasarana dan alat kesehatan dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029.

Kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dimiliki RSUD Kota Yogyakarta tahun 2024 berdasarkan data yang telah dientri pada aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Secara umum persentase pemenuhan standar sarana, prasarana dan peralatan kesehatan penunjang medis dan non medis di RSUD Kota Yogyakarta tahun 2024 yang tercantum pada Aplikasi ASPAK Kementerian Kesehatan RI sebesar 87,45 %. Capaian standar sarana, prasarana dan peralatan kesehatan tersebut menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh Rumah Sakit yang akan mengajukan Akreditasi, karena berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-1596-2024 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah sakit yang mengajukan permohonan survei akreditasi paling sedikit harus memenuhi persyaratan pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) minimal 60% berdasarkan ASPAK dan telah tervalidasi 100% oleh Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan daerah setempat sesuai dengan kewenangannya

Selain itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur No. 251/KPTS/RSUD/III/2025 jumlah sarana tempat tidur pasien yang ada di RSUD Kota Yogyakarta sebanyak 202 TT, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

NO	RUANG	VIP	KELAS			Perinatal	ICU	ICCU	PICU	NICU	HCU	ISOLASI	JUMLAH
			I	II	III								
1	ANGGREK	1	1	2	12	0	0	0	0	0	0	0	16
2	BOUGENVILE	1	3	7	11	0	0	0	0	0	0	0	22
3	CEMPAKA	2	4	0	28	0	0	0	0	0	2	2	38
4	DAHLIA	2	2	16	12	0	0	0	0	0	0	2	34
5	EDELWEIS I	0	0	0	8	0	2	0	0	0	0	2	12
6	EDELWEIS II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
8	KENANGA	1	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	15
9	PADMA	0	0	0	0	16	0	0	0	4	0	0	20
10	WIJAYA KUSUMA	0	0	0	0	0	9	6	2	0	0	0	17
11	VINOLIA A	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
12	VINOLIA B	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	TOTAL	25	12	29	77	16	11	6	2	4	2	18	202

Sumber: Bidang Pelayanan Medis RSUD Kota Yogyakarta, 2025

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Capaian kinerja urusan kesehatan tahun 2020 - 2024 yang diukur dengan indikator sasaran kinerja utama, indikator kinerja program dan pada indikator SPM untuk urusan wajib.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020 - 2024

Tabel 2. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Kualitas	Jumlah Kematian Ibu	orang	4	1	4	4	4	4	8	0	8	2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN									
				2020		2021		2022		2023		2024	
	Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	bayi per 1000 kelahiran	7.06	11.5	6.97	10.88	6.88	10.8	10.78	7.42	10.68	9,78
		Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	persen	8.19	10.72	7.97	6.58	7.82	6.72	7.97	5.46	7	5,59
		Prevalensi Stunting	persen	12.4	11.23	12.2	12.88	12	10.8	12	11.76	12	11,27
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai		-		-		-		76.74		AA (90.375)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja utama Dinas Kesehatan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Jumlah Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Kematian ibu dipengaruhi dari berbagai faktor, baik faktor dalam sistem pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan.

Gambar 2. 4 Grafik Jumlah Kematian Ibu Tahun 2020 s/d 2024

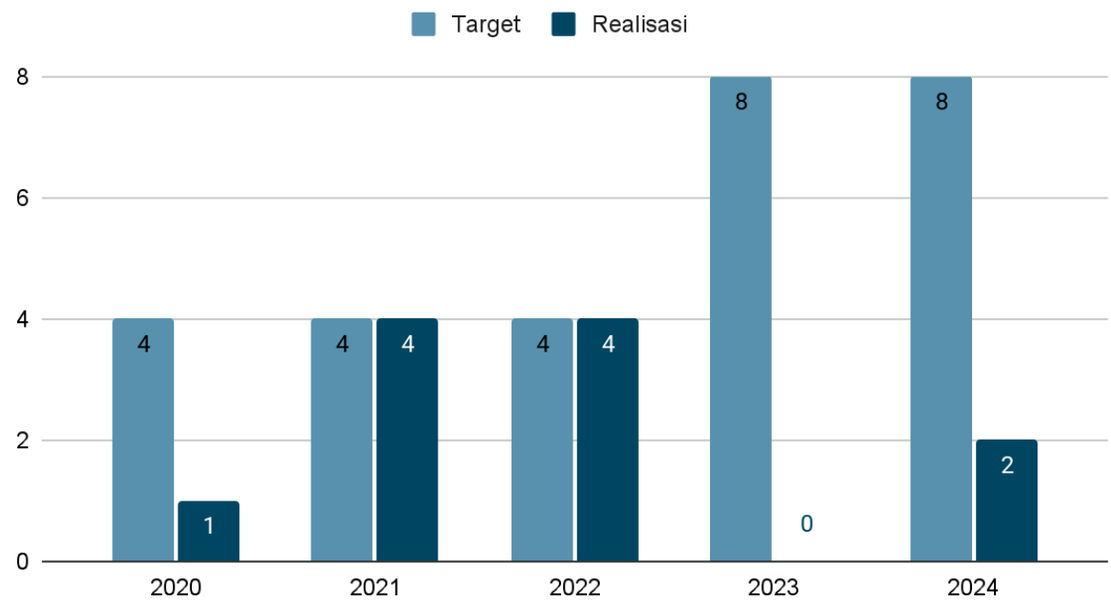

Kasus kematian ibu di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir sudah mencapai target nasional maupun target daerah, namun setiap tahunnya masih ditemukan kasus kematian ibu di Kota Yogyakarta. Kematian ibu tahun 2021 disebabkan oleh pendarahan, pre eklamsi

dan jantung. Tiga kasus Kematian ibu di Kota Yogyakarta Tahun 2022 disebabkan oleh faktor resiko dekat yaitu komplikasi kehamilan dan persalinan yang dipengaruhi oleh status kesehatan ibu dengan penyakit jantung, serta terdapat satu kasus kehamilan risiko tinggi yang disebabkan oleh komplikasi persalinan (perdarahan) yang terjadi mulai dari rumah hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selama tahun 2023 tidak terdapat kematian ibu hamil di Kota Yogyakarta, namun pada Tahun 2024 terdapat 2 kasus.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam menghadapi kasus kematian ibu adalah upaya deteksi dini dan komplikasi melalui posyandu belum berjalan optimal, serta masih perlu meningkatkan promosi edukasi kepada masyarakat luas untuk menyebarkan informasi seputar kesehatan.

2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Persentase target dan realisasi indikator sasaran angka kematian bayi dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Grafik Angka Kematian Bayi Tahun 2020 - 2024

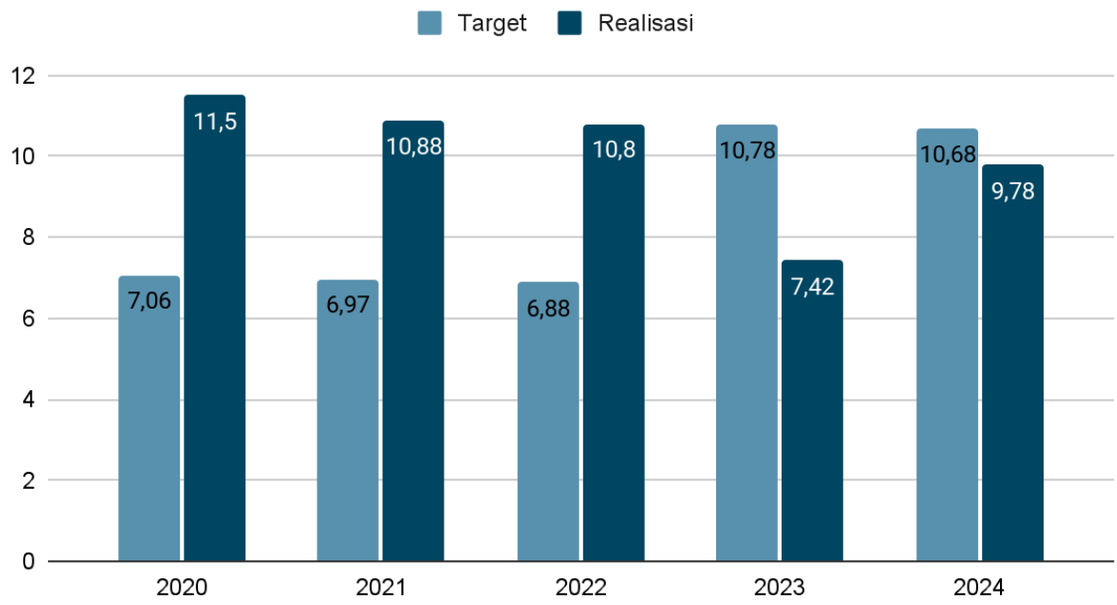

Tren angka kematian bayi di Kota Yogyakarta dari Tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan, namun di tahun 2024 ditemukan 21 kasus kematian bayi dari total 2148 bayi lahir hidup. Tahun 2024 ada kenaikan jumlah kasus kematian bayi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 3 kasus. Peningkatan kasus kematian bayi karena adanya peningkatan kasus BBLR dan kelainan kongenital. Tantangan dalam upaya pencapaian AKB antara lain adalah status gizi dan nutrisi yang baik selama siklus hidup sangat penting untuk mencegah kematian ibu maupun kematian bayi, tingginya anemia remaja putri dan anemia ibu hamil menjadi faktor yang berkontribusi terhadap

tingginya BBLR dan prematuritas serta kelainan kongenital yang menjadi penyebab terbanyak kasus kematian bayi di kota Yogyakarta Tahun 2024.

3. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang

Wasting merupakan masalah gizi yang bersifat akut yang berkaitan dengan asupan yang kurang atau penyakit infeksi. Wasting berdampak pada gangguan pertumbuhan pada anak. *Wasting* adalah kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) dengan Z-score < -2 SD (gizi buruk dan gizi kurang). Persentase target dan realisasi indikator sasaran prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang dari tahun ke tahun dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2. 6 Grafik Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang Tahun 2020 - 2024

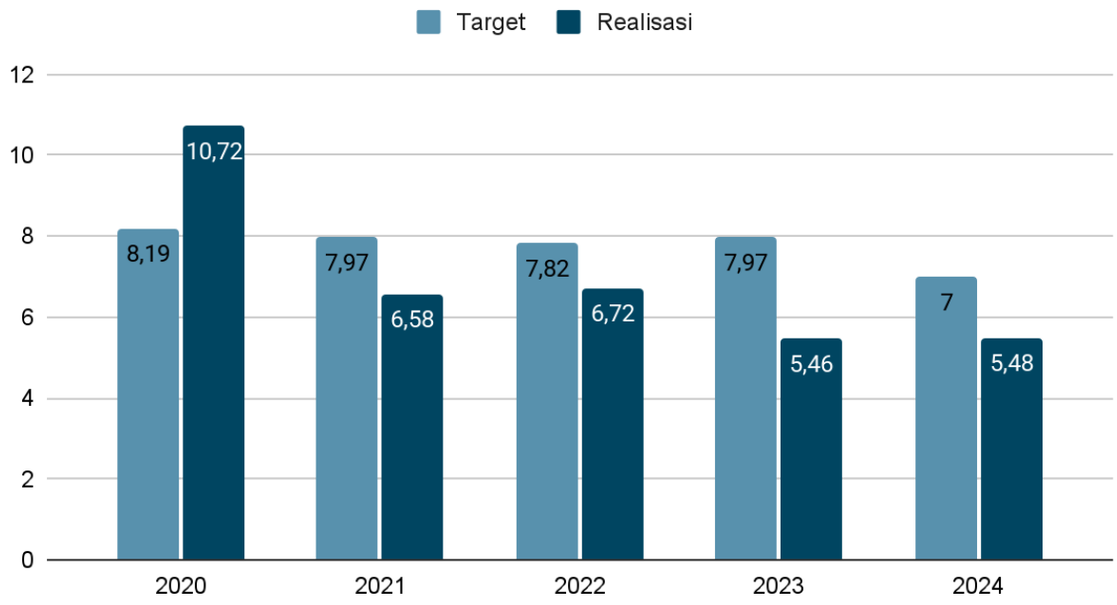

Trend prevalensi balita gizi buruk dan kurang di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun. Adapun permasalahan yang dijumpai antara lain masih ditemukan petugas Puskesmas yang tidak melakukan plotting di Grafik Pertumbuhan Anak pada buku KIA pada saat pemantauan pertumbuhan balita, dan belum semua balita yang mengalami *weight faltering* (tidak naik berat badan) dan balita *underweight* (berat badan kurang) dilakukan rujukan dari posyandu ke puskesmas.

4. Prevalensi Stunting

Stunting (kerdil) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Faktor lingkungan berperan menyebabkan stunting pada anak, antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi asupan total asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi di awal kehidupan anak. Selain faktor lingkungan, stunting juga disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal, namun sebagian besar disebabkan karena malnutrisi. Untuk indikator ini merupakan

indikator upaya menekan angka kejadian, jadi semakin rendah kejadian prevalensi stunting maka penilaian kinerjanya akan semakin baik.

Persentase target dan realisasi indikator prevalensi stunting dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2. 7 Grafik Prevalensi Stunting Tahun 2020 s/d 2024

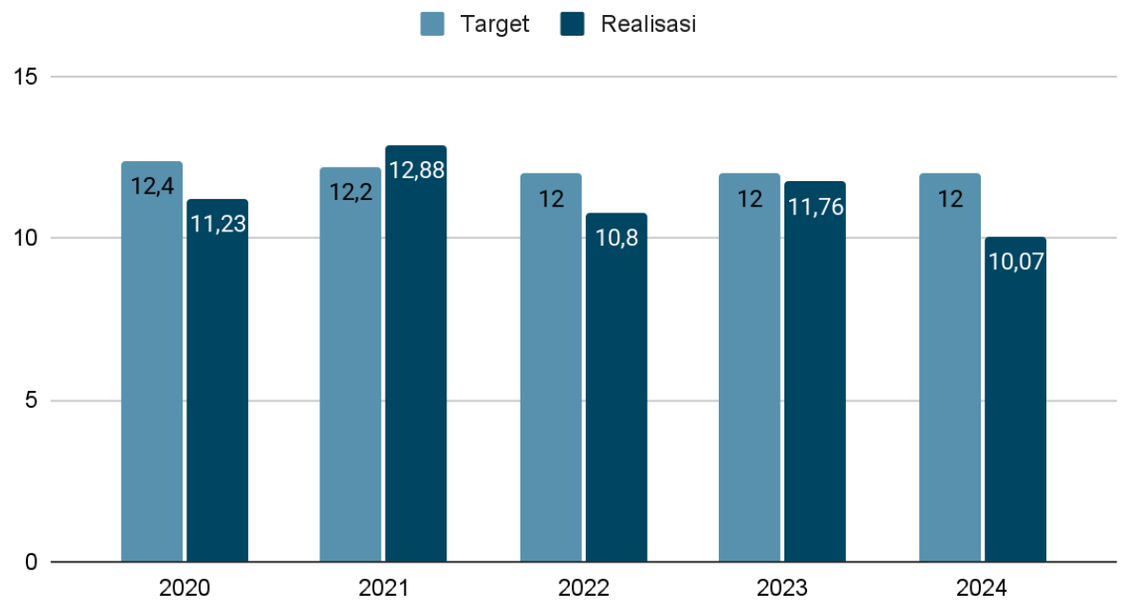

Trend prevalensi stunting di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun. Upaya penurunan stunting dilakukan secara konvergensi, dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program. Upaya yang dilakukan dalam bentuk intervensi spesifik dan sensitif, dimana intervensi sensitif mengambil peran sebesar 70% sedangkan intervensi spesifik mengambil peran sebesar 30%. Dinas Kesehatan melakukan intervensi spesifik berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang RAD 8000 Hari Pertama Kehidupan. Intervensi spesifik ini sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan melalui 18 puskesmas di Kota Yogyakarta. Intervensi sensitif ini sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan dengan bermitra dengan OPD terkait, seperti DP3AP2KB, BAPPEDA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan.

Tabel 2. 7 Pencapaian Target Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 4 kali selama masa kehamilan dengan ketentuan 1 kali pada trimester 1, 1 kali trimester 2 dan 2 kali trimester 3	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun, dibagi sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 % dengan catatan: Nominator yang dihitung adalah Ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan dan Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya.	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				waktu satu tahun dibagi sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%											
		Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 3 kali selama periode neonatal dengan ketentuan Kunjungan Neonatal I (KN1) 6 - 48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.3%	100%
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah balita yang melakukan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali	Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	persen	100%	78.88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan Pelayanan kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang melakukan skrining kesehatan 1 kali	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				tahun ajaran dibagi jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100%										
		Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah usia lanjut (> atau = 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan 1 kali	Jumlah usia lanjut (> atau = 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan 1 kali di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun dibagi sasaran usia lanjut di Kota Yogyakarta yang akan dipenuhi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82.3%	100%
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan	Persentase rumah, TTU, TPM yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan lingkungan serta pemeriksaan sampel air minum yang memenuhi syarat kesehatan	Rerata persentase rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum yang di inspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	persen	96.20 %	90.85%	96.30 %	96.39%	96.5%	96.53%	89%	89.76%	90%	91.5%
		Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Kemantren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau	Jumlah kemantren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra	persen	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun.	potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. dibagi jumlah kemantren seluruhnya											
		Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	Tersedianya obat dan vaksin indikator di Puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar.Pemantauan dilaksanakan terhadap 40 item obat indikator dan 5 item vaksin indikator.	Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap yang tersedia di Instalasi Farmasi Kota dibagi jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap yang wajib dilakukan monitoring dikali 100%	persen	98%	98.83%	98%	100%	98%	100%	98%	100%	98%	100%
		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	Persentase capaian indikator Peresepan Obat Rasional di Puskesmas meliputi indikator peresepan antibiotik pada ISPA Non Pneumonia, indikator peresepan antibiotik pada Diare Non Spesifik dan indikator rerata item per lembar resep	Rata-rata capaian indikator dari % penggunaan Antibiotik pada ISPA non pneumonia dan % penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik dari 18 Puskesmas di Kota Yogyakarta	persen	95%	97.80%	95%	97.92%	95%	99.41% %	95%	100%	95%	99.96%
		Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang memenuhi persyaratan standar usaha dibagi jumlah	persen	-	-	-	-	-	-	90%	100%	90%	100%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang ada di Kota Yogyakarta dikalikan 100%											
		Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk usia produktif 15-59 tahun mendapat deteksi dini penyakit tidak menular	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan deteksi dini penyakit tidak menular dibagi jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang akan dipenuhi dikalikan 100 %	persen	100%	100%	100%	100%	100%	87,13%	76%	100%	77%	100%
		Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	90%	100%
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita Diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	90%	100%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi dikalikan 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	90%	100%
		Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Setiap orang terduga TB dilakukan pemeriksaan TB sesuai standar	Jumlah orang terduga TB yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar dibagi jumlah orang terduga TB dikalikan 100 %	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Setiap orang berisiko tertular HIV yang periksa ke fasilitas kesehatan dilakukan pemeriksaan sesuai standar	Jumlah orang berisiko tertular HIV yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta dibagi jumlah orang yang berisiko HIV yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dikalikan 100 %	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	Setiap kasus DBD yang dilaporkan melalui Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) dilakukan penyelidikan Epidimiologi	Jumlah kasus DBD yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi dibagi jumlah kasus DBD yang dilaporkan melalui Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) dikali 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Setiap kejadian luar biasa dilakukan penyelidikan epidimiologi kurang dari 24 jam di wilayah Kelurahan	Cakupan KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam = (Jumlah KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun/Jumlah KLB yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama) x 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	Jumlah Jemaah haji yang selesai diperiksa kesehatan di Puskesmas	Jumlah Jemaah haji yang selesai diperiksa kesehatan di puskesmas dibagi Jumlah Jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kasus kegawatdaruratan pra fasilitas kesehatan yang tertangani oleh PSC baik ditangani langsung maupun dispatch melalui jejaring PSC	Jumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital dibagi jumlah permintaaan layanan yang memenuhi kriteria gawat darurat pra Hospital dikali 100 persen	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penduduk yang mempunyai JKN	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dibagi jumlah Penduduk	persen	100%	100.65%	100%	101.1% (dari 95% UHC)	100% (dari 95% UHC)	105.23 % (dari 95% UHC)	100%	100.56 %	100%	100.01%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				sesuai Data Konsolidasi Bersih yang berlaku saat itu											
		Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang sudah Terakreditasi dan yang sudah siap untuk dilakukan survei akreditasi	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi Paripurna dan Utama ditambah Jumlah Puskesmas yang sudah dilakukan survei akreditasi dibagi jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Yogyakarta dikalikan 100 %	persen	82.05 %	84.21%	84.62 %	89.47%	87.18 %	94.44%	86.84 %	100%	100%	100%
		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas	Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya, yaitu keluarga mengikuti program KB, persalinan di Fasilitas Kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif, pertumbuhan Balita dipantau, penderita TB paru berobat sesuai standar, penderita hipertensi berobat teratur, penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota JKN, keluarga mempunyai saran air bersih dan keluarga menggunakan jamban	Jumlah pendataan keluarga sehat dibandingkan dengan jumlah pendataan seluruh keluarga di wilayah tertentu, yang besarannya berkisar antara 0 – 1	persen	-	-	-	-	-	-	41.00	44.30	42	44.7

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			sehat												
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei adalah Hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama sesuai standar	Nilai hasil pengukuran survei kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama pada kurun waktu tertentu	skor	72.50	81.92	75	82.06	77	82.75	80	82.85	80,5	86,82
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei adalah Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu	Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu	skor	80	80.85	80.50	82.51	81	83.62	80	83.74	82	84.33
		Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Puskesmas	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Puskesmas	skor	-	-	-	-	-	-	61	74.61	62	121.97
		Nilai pemenuhan kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	skor	-	-	-	-	-	-	46	70.54	51	79.57%
2	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	Tenaga kesehatan melaksanakan Praktik sesuai standar	Tenaga Kesehatan yang melaksanakan praktik dan memiliki izin praktik di Fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta	jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik dibagi jumlah tenaga kesehatan yang praktik di Kota Yogyakarta dikali	persen	85%	92.12%	90%	99.22%	90%	99.50%	95%	102.89 %	100%	100%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				100%											
		Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rerata dari indeks perencanaan SDMK, indeks kinerja SDMK, indeks kompetensi SDMK, dan indeks pengembangan SDMK dengan skala 1 - 5	Penjumlahan dari indeks perencanaan SDMK, indeks kinerja SDMK, indeks kompetensi SDMK, dan indeks pengembangan SDMK ; dibagi 4 .	skor	-	-	-	-	-	-	5	5	4.6 skala 0-5	5.00
3	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang memenuhi persyaratan standar usaha di Kota Yogyakarta	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan standar usaha dibagi Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan di Kota Yogyakarta dikali 100%	persen	-	-	-	-	-	-	90%	100%	100%	100%
		Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi	Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi di sistem OSS dibagi Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mengajukan di sistem OSS dikali 100%	Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi di sistem OSS dibagi Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mengajukan di sistem OSS dikali 100%	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	96.65%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan memenuhi komitmen dibagi Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan verifikasi lapangan dalam kurun waktu 1 tahun di Kota Yogyakarta dikali 100%	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan memenuhi komitmen dibagi Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan verifikasi lapangan dalam kurun waktu 1 tahun di Kota Yogyakarta dikali 100%	persen	-	-	-	-	-	-	80%	98.46%	80%	90.80%
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi	Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di Kota Yogyakarta	Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dibagi jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang mengajukan SLHS di Kota Yogyakarta dikali 100%	persen	-	-	-	-	-	-	90%	100%	90%	92.00%
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	Kelurahan Siaga Aktif Mandiri adalah yang memenuhi 8 indikator stratifikasi Kesi, yaitu: (1) Pertemuan forum; (2) Jumlah KPM/ Kader Teknis; (3) Kemudahan pelayanan akses;	Terhitung dari jumlah Kelurahan Siaga yang memenuhi 8 kriteria indikator dibagi jumlah Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta dikalikan 100 %	persen	-	-	-	-	-	-	80	84.44%	80	86.67%

NO.	PRORAM	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	Formula Indikator	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(4) Posyandu dan UKBM aktif; (5) Akomodasi dana; (6) Pendanaan pihak ketiga; (7) Peraturan Tk. Kelurahan; (8) Capaian PHBS												
5	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil penilaian terhadap laporan SAKIP yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan	sesuai dengan penialian yang diberikan oleh Inspektorat									A	A	A

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa hasil capaian indikator program Dinas Kesehatan mulai tahun sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, dari 35 indikator sebanyak 34 indikator telah mencapai target atau melebihi dari target yang telah ditentukan dan ada satu indikator tidak mencapai target pada tahun 2022 pada indikator program "Persentase Penduduk Kota Usia 15 s/d 59 Tahun Mendapat Skrining Kesehatan sesuai Standar" dimana target indikator tersebut pada Tahun 2022 sebesar 100 persen hanya tercapai 87.13%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

a. Belum optimalnya dukungan dan koordinasi lintas sektor di wilayah, karena anggapan bahwa masalah kesehatan adalah kegiatan sektor kesehatan.
b. Kurangnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat merasa sehat sehingga enggan melakukan deteksi dini.
c. Belum optimalnya koordinasi lintas program, karena banyaknya kegiatan dibidang kesehatan yang memerlukan sumber daya manusia sehingga perlu kolaborasi dengan beberapa program terkait.
d. Upaya deteksi dini secara massal terkendala karena pandemi covid 19 belum sepenuhnya berakhir, sehingga perlu melihat zonasi untuk keamana pelaksanaan kegiatan.
e. Belum optimalnya kerja sama dengan fasilitas kesehatan di wilayah
f. Belum optimalnya kerja sama dengan pengelola tempat- tempat kerja di wilayah.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

Sasaran strategis RSUD Kota Yogyakarta tahun periode Renstra tahun 2023-2026 adalah "Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat" dengan indikator "Hasil Akreditasi Paripurna" dan target "Lulus Akreditasi Paripurna" serta "Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta" dengan indikator "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat" dan target "nilai A (>80-90)". Capaian tahun 2023 Sampai dengan 2024 pada indikator "Hasil Akreditasi Paripurna" telah terealisasi dengan predikat Lulus Akreditasi Paripurna mengacu pada hasil penilaian Akreditasi "Lulus Paripurna" yang dilakukan bulan Oktober 2022 dengan masa berlaku 4 tahun sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2026.

Selanjutnya untuk capaian indikator sasaran Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat pada periode tahun 2024 terdapat perbedaan formulasi penilaian dimana penilaian RB pada OPD saat ini mengacu pada keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2024 memperoleh hasil kategori A dengan nilai akhir 87,593 dan mendapatkan predikat "Sangat Baik". Berikut Capaian indikator sasaran dan program RSUD Kota Yogyakarta apabila disandingkan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Sasaran dan Program RSUD Kota Yogyakarta

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET RENSTRA RSUD KOTA YOGYAKARTA							REALISASI CAPAIAN							RASIO CAPAIAN						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Standar Pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat		Hasil Akreditasi Paripurna	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		
		PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT	Presentase Karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun	8%	-	-	-	-	-	-	13,56%	-	-	-	-	-	-	169,50 %	-	-	-	-	-	-
			Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	79%	-	-	-	-	-	-	82,23%	-	-	-	-	-	-	104,09%	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (*Integrated Health System*)	20	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	110%	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun	-	12%	60%	-	-	-	-	-	23,70%	69,42%	-	-	-	-	-	197,50 %	115,70 %	-	-	-	-
			Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	-	81%	82,00%	-	-	-	-	-	81,50%	86,24%	-	-	-	-	-	100,62 %	105,17 %	-	-	-	-
			Jumlah Modul Sistem Informasi Rumah Sakit	-	24	26	-	-	-	-	-	24	28	-	-	-	-	-	100,00 %	107,69 %	-	-	-	-

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET RENSTRA RSUD KOTA YOGYAKARTA							REALISASI CAPAIAN							RASIO CAPAIAN						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Terintegrasi (*Integrated Health System*)																					
			Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	-	-	80,00 %	80,25 %	80,50%	80,75%	81%	-	-	83,03%	86.43%	80,93%	-	-	-	-	103,79 %	108%	100,53%	-	-
			Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	-	-	-	80%	83%	84%	85%	-	-	-	88,89%	87,03%	-	-	-	-	-	111,11 %	104,85%	-	-
			Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	-	-	-	80%	84%	85%	86%	-	-	-	93,41%	94,93%	-	-	-	-	-	116,76 %	113,01%	-	-
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	AA 91,28	A 87,59	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	-	A (Nilai >80-90	A (Nilai >80-90	A (Nilai >80-90	A (Nilai >80-90	A (Nilai >80-90	A (Nilai >80-90	A (Nilai >80-90	-	-	A (Nilai 84,13)	A (Nilai 84,19)	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-
			Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	111,56 %	116,26 %	-	-	-	-	-	111,56 %	116,26%	-	-

Pada tabel diatas terdapat beberapa perbedaan target sasaran dan program antara tahun 2020 sampai dengan 2022 dikarenakan pada periode tersebut mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dimana pada saat itu terdapat 1 (satu) sasaran yang direncanakan di RSUD Kota Yogyakarta tahun 2020 yaitu Standar Pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat dengan indikator Hasil Akreditasi Paripurna dan satu program kegiatan yaitu program pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit dengan 3 (tiga) indikator program:

- Persentase Karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun
- Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan
- Jumlah Modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)

Kemudian sejak tahun 2021 terdapat 2 (dua) program kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Kota Yogyakarta yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 (empat) indikator program yaitu:

- Persentase Karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun
- Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan
- Jumlah Modul Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)
- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Pada tahun 2022 terdapat penambahan indikator program dari 4 (empat) indikator menjadi 5 (lima) indikator program yaitu: Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal.

Pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 pelaksanaan sasaran dan program kegiatan di RSUD Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 dengan 2 (dua) sasaran yang direncanakan di RSUD Kota Yogyakarta yaitu Standar Pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat dengan indikator Hasil Akreditasi Paripurna dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta serta memiliki 5 (lima) indikator program yaitu:

- Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal
- Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS
- Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan
- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat
- Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, diperlukan perbaikan kinerja Perangkat Daerah melalui penetapan dan penyesuaian target serta indikator kinerja bagi Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Pada

tahun 2024 berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat perubahan indikator pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dimana pada tahun 2023 indikator yang ditetapkan adalah Persentase pendapatan BLUD rumah sakit kemudian setelah dilakukan perbaikan kinerja pada tahun 2024 berubah menjadi Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran meskipun secara target tetap sama yaitu 100 %.

C. Capaian Indikator SPM Dinas Kesehatan

Berdasarkan hasil penilaian kinerja indikator SPM Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa predikat pencapaian indikator program strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dari 12 indikator SPM yang dinilai

Tabel 2. 9 Capaian Indikator SPM Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	78.88%	100%	88%	100%	100%
5.	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	87.13%	100%	100%
7.	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	mendapatkan pelayanan kesehatan						
11.	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan tahun 2020–2024, sebagian besar indikator telah mencapai target sebesar 100%. Namun, terdapat dua indikator yang pada awal periode belum mencapai target, yaitu cakupan pelayanan kesehatan bagi balita dan warga negara usia produktif. Pada tahun 2020, Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan hanya sebesar 78,88%, meningkat menjadi 100% di tahun 2021, namun kembali turun menjadi 88% pada 2022, dan mencapai 100% pada 2023 hingga 2024. Sementara itu, cakupan pelayanan kesehatan warga usia produktif hanya mencapai 87,13% pada 2021, kemudian mencapai 100% pada 2022 hingga 2024.

Pada tahun 2020 jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar hanya 78.88% karena masih banyak balita yang tidak melakukan penimbangan minimal 8 kali selama setahun baik di Posyandu maupun di pelayanan kesehatan. Hal ini tidak lepas dari adanya pandemic Covid-19 yang berefek pada tidak berjalannya pelaksanaan posyandu dan balita tidak dapat dipantau secara rutin. Kendala yang ditemui di tahun 2020 menjadi evaluasi dan perbaikan di tahun 2021, sehingga pada tahun 2021 bisa mencapai 100%.

D. Survei Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Yogyakarta

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit maka berikut disampaikan Kinerja pencapaian SPM RSUD Kota Yogyakarta sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 2. 10 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Gawat Darurat	Kemampuan menangani *life saving* di Gawat Darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam
		Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku (BLS/ PPGD/ GELS/ATLS)	100%	80,30%	82%	87%	100%	100%
		Ketersediaan tim penaggulangan bencana 1 (satu) tim	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Waktu tanggap pelayanan Dokter Gawat Darurat	≤ 4 Menit	1 menit 9 detik	1,44 menit	1,15 Menit	2 menit 29 detik	1 menit 24 detik
		Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat (IKM)	≥ 70%	93,28%	81,47%	83%	90,10%	85,00%
		Kematian pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat	≤ 2 ‰	5,57%	1033,00%	3,54%	2,43%	4,84%
		Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Rawat Jalan	Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter spesialis	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersedian pelayanan sesuai dengan rumah sakit kelas B	4 spesialis pelayanan dasar dan 4 spesialis penunjang, 8 spesialis	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			lainnya, dan 2 sub spesialis					
		Buka pelayanan sesuai ketentuan	Senin - Kamis 09.00 - 14.00 Jum`at -Sabtu 09.00 - 13.00, standar 100%	23,69%	24%	28%	100%	100%
		Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 menit	84,41 menit	92 menit	88,27 menit	81,87 menit	95,5
		Kepuasan pelanggan pada Rawat Jalan	≥ 90 %	94,28%	82,12%	81,21%	91,97%	98,00%
		Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	≥ 60 %	98%	100%	100%	98%	100%
		Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	≥ 60 %	97%	100%	100%	98%	100%
3	Pelayanan Rawat Inap	Pemberi pelayanan di rawat inap	a. dokter b. perawat (min D3)	100%	100%	100%	100% dokter Sp dan Perawat (min.D3)	100% dokter Sp dan Perawat (min.D3)
		Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	dokter spesialis	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan pelayanan rawat inap sesuai dengan kelas B	4 spesialis pelayanan dasar dan 4 spesialis penunjang, 8 spesialis lainnya, dan 2 sub spesialis	100%	100%	100%	100%	100%
		Jam Visit dokter spesialis	06.00 - 14.00 setiap hari kerja Persentase jumlah dokter yang patuh melakukan visit sesuai standar	92,71%	100,00%	96,92%	98,21%	98,01%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kejadian infeksi paska operasi	≤ 1,5 %	0%	0,00%	0%	0,53%	0,70%
		Angka kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5 %	0,32%	0,41%	0%	0,06%	0,30%
		Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang mengakibatkan kecacatan/ kematian	100%	100%	100,00%	100%	99,40%	100%
		Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	2,49%	28,65%	1,69%	1,95%	2,08%
		Kejadian pulang paksa (atas permintaan sendiri)	≤ 5 %	0,70%	1,00%	0,58%	0,42%	0,39%
		Kepuasan pelanggan rawat inap	≥ 90%	96,92%	81,00%	82,62%	92,23%	92,00%
		Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	≥ 60 %	100%	70%	100%	100%	100%
		Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB	≥ 60 %	100%	96%	100%	100%	100%
4	Pelayanan Bedah Sentral	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	<2 hari	< 2 hari	<2 hari	< 2 hari	< 2 hari
		Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	0%	0%	0%	0%	0%
		Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi*	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi*	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi & salah penempatan ET*	≤ 6 %	0%	0%	0%	0%	0%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pelayanan Persalinan, KIA, Perinatologi, dan KB	Kejadian kematian ibu karena persalinan*	Pendarahan ≤ 1 %	0%	0%	0%	0%	0%
			Preeklamsia ≤ 30 %	0%	0%	0%	0%	0%
			sepsis ≤ 0,2 %	0%	0%	0%	0%	0%
		Pemberian pelayanan persalinan normal	Dokter SpOG, Dokter umum terlatih, Bidan	100%	100%	100%	100% Dokter SpOG, Dokter umum terlatih, Bidan	100%
		Pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit	tim PONEK yang terlatih*	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemberian pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	dokter Sp.OG, dokter Sp.A, dokter Sp.An	100%	100%	100%	100% dokter Sp.OG, dokter Sp.A, dokter Sp.An	100%
		Kemampuan menangani BBLR (1500 g - 2500 g)	100%	80,50%	93%	100%	100%	90,55%
		Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	23,98%	29,57%	35,14%	61,48%	46,73%
		Persentase KB mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp.OG	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	99,12%	85,15%	83,07%	96,55%	95,80%
6	Pelayanan Perawatan Intensif	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama < 72 jam	≤ 3 %	0,00%	0,00%	0,26%	0,01%	1,76%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemberi pelayanan unit intensif Dokter SpAn; dokter spesialis kasus; perawat mahir (D3) ICU/ICCU/PICU/ NICU / setara D4	100%	81,25%	71,43%	75,26%	81,13%	84,74%
7	Pelayanan Radiologi	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	1 jam 30 menit	1 jam 58menit	2 jam 7 menit	2 jam 54 menit 22 detik	2 jam 57 menit 44 detik
		Pelaksana ekspertisi	Dokter SpRad	100%	100%	100%	100%	100%
		Kejadian kegagalan pelayanan rongten kerusakan foto	≤ 2 %	0,62%	0,56%	0,83%	0,56%	0,59%
		Kepuasan pelanggan ≥ 80%	≥ 80%	95,87%	81,41%	81,64%	89,79%	96,10%
8	Pelayanan Patologi Klinik	Waktu tunggu hasil pelayanan labolatorium, kimia darah & darah rutin cito	≤ 140 menit	52 menit 28 detik	55,85 menit	51,7 menit	46 menit 62 detik	60 menit 19 detik
		Pelaksanan ekspertisi	Dokter Sp.PK	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratotium*	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	94,21%	80,93%	80,93%	91,30%	97,83%
9	Pelayanan Rehabilitasi Medik	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan*	≤ 50 %	0,16%	1,40%	2,16%	1,15%	1,21%
		Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	0,16%	84,30%	76,96%	90,60%	96,60%
10	Pelayanan Farmasi	Waktu tunggu pelayanan : a. resep obat jadi	≤ 30 menit	10 menit 40 detik	20 menit	33 menit 16 detik	35 menit 5 detik	33 menit 06 detik
		b.resep obat racikan	≤ 60 menit	37 menit 50 detik	36 menit 40 detik	62 menit 53 detik	58 menit 9 detik	50 menit 22 detik
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat*	100%	99,99%	100,00%	99,99%	99,99%	99,99%
		Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	94,29%	79,61%	84,22%	91,52%	97,70%
		Penulisan resep sesuai formularium RS	100%	87,85%	93%	95,83%	94%	94,15%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Pely. Gizi	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	16,70%	20,63%	16,50%	18,96%	18,98%
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet*	100%	100%	100%	100%	100%	99,90%
12	Transfusi Darah	Pemenuhan kebutuhan darah setiap pelayanan tranfusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kejadian reaksi tranfusi	≤ 0,01 %	0%	0%	0%	0%	0%
13	Pelayanan Pasien miskin	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pelayanan Rekam Medik	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan :						
		Kelengkapan pengisian rekam medik rawat jalan 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100,00%	100%	80,16%	100%	100%
		Kelengkapan pengisian rekam medik rawat inap 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100,00%	85%	82,75%	100%	100%
		Kelengkapan *Informed Concent* setelah mendapat informasi yang jelas	100%	22%	22%		100%	100%
		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	rerata ≤ 10 menit	13 menit 50 detik	1 menit 31 detik	4 menit	4 menit	menggunakan rekam medis elektronik (RME)
		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	rerata ≤ 15 menit	9 menit 17 detik	12 menit 58 detik	13 menit 15 detik	9 menit 5 detik	8 menit 10 detik
15	Pelayanan Sanitasi / Pengelolaan limbah	Baku mutu limbah cair : BOD COD TSS Ph	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Administrasi dan manajemen	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	91%	100%	93%	100%	100%	100%
		Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
		Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	4,90%	16,40%	46,60%	25,40%	71%
		Cost recovery meningkat	≥ 40 %	147,00%	124,00%	155,17%	100,56%	78,82%
		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap*	≤ 2 jam	52 menit	1 jam 03 menit	1 jam 46 menit	1 jam 26 menit	1 jam 07 menit
		Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Pel Ambulance/Kereta Jenasah	Waktu Pelayanan ambulance/ kereta jenasah	24 jam	100%	100%	100%	24 jam	24 jam
		Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenasah di RS ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Pemulasaraan Jenazah	Waktu tanggap *(respon time)* pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	21 menit 34 detik	23,35 menit	19,15 menit	17,58 menit	20,06 menit
19	Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	88,04%	92,83%	84,00%	88,66%	80%
		Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	48,70%	52,33%	68,87%	48,75%	62,83%

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian				
		Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peralatan labolatorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu	100%	94,20%	99,17%	100%	97,15%	100%
20	Pelayanan Laundry	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Pencegahan & pengendalian infeksi (PPI)	Adanya anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih ≥ 75 %	97,70%	98,47%	81,30%	81,30%	81,30%
		Tersedia APD di setiap instalasi	≥ 60 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi *nosokomial* /HAI *(Health care associated infection)* di RS minimal 1 parameter*	≥ 75 %	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa hasil capaian indikator sesuai Standar Pelayanan Minimal tahun sejak tahun 2022 sampai dengan 2024, dari 98 indikator sebanyak 86 indikator telah memenuhi standar (87,75%) dan 12 indikator belum memenuhi standar (12,24%).

Berikut kami sampaikan data tabel penjelasan mengenai capaian indikator sesuai Standar Pelayanan Minimal tahun sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 beserta strategi untuk meningkatkan capaian pada beberapa indikator yang belum tercapai:

Tabel 2. 11 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024

No.	Standar Pelayanan Minimal			Capaian			Penjelasan atas capaian	Strategi untuk meningkatkan capaian
	Indikator	Jenis Pelayanan	Standar	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kematian pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat	≤ 2 ‰	3,54	2,43‰	4,84%	Karena sebagai rumah sakit rujukan sehingga banyak menerima kasus kompleks	Melakukan peningkatan kompetensi SDM, meningkatankan sarana prasarana di Instalasi Gawat Darurat

No.	Standar Pelayanan Minimal			Capaian			Penjelasan atas capaian	Strategi untuk meningkatkan capaian
	Indikator	Jenis Pelayanan	Standar	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Waktu tunggu di Rawat Jalan	Pelayanan Rawat Jalan	≤ 60 menit	88,27 menit	81,87 menit	95,5 menit	Pengguna pendaftar onset melalui loket pendaftaran masih lebih banyak daripada yang mendaftar mandiri via mesin antrian, perlu proses verifikasi di loket pendaftaran sehingga walaupun sudah mendaftar via mesin pendaftaran mandiri tetap harus verifikasi di loket	Merancang sistem verifikasi peserta BPJS rawat jalan dengan sistem verifikasi berbasis online
3	Jam Visit dokter spesialis	Pelayanan Rawat Inap	06.00 - 14.00 setiap hari kerja	96,92%	98,21%	98,01%	Adanya perbedaan pengambilan data pada INM dan SPM, INM terhitung pukul 06.00 - 14.00 WIB dan SPM 08.00 - 14.00 WIB	Sosialisasi kepada petugas pengambil data
4	Kematian pasien > 48 jam		≤ 0,24 %	1,69%	1,95%	2,08%	Kasus yang ditangani merupakan kasus kompleks yang memerlukan SDM dan sarana prasara yang lebih mendukung pelayanan kasus kompleks	Meningkatkan kompetensi SDM, melengkapi sarana prasarana
5	Kemampuan menangani BBLR (1500 g - 2500 g)	Pelayanan Persalinan, KIA, Perinatologi, dan KB	100%	100%	100%	90,55%	Ada pasien bayi BBLR yang dirujuk dikarenakan membutuhkan penanganan dari dokter Spesialis anak dengan tambahan kompetensi Jantung	Meningkatkan kompetensi SDM dan meningkatkan jejaring rujukan sesuai kompetensi
6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria		≤ 20 %	35,14%	61,48%	46,73%	Adanya ketentuan rujukan berjenjang sehingga kasus persalinan ditangai di FKTP sehingga banyak pasien yang masuk merupakan kasus kompleks	Berkoordinasi dengan faskes pertama agar melakukan peningkatan kompetensi SDM Medis dan Kesehatannya
7	Pemberi pelayanan unit intensif Dokter SpAn; dokter spesialis kasus; perawat mahir (D3) ICU/ICCU/PICU /NICU / setara D4	Pelayanan Perawatan Intensif	100%	75,26%	81,13%	84,74%	Masih ada SDM perawat yang belum bersertifikat mahir keperawatan intensif karena pelatihan yang memakan waktu 3 bulan dan berbiaya mahal	Melakukan perencanaan pengiriman perawat untuk pelatihan keperawatan intensif dengan menyediakan anggaran, dan mendaftarkan SDM perawat untuk pelatihan tersebut
8	Waktu tunggu pelayanan : a. resep obat jadi	Pelayanan Farmasi	≤ 30 menit	33 menit 16 detik	35 menit 5 detik	33 menit 06 detik	1. Beban Kerja tinggi dan jumlah tenaga apoteker serta asisten apoteker belum terpenuhi 2. Penumpukan resep pada jam sibuk antara jam 10.00-14.00 karena dokter prektek di poliklinik pada jam yang sama	1.Melakukan perhitungan kebutuhan tenaga apoteker serta asisten apoteker berdasarkan beban kerja sesuai standar pelayanan kefarmasian 2. Melakukan inovasi Pengantaran Obat dan peningkatan kompetensi serta ketrampilan tenaga apoteker dan asisten apoteker untuk dapat mengefisiensikan waktu
9	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat*		100%	99,99%	99,99%	99,99%	Labeling manual, obat-obatan LASA	Diusahakan labeling by sistem atau digitalisasi, meminimalisir pengadaan obat-obatan LASA

No.	Standar Pelayanan Minimal			Capaian			Penjelasan atas capaian	Strategi untuk meningkatkan capaian
	Indikator	Jenis Pelayanan	Standar	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Penulisan resep sesuai formularium RS		100%	95,83%	94%	94,15%	Perkembangan layanan di RS menyebabkan kebutuhan obat baru yang belum tersedia di Formularium RS bertambah	Rapat KFT membahas tambahn obat untuk pelayanan baru di RS agar masuk dalam Formularium RS
11	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet*	Pely. Gizi	100%	100%	100%	99,90%	Petugas Pramusaji kurang teliti dalam mendistribusikan paket gizi ke pasien	Pramusaji diberikan edukasi terkait kesalahan tersebut dan memastikan petugas dalam keadaan sehat
12	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS	100%	68,87%	48,75%	62,83%	Bertambahnya alat tidak diiringi dengan bertambahnya SDM	Pengusulan untuk Analisa jabatan dan pemenuhan SDM

Kemudian berdasarkan data diatas secara umum untuk meningkatkan penilaian setiap unsur pelayanan pada SPM tahun berikutnya, RSUD Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya guna meningkatkan kualitas nilai pelayanan yang telah ada. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan antara lain dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan perbaikan melalui kegiatan renovasi dan rehabilitasi beberapa ruang/Gedung yang digunakan untuk pelayanan medis dan non medis serta pelayanan penunjang yang menggunakan berbagai macam sumber anggaran baik APBD, dan BLUD.
2) Melakukan standarisasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
3) Melakukan pemenuhan SDM baik SDM Medis maupun Kesehatan (Perawat, Bidan, dll) serta melakukan evaluasi berkala
4) Melakukan perbaikan pelayanan dengan melakukan pemenuhan standar pelayanan pasien, monitoring evaluasi dan umpan balik data pelayanan kepada para klinisi;
5) Melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses seluruh layanan yang ada di RSUD Kota Yogyakarta melalui berbagai media;
6) Melakukan pelatihan service excellent secara rutin bagi seluruh pegawai yang ada di pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan serta meningkatkan citra positif pelayanan RSUD Kota Yogyakarta di masyarakat.
7) Melakukan evaluasi berkala pada masing-masing SPM.

E. Capaian Kinerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Survei Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dasar hukum penyusunan SKM adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang

kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 2. 12 Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2020 - 2024

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Indikator Program	Target (dalam %)					Realisasi (dalam %)									
									2020		2021		2022		2023		2024	
				2020	2021	2022	2023	2024	Sem I	Sem II	Sem I	Sem II	Sem I	Sem II	Sem I	Sem II	Sem I	Sem II
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	72,5	77	77	80	80,5	76,27	81,92	77,39	82,06	81,70	82,75	82,79	82,85	86,07	86,82
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																	

Sumber : Data Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta, 2025 (Data diolah)

F. Standar Pelayanan Minimal RS Pratama

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh Rumah Sakit sebagai pedoman dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 129/Menkes/SK/11/2008.

Tabel 2. 13 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pratama Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target RS Pratama	CAPAIAN				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Gawat Darurat	1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%
		2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		3	Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/ PPGD/ GELS/ALS)	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%
		4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu Tim	Satu Tim	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang	≤ 5 menit terlayani	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Kepuasan pelanggan	≥ 70 %	≥ 70 %	79%	80%	82%	83%	86%
		7	Kematian pasien ≤ 24 jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	≤ 2‰	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Rawat Jalan	1	Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter spesialis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Ketersedian pelayanan	a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00	6 hari kerja, sesuai ketentuan RS Senin - Kamis 08.00 - 14.00 Jumat 08.00 - 11.30 Sabtu : 08.00 - 13.00	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	45 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit
		5	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	90%	79,10%	79,73%	82,23%	82,82%	86,45%
		6	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	a. ≥ 60 % b. ≥ 60 %	a. ≥ 60 % b. ≥ 60 %	100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%
3	Pelayanan Rawat Inap	1	Pemberi pelayanan di rawat inap	a. Dokter Spesialis b. Perawat minimal pendidikan D3	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target RS Pratama	CAPAIAN				
						2020	2021	2022	2023	2024
		3	Ketersediaan pelayanan rawat inap	Anak, Penyakit Dalam, Kebidanan, Bedah	Ketersediaan pelayanan rawat inap sesuai dengan kelas D Anak, Dalam, Obsgyn, Radiologi, Anesthesia, Patologi Klinik	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Jam visite dokter spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%	100%	98%	100%	98%
		5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	0%	0%	0%	0%	0%
		6	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	0%	0%	0%	0%	0%
		7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang mengakibatkan kecacatan/ kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	0%	0,29%	0%	0%	0%
		9	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	≤ 5 %	0%	0,35%	0%	0%	0%
		10	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	≥ 90 %	79,10%	79,73%	82,23%	82,82%	86,45%
		11	Rawat Inap TB a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	a. ≥ 60 % b. ≥ 60 %	a. ≥ 60 % b. ≥ 60 %	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%
		12	Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa	NAPZA, Gangguan Psikotik, Gangguan Neurotik, dan Gangguan Mental Organik	RS Pratama tidak ada layanan jiwa	-	-	-	-	-
		13	Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	100%	RS Pratama tidak ada layanan jiwa	-	-	-	-	-
		14	Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	100%	RS Pratama tidak ada layanan jiwa	-	-	-	-	-
		15	Lama hari perawatan Pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu	RS Pratama tidak ada layanan jiwa	-	-	-	-	-
4	Pelayanan Bedah Sentral	1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	≤ 2 hari	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	≤ 1 %	0%	0%	0%	0%	0%
		3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %	≤ 6 %	0%	0%	0%	0%	0,13%

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target RS Pratama	CAPAIAN				
						2020	2021	2022	2023	2024
5	Persalinan, KIA, Perinatologi, dan KB	1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Pendarahan ≤ 1 % b. Preeklamsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %	a. Pendarahan ≤ 1 % b. Preeklamsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %	a. 0,4 % b. 0,26% c. 0,16 %	a. 0 % b. 0% c. 0%	a. 0 % b. 0% c. 0%	a. 0 % b. 0% c. 0%	a. 0 % b. 0% c. 0%
		2	Pemberian pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp.OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	a. Dokter Sp.OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Pemberian pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp.OG b. Dokter Sp.A c. Dokter Sp.An	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	≤ 20 %	65,37%	63,59%	61,00%	52,00%	45,69%
		7	Keluarga Berencana a. Persentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih b. Persentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	79,10%	79,73%	82,23%	82,82%	86,45%
6	Pelayanan Intensif	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama < 72 jam	≤ 3 %	≤ 3 %	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%
		2	Pemberi pelayanan unit intensif	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pelayanan Radiologi	1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam
		2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Rad	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2 %	2%	1,50%	0,85%	0,00%	0,38% %	0,00%
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	79,10%	79,73%	82,23%	82,82%	86,45%
8	Pelayanan Lab. Patologi Klinik	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium kimia darah & darah rutin	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit
		2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	79,10%	79,73%	82,23%	82,82%	86,45%

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target RS Pratama	CAPAIAN				
						2020	2021	2022	2023	2024
9	Pelayanan Rehabilitasi Medik	1	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤ 50 %	Tidak ada layanan Rehab Medik di RS Pratama	-	-	-	-	-
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	Tidak ada layanan Rehab Medik di RS Pratama	-	-	-	-	-
		3	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	Tidak ada layanan Rehab Medik di RS Pratama	-	-	-	-	-
10	Pelayanan Farmasi	1	Waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Racikan	a. ≤ 30 menit b. ≤ 60 menit	a. ≤ 30 menit b. ≤ 60 menit	12 menit	a. 18 menit b. 45 menit	a. 18 menit b. 49 menit	a. 18 menit b. 49 menit	a. 18 menit b. 49 menit
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	99,90%	99,00%	99,95%	99,98%	99,98%
		3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	79,10%	79,73%	82,23%	82,82%	86,45%
		4	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	99,80%	99,90%	80,36%	86,19%	85,85%
10	Pelayanan Gizi	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	≥ 90 %	84,84%	98,77%	100%	100%	100%
		2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	≤ 20 %	25,54%	22,73%	17,26%	8,18%	15,10%
		3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	99,32%	100%	100%	100%	100%
12	Pelayanan Transfusi Darah	1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% terpenuhi	100% terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	0%	0%	0,005%	0%	0,005%
13	Pelayanan GAKIN	1	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100 % terlayani	100%	100%	100%	100%	100%
14	Rekam Medik	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	64,34%	86,00%	83,66%	89,67%	94,00%
		2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapat informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%	99,90%	100%	97,00%
		3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	≤ 10 menit	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	≤ 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%
15	Pelayanan Sanitasi / Pengelola Limbah	1	Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Administrasi dan manajemen	1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	≥ 60 %	20%	30,68%	80%	80%	75%

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target RS Pratama	CAPAIAN				
						2020	2021	2022	2023	2024
		6	Cost recovery	≥ 40 %	≥ 40 %	93,93%	118,87%	97,86%	88,17%	89,77%
		7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	≤ 2 jam	100%	100%	100%	100%	100%
		9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Ambulance / Kereta Jenazah	1	Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit	≤ 230menit	≤ 230menit	25 menit	25 mnt	25 mnt	25 mnt	25 mnt
		3	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	< 15 menit	< 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit
18	Pemulasaraan Jenazah	1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam	≤ 2 Jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam
19	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	≥ 80 %	100%	100%	100%	85%	87%
		2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	100%	100%	72%	100%	100%
		3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Pelayanan Laundry	1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	99%	99%	98%	99%	100%
		2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	97%	100%	100%	98%	100%
21	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1	Adanya anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %	75%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial /HAI (Health care associated infection) di RS minimal 1 parameter*	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Pelayanan CSSD	1	Ketepatan waktu sterilisasi instrumen cito menggunakan autoclave	Tidak ada standar	86%	86,00%	0,00%	100%	100%	100%
		2	Keberhasilan penggunaan indikator strip internal di semua instrument	Tidak ada standar	100%	100%	95,09%	92%	99%	100%

Sumber : Tim Mutu Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta, 2025 (Data diolah)

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan

2.4.1 Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibagi dalam 4 (empat) bidang. Masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) seksi. Setiap seksi memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi sesuai dengan fokus pada seksi masing-masing. Berdasarkan tugas dan fungsinya, prioritas pelayanan Dinas Kesehatan ditujukan terutama kepada fasilitasi penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang termasuk dalam layanan Standar Pelayanan minimal (SPM). Pelaksanaan dan evaluasi SPM pada tahun 2024 mendasar pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Sementara dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan tidak dapat terlepas dari berbagai permasalahan, isu penting dan strategis yang berkembang, baik pada tatanan Pemerintah Pusat maupun tatanan Daerah. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah Kota Yogyakarta untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis menentukan sasaran dan program pembangunan Kota Yogyakarta khususnya di bidang kesehatan.

Dalam dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 terdapat salah satu permasalah daerah yang menyangkut urusan kesehatan yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat. Dari Perumusan masalah tersebut merupakan masalah yang bersifat makro bagi Daerah. Berdasarkan masalah tersebut, masalah pokok Dinas Kesehatan dipecahkan melalui rumusan dibawah ini:

1. Misi Kepala Daerah Kota Yogyakarta terkait yaitu: Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan
2. Tujuan Dinas Kesehatan: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
3. Sasaran Dinas Kesehatan : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dan Terwujudnya tata kelola Dinas Kesehatan yang baik dan adaptif

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 14 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Bidang Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Permasalahan	Akar/Penyebab Masalah
1.	Masih terdapat Kematian Ibu (Hamil/Bersalin), Bayi, Balita dengan berbagai penyebab Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting. Tingkat Kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pola hidup sehat yang masih perlu ditingkatkan. Regenerasi kader kesehatan belum berjalan secara merata dan kompetensi kader kesehatan belum optimal	1. Pengetahuan masyarakat terhadap risiko kehamilan, persalinan, dan nifas belum optimal 2. Kurangnya kewaspadaan pada faktor risiko kehamilan dan persalinan baik oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan 3. Penduduk yang beragam/heterogen dan pendatang dari berbagai wilayah, baik yang tinggal atau komuter memiliki budaya/kebiasaan yang dibawa berbeda-beda. Meskipun pengetahuan masyarakat sudah ada, namun jika tidak diikuti dengan kemauan dan sikap maka tidak ada perubahan perilaku. 4. Regenerasi kader berjalan namun belum merata karena bagi kelompok usia produktif, cukup sulit membagi waktu untuk bekerja dan aktif mengikuti kegiatan posyandu. 5. Peningkatan kompetensi kader belum optimal karena masih terbatasnya sumber daya.
2.	1. Akses dan mutu pelayanan fasyankes belum optimal 2. Capaian ASPAK Puskesmas yang belum optimal	1. Pemahaman sistem rujukan di fasyankes dan masyarakat masih kurang 2. Adanya perubahan aplikasi ASPAK sesuai dengan kluster 3. Masih diperlukan penyesuaian alur pencatatan pelaporan barang (SIMBARA) dengan ASPAK
3.	1. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain: HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dan lain-lain. 2. Belum optimalnya implementasi Integrasi Data / sistem informasi kesehatan antar program maupun antar sektor	1. Masih adanya stigma di masyarakat, terhadap penyakit TB dan HIV 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit 3. Kurangnya kesadaran masyarakat penderita PTM untuk kontrol rutin 4. Banyaknya sistem pelaporan Program namun belum adanya aplikasi terintegrasi dari Pusat (ASIK) yang memenuhi kebutuhan data program secara keseluruhan.
4.	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan.	1. Pemenuhan obat dan reagen program sangat bergantung dari pemerintah pusat. 2. Tidak ada formasi di peta jabatan dan pengadaan sumber daya manusia.

No	Permasalahan	Akar/Penyebab Masalah
	belum optimalnya jaminan pemenuhan ketersediaan obat, reagen untuk pelayanan dasar dan program, serta sarana dan prasarana penyimpanan logistik kefarmasian. Belum optimalnya cakupan sertifikasi dan lisensi bidang kesehatan	belum dan standar penilaian kompetensi. 3. Integrasi dan interoperabilitas sistem pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di bidang kesehatan. 4. Kurang optimalnya sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada pelaku usaha. 5. Belum optimalnya kerjasama lintas sektor.

Identifikasi permasalahan tersebut di atas sebagai faktor kelemahan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam menghadapi permasalahan yang ada. Melihat faktor penghambat yang ada menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya, Dinas Kesehatan harus menjalin kerja sama baik lintas program maupun lintas sektoral serta meningkatkan peran serta masyarakat.

2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan kesehatan baik internal maupun eksternal dalam pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dapat diidentifikasi faktor-faktor kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Treats). Berikut hasil dari analisis permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan :

Kekuatan (Strength)

Kekuatan (Strength) yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta antara lain adalah adanya komitmen untuk peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin melalui jaminan kesehatan Daerah, adanya kebijakan satu kampung satu tenaga kesehatan, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program-program kesehatan dengan adanya kader kesehatan di setiap kelurahan, lingkungan yang kondusif yang menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di setiap wilayah di Kota Yogyakarta.

Kelemahan (Weakness)

Sedangkan Kelemahan (Weakness) yang masih harus dihadapi di Kota Yogyakarta adalah masih terjadinya kasus penyakit yang terlambat ditangani dikarenakan adanya keterlambatan pengambilan keputusan oleh keluarga, kondisi gedung fasilitas kesehatan milik pemerintah yang kurang memadai sesuai standar pelayanan, serta masih belum tercukupinya Sumber Daya Manusia kesehatan dan belum terpenuhi kebutuhan SDM sesuai Analisis jabatan.

Peluang (Oppoturnities)

Adapun peluang yang mendukung pelayanan Dinas Kesehatan adalah banyaknya fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta di Kota Yogyakarta, Puskesmas dan Rumah Sakit milik Pemerintah yang melaksanakan PPK BLUD, adanya kader kesehatan di setiap RW, adanya regulasi bidang kesehatan yang mendukung upaya kesehatan, serta adanya perguruan tinggi bidang kesehatan yang mendukung peningkatan tenaga kesehatan yang kompeten

Ancaman (Treats)

Sedangkan ancaman dalam pelayanan kesehatan antara lain kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam berperilaku sehat masih rendah, dinamika epidemiologi penyakit yang cepat, mobilitas masyarakat terutama ibu hamil dan status kependudukan yang menyulitkan tenaga kesehatan untuk melaksanakan intervensi kesehatan, kepadatan penduduk, kepadatan hunian dan kualitas lingkungan yang tidak memenuhi syarat.

2.4 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Tabel 2. 15 Teknis Penyimpulan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Akses layanan kesehatan yang komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan berbasis masyarakat	- Akses dan mutu pelayanan fasyankes belum optimal - Regenerasi kader kesehatan belum berjalan secara merata dan kompetensi kader kesehatan belum optimal - Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan	1. Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	SDGs 3: kehidupan yang sehat dan sejahtera	Arah kebijakan dalam RPJMN yang menyebutkan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola (integrasi pelayanan kesehatan primer) Sasaran Utama RPJMN 2025-2029 "terwujudnya Kesehatan untuk semua" : Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional		Penguatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kota Yogyakarta

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat	- Masih terdapat Kematian Ibu (Hamil/Bersalin), Bayi, Balita dengan berbagai penyebab - Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.	1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal 2. Kurangnya ruang terbuka hijau piblik 3. Kawasan dan pemukiman kumuh belum seluruhnya teratasi 4. Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	Double burden of malnutrition SDGs zero hunger.	Target stunting nasional 18 % Sasaran Utama RPJMN 2025-2029 “terwujudnya Kesehatan untuk semua” : Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek pada balita.	RPJMD Pemda DIY th. 2022-2027: Prevalensi Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang Pada Balita Isu Strategis Renstra Dinkes DIY 2022-2027: Permasalahan kesehatan ibu – anak dan gizi termasuk stunting	Peningkatan kualitas gizi masyarakat

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.	1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal 2. Kurangnya ruang terbuka hijau piblik 3. Kawasan dan pemukiman kumuh belum seluruhnya teratasi	SDGs zero hunger	Sasaran Utama RPJMN 2025-2029 "terwujudnya Kesehatan untuk semua" : Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek pada balita. Target stunting nasional 18 %	RPJMD Pemda DIY th. 2022-2027: Prevalensi Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang Pada Balita Isu Strategis Renstra Dinkes DIY : Permasalahan kesehatan ibu – anak dan gizi termasuk stunting	Pencegahan stunting
Pengendalian Penyakit dan pembudayaan hidup sehat	Tingkat Kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pola hidup sehat yang masih perlu ditingkatkan.	1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal 2. Kurangnya ruang terbuka hijau publik 3. Kawasan dan pemukiman kumuh yang belum	SDGs 3: kehidupan yang sehat dan sejahtera	Arah kebijakan dalam RPJMN yang menyebutkan pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat Peningkatan prevalensi NCDs	Renstra Dinas Kesehatan DIY Tahun 2022-2027 :Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Peraturan Gubernur DIY Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Hidup	Peningkatan kesehatan melalui GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		seluruhnya teratasi		Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Sehat Yogyakarta Sehat lestari Tahun 2021-2025	
	- Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain: HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dan lain-lain. - Belum optimalnya implementasi Integrasi Data / sistem informasi kesehatan antar program maupun antar sektor	1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal 2. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah 3. Kurangnya ruang terbuka hijau	SDGs 3: kehidupan yang sehat dan sejahtera	Arah kebijakan dalam RPJMN yang menyebutkan pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat Sasaran Utama RPJMN 2025-2029 “terwujudnya Kesehatan untuk semua” : Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Renstra Dinas Kesehatan DIY Tahun 2022-2027 :Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Multiple burden disease dari penyakit tidak menular degeneratif, penyakit menular infeksi dan infeksi baru (re-emerging and new emerging disease) serta potensi kejadian luar biasa/ wabah)	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut perlu strategi dan kebijakan yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Seperti yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan daerah Kota Yogyakarta untuk bidang kesehatan menitikberatkan pada perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat. Isu strategis tersebut di atas menjadi agenda penting dalam pembangunan kesehatan Kota Yogyakarta guna pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan, dan indikator daerah serta mendukung SPM dan SDGs sebagai komponen penting dalam pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat". SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SDG's merupakan indikator yang menyetarakan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat global, yaitu melalui peningkatan status gizi balita, penurunan angka kematian ibu dan bayi, memberantas penyakit menular dan tidak menular.

Untuk mematahkan isu-isu strategis dilakukan melalui analisa SWOT, sebagai berikut :

A. Kekuatan

Kekuatan adalah kemampuan, kesanggupan dan daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang memungkinkan untuk dikembangkan, digali, dan dijadikan sebagai sarana untuk membangun. Adapun yang termasuk sebagai kekuatan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah menetapkan kesehatan sebagai prioritas pembangunan;
2. Adanya peraturan daerah yang mengatur retribusi pelayanan kesehatan;
3. Tersedianya dukungan anggaran kesehatan dari berbagai sumber;
4. Memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang lama.

B. Kelemahan :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai.
2. Profesionalisme tenaga kesehatan dan kemampuan petugas dalam menjalankan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan dari aspek mutu masih perlu ditingkatkan;
3. Kualitas Pelayanan kesehatan yang belum optimal;
4. Sistem informasi kesehatan yang belum optimal;
5. Kesejahteraan sumber daya manusia masih kurang.

C. Peluang

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal didapat yang termasuk peluang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan formal dalam lembaga pendidikan kesehatan maupun pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
2. Pertambahan jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan berupa gedung/bangunan, alat-alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.

3. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan pembangunan kesehatan
4. Kemudahan akses komunikasi, informasi dan teknologi
5. Dukungan dan Peran serta masyarakat dalam implementasi program kesehatan cukup baik

D. Ancaman :

1. Anggaran yang cenderung meningkat dari berbagai sumber dana bila tidak diikuti dengan perencanaan program yang memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan menjadi tidak efektif dan efisien.
2. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan formal dalam berbagai lembaga pendidikan kesehatan maupun pelatihan yang diadakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kesehatan harus diikuti dengan follow up dan monitoring serta evaluasi pasca pelatihan.
3. Pertambahan jumlah sarana penunjang pelayanan kesehatan baik gedung/ bangunan, alat-alat kesehatan dan perbekalan semakin meningkat harus dikelola dengan baik, terpelihara dan dievaluasi pemanfaatannya.
4. Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi secara baik dan data yang ada masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

2.4.1.1. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinkes

Berdasarkan analisis keadaan eksternal Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta akan dapat diidentifikasi faktor eksternal yaitu peluang dan tantangan yang mempengaruhi strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Faktor eksternal pada dasarnya adalah merupakan faktor yang ada di sekeliling Dinas Kesehatan Kota yogyakarta, yang dapat terdiri atas kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, lingkungan fisik, lingkungan hidup, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, demografi, stakeholders yang sangat dipengaruhi oleh Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Komparasi capaian sasaran indikator kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan capaian indikator Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi DIY dapat dilihat pada tabel 2.1 diatas.

Arah pembangunan kesehatan nasional pada periode 2025–2029 mengacu pada visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam 8 misi Asta Cita. Salah satu misi yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor kesehatan adalah Misi ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan penguatan sistem kesehatan nasional. Misi ini menempatkan kesehatan sebagai pilar utama dalam membentuk SDM yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing. Pemerintah menetapkan 17 program prioritas nasional, dengan salah satu program yang selaras dengan kesehatan yaitu program ke-7, menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. Dalam program hasil terbaik cepat (*Quick Win*), menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam 5 tahun, dan membangun RS lengkap berkualitas.

2.4.1.2. Analisis Keselarasan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagai dinas daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di bawah koordinasi dan pengawasan Kementerian Kesehatan dalam konteks pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terkait

urusan tersebut. Oleh karenanya, perlu adanya keselarasan Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan indikator yang diamanatkan oleh Kementrian Kesehatan yang termasuk dalam indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 16 Keselarasan Indikator RIBK dengan Indikator Renstra Dinas Kesehatan 2025-2020

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kab/Kota (RIBK)		Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2025-2029
Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	1	Jumlah kematian ibu	Indikator Sasaran Dinkes Kota Yogyakarta
	2	Prevalensi stunting	Indikator Tujuan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
	3	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Indikator Kegiatan Dinkes Kota Yogyakarta
	4	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Indikator Kegiatan Dinkes Kota Yogyakarta
	5	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Indikator Kegiatan Dinkes Kota Yogyakarta
	6	Angka keberhasilan pengobatan TB	Indikator Kegiatan Dinkes Kota Yogyakarta
	7	Persentase hipertensi dalam pengendalian	Indikator Kegiatan Dinkes Kota Yogyakarta

Program	Outcome	Indikator Kinerja Kab/Kota (RIBK)	Penyelarasan Renstra Dinkes Kota Yogyakarta
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi depresi pada usia >= 15 tahun	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan
		Prevalensi obesitas > 18 tahun	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Indikator Kegiatan Renstra Dinkes
		Tingkat kepuasan pasien terhadap	Indikator Kegiatan Renstra Dinkes

Program	Outcome	Indikator Kinerja Kab/Kota (RIBK)	Penyelarasan Renstra Dinkes Kota Yogyakarta
		layanan kesehatan	
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Indikator Kegiatan Renstra Dinkes (Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan)
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Indikator Kegiatan Renstra Dinkes (Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN)
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	diselaraskan di Indikator Program Dinkes
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	diselaraskan di Indikator Program Dinkes
		Persentase lanjut usia yang mandiri	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan
		Cakupan penemuan kasus TB	Indikator Kegiatan Dinkes (Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan
Peningkatan Efektivitas Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Pemerintah Daerah	Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen)
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	masuk di Indikator kegiatan Renstra (Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman pada Produk IRTP)

Program	Outcome	Indikator Kinerja Kab/Kota (RIBK)	Penyelarasan Renstra Dinkes Kota Yogyakarta
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	masuk di Indikator kegiatan Renstra (Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman pada Produk IRTP)
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah diverifikasi dalam proses Sertifikasi Standar Sektor Kesehatan)
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	diselaraskan di Renstra sebagai indikator Kegiatan

2.4.1.3 Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan pedoman bahwa pembangunan daerah harus mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup, sehingga terwujud keselarasan antara pemanfaatan sumber daya dengan penggunaannya. Undang-undang tersebut juga mengharuskan kajian mengenai daya dukung dan daya tampung wilayah untuk memastikan keberhasilan pembangunan berkelanjutan dari perspektif lingkungan hidup di setiap daerah perencanaan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari fase perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki tujuan mendasar untuk memastikan bahwa dimensi lingkungan dan prinsip keberlanjutan menjadi pertimbangan sentral dalam proses perencanaan pembangunan daerah. digunakan untuk memberikan masukan terhadap RPJMD Kota Yogyakarta agar pembangunan yang akan dilaksanakan lebih memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 telah memperhatikan kesesuaian kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD , utamanya dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan agar dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan demi meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta.

Mengacu hasil 7 isu KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, dinkes mendukung 5 isu:

a. Pengelolaan persampahan yang belum optimal
b. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah
c. Kurangnya ruang terbuka hijau publik
d. Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi
e. Kawasan dan permukiman kumuh belum seluruhnya teratasi

Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kota Yogyakarta
2. Peningkatan kualitas gizi masyarakat
3. Pencegahan stunting
4. Peningkatan kesehatan melalui GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
5. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular

2.4.2 Permasalahan dan Isu Strategis RSUD Kota Yogyakarta

Untuk memahami secara lebih lanjut mengenai tantangan yang dihadapi RSUD Kota Yogyakarta, diperlukan identifikasi dan pemetaan terhadap berbagai permasalahan dan isu strategis yang relevan. Permasalahan dan isu-isu tersebut tidak hanya berdampak secara lokal, namun juga berkaitan erat dengan dinamika nasional maupun global. Berikut kami sampaikan data tabel keterkaitan antara permasalahan umum, isu yang menjadi perhatian perangkat daerah, serta bagaimana isu tersebut mencerminkan konteks nasional, regional, dan global yang kemudian dirumuskan menjadi isu strategis daerah:

Tabel 2. 17 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis RSUD Kota Yogyakarta

Potensi yang menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Kesehatan dimana RSUD Tergabung dalam Jejaring Pengampuan 11 Layanan Prioritas	1. Sarana, prasarana serta alat kesehatan yang belum memadai dan sesuai standar 2. Pengembangan potensi pelayanan penunjang di RSUD belum optimal 3. Pengembangan pelayanan rumah sakit yang fokus pada keselamatan pasien, masih belum optimal	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjuta (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Pengelolaan Layanan Infrastruktur Perkotaan Berkualitas untuk Mewujudkan Ruang Kota yang Berkelanjutan	1. Sarana, prasarana serta alat kesehatan yang belum memadai dan sesuai standar 2. Pengembangan potensi pelayanan penunjang di RSUD belum optimal 3. Pengembangan pelayanan Rumah Sakit yang fokus pada keselamatan pasien, masih belum optimal 4. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pelayanan sesuai dengan Master Plan 5. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional terutama pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) 6. Penguatan pelayanan kesehatan, ibu, anak, dan lanjut usia 7. Belum cukupnya penerimaan BLUD mengcover seluruh biaya operasional Rumah Sakit 8. Keberadaannya dalam persaingan industri kesehatan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya.
RSUD sebagai	Akses pelayanan	Kerentanan	Komitmen	Ketimpangan	Pengelolaan	1. Optimalisasi Akses

Potensi yang menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
UOBK	rumah sakit belum optimal	dan kesenjangan sosial dan ekonomi	Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjuta (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan	Layanan Infrastruktur Perkotaan Berkualitas untuk Mewujudkan Ruang Kota yang Berkelanjutan	Pelayanan Rumah Sakit 2. Pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Percepatan dan Inovasi Dalam Efektivitas Pelayanan Publik.
RSUD Sebagai RS Type Pendidikan	Pengembangan layanan sesuai dengan wahana pendidikan berkompeten yang belum optimal	-	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjuta (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pengembangan Layanan Sesuai Dengan Visi Wahana Pendidikan Berkompeten

2.4.3 Permasalahan dan Isu Strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Yogyakarta menjadi tantangan yang memerlukan sinergi antara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan milik Pemerintah Kota, Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta berperan untuk mengobati kasus rujukan seperti tuberkulosis, stunting dengan komplikasi, kematian ibu–bayi, dan penyakit tidak menular tertentu. Permasalahan dan isu strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 18 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta
			Global	Nasional	Regional	
Akses layanan kesehatan yang komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan berbasis masyarakat	Belum optimalnya peran Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sebagai bagian dari sistem layanan rujukan	Kerentanan dan kesenjangan sosial dan ekonomi	SDGs 3: kehidupan yang sehat dan sejahtera	Arah kebijakan dalam RPJMN yang menyebutkan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola (integrasi pelayanan kesehatan primer)		Penyediaan layanan rujukan yang terintegrasi dengan faskes tingkat pertama
Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat	Terbatasnya peran Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dalam mendukung program pencegahan dan penanganan stunting	1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal 2. Kurangnya ruang terbuka hijau publik 3. Kawasan dan pemukiman kumuh belum seluruhnya teratasi	SDGs zero hunger	Target stunting nasional 18 %	RPJMD Pemda DIY th. 2022-2027: Prevalensi Berat Badan Kurang danSangat Kurang Pada Balita Isu Strategis Renstra Dinkes DIY : Permasalahan kesehatan ibu – anak dan gizi termasuk stunting	Pemantapan peran Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sebagai fasilitas kesehatan rujukan dalam penanganan bayi stunting dengan pemberian terapi dan obat sesuai kebutuhan medis
Pengendalian Penyakit dan pembudayaan hidup sehat	Belum maksimalnya peran Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan pengendalian	Pengelolaan persampahan yang belum optimal Penurunan kualitas dan kuantitas air	SDGs 3: kehidupan yang sehat dan sejahtera	Arah kebijakan dalam RPJMN yang menyebutkan pengendalian penyakit dan pembudayaa	Renstra Dinas Kesehatan DIY Tahun 2022-2027 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Optimalisasi fungsi RS Pratama dalam mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta
			Global	Nasional	Regional	
	penyakit menular dan tidak menular	tanah Kurangnya ruang terbuka hijau		n hidup sehat	Penyakit Menular dan Tidak Menular (Multiple burden disease dari penyakit tidak menular degeneratif, penyakit menular infeksi dan infeksi baru (re-emerging and new emerging disease) serta potensi kejadian luar biasa/ wabah)	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada Periode Tahun 2025-2029 akan tergambar pada bab ini. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk melakukan evaluasi.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Visi pembangunan daerah merupakan pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dalam lima tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan sejalan dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan mendasarkan pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 untuk periode Renstra tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.**

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah, yang berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan kebijakan pembangunan. Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 dirumuskan melalui proses yang sistematis, dengan mempertimbangkan keselarasan antara perencanaan jangka panjang dan janji politik kepala daerah terpilih. Dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sejalan dengan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan mendasarkan pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 untuk periode Renstra tahun 2025-2029 dan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mendukung Misi yang ke-1 yaitu "**Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan**". Serta Misi 4 yang tercantum pada RPJMD 2025-2029 yaitu: “**Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945**”.

Stunting (kerdil) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Faktor lingkungan berperan menyebabkan stunting pada anak, antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi asupan total asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi di awal kehidupan anak. Selain faktor lingkungan, stunting juga disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal, namun sebagian besar disebabkan karena malnutrisi. Untuk indikator ini merupakan indikator upaya menekan angka kejadian, jadi semakin rendah kejadian prevalensi stunting maka penilaian kinerjanya akan semakin baik.

Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun adalah peluang seorang bayi yang lahir hidup akan tetap bertahan hidup sampai mencapai ulang tahunnya yang ke-5. Dalam bidang

kesehatan masyarakat dan demografi, indikator ini erat kaitannya dengan angka kematian balita. Kematian balita dipengaruhi oleh gizi, imunisasi, sanitasi, akses pelayanan kesehatan, dan status sosial ekonomi.

- Jika angka kematian balita tinggi, maka probabilitas hidup hingga usia 5 tahun akan rendah.
- Sebaliknya, jika angka kematian balita rendah, maka probabilitas hidup hingga usia 5 tahun mendekati 100%.

Dalam mendukung pencapaian indikator prevalensi stunting dan probabilitas hidup hingga usia 5 tahun, maka Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menetapkan indikator Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat sebagai tujuan OPD.

Tujuan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang menggambarkan tataran yang lebih implementatif untuk dilakukan intervensi. Sasaran yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator sasaran Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC)

Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Jumlah Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Kematian ibu dipengaruhi dari berbagai faktor, baik faktor dalam sistem pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan.

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Universal Health Coverage atau Cakupan Kesehatan Semesta adalah kondisi ketika seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) tanpa kesulitan finansial. Capaian minimal UHC biasanya dipakai sebagai ambang batas untuk menilai apakah suatu wilayah sudah dianggap mencapai cakupan kesehatan. Batas minimal yang diakui adalah 98% penduduk terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Angka ini mengacu pada kebijakan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan bahwa suatu daerah bisa dikatakan mencapai UHC apabila ≥98% penduduknya terlindungi dalam program JKN.

Akreditasi Rumah Sakit dipilih sebagai salah satu indikator sasaran karena merupakan salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien sehingga tercapai tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, serta sebagai pelaksanaan program pembangunan kesehatan nasional.

Kemudian Reformasi Birokrasi merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk peningkatan mutu dan kualitas Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta sebagai unit organisasi pelayanan publik dalam bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam pencapaian Visi, telah disusun Misi ini mendukung konstruksi pencapaian Visi pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Secara ringkas, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kota Yogyakarta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan											
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Prevalensi Balita Stunting (Persentase)	10,07	10,06	10,05	10,04	10,03	10,02	10,02	
			Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun (Indeks)	0,987	0,976	0,977	0,977	0,978	0,979	0,981	
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (Angka)	93,11	93,1	93,09	93,08	93,07	93,06	93,06	
			Angka Kematian Bayi (Angka)	9,78	9,76	9,74	9,72	9,7	9,68	9,66	
			Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC) (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pratama	Nilai Akreditasi Rumah Sakit Pratama (Predikat)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta	Akreditasi Paripurna Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta (Predikat)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan		Terwujudnya tata kelola Dinas Kesehatan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan (Predikat)	AA (90,375)	A (86,25-89,25)	A (86,50-89,50)	A (86,75-89,75)	A (87,00-90,00)	A (87,25-90,00)	A (87,25-90,00)	
		Terwujudnya tata kelola RSUD Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)	A (87,59)	A (86,25-89,25)	A (86,50-89,50)	A (86,75-89,75)	A (87,00-90,00)	A (87,25-90,25)	A (87,25-90,25)	

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Upaya mewujudkan Misi yang ke-1 yang tercantum pada RPJMD 2025-2029 yaitu "**Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan**" serta Misi 4 yaitu: "**Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945**", memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Sesuai dengan siklus perencanaan dalam RPJMD 2025-2029, Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari tahap pertama dalam implementasi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Selaras dengan RPJMD 2025-2029, Renstra Dinas Kesehatan memiliki peran strategis sebagai tahapan awal dalam periodisasi pembangunan jangka panjang 2025-2045. Periode ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Tahapan pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 menjadi dasar dalam penahapan pembangunan dalan Renstra Dinas Kesehatan pada periode 2025-2029 dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta.

Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi.

Prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Kesehatan, RSUD dan RS Pratama selaras dengan penahapan pembangunan dalam RPJMD Kota Yogyakarta dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2025-2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar dan Kapasita Pembangunan Bidang Kesehatan	Peningkatan Akses Kesehatan dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas Bidang Kesehatan	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan Bidang Kesehatan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan Bidang Kesehatan.

Rangkaian pembangunan lima tahun ini menunjukkan strategi bertahap yang bersifat progresif dan saling melengkapi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Tahap I (2025-2026) berperan sebagai fondasi, di mana fokus diarahkan pada penguatan dasar dan kapasitas pembangunan di bidang kesehatan. Langkah ini penting untuk memastikan adanya infrastruktur, SDM, dan sistem yang memadai sebelum melangkah lebih jauh.

Memasuki Tahap II (2027), strategi bergeser ke peningkatan akses layanan kesehatan dan kualitas layanan publik. Perubahan fokus ini menandakan adanya transisi dari tahap pembentukan kapasitas menuju perluasan jangkauan dan perbaikan mutu layanan, sehingga dampak positif mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Tahap III (2028) menandai fase akselerasi, dengan penekanan pada percepatan pembangunan sektor kesehatan yang menjadi prioritas. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahap ini, fondasi yang telah dibangun sebelumnya dinilai cukup kuat untuk mendukung percepatan program yang lebih baik.

Pada Tahap IV (2029), pembangunan mulai diarahkan untuk terintegrasi dan berkelanjutan. Ini mencerminkan upaya untuk menghubungkan lintas sektor dan lintas program agar sinergis, sekaligus memastikan keberlangsungan hasil yang telah dicapai.

Pada akhir Tahap V (2030) difokuskan pada penyelesaian dan konsolidasi kesinambungan pembangunan. Tahap ini menunjukkan orientasi jangka panjang, memastikan bahwa capaian pembangunan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga berlanjut dan terpelihara di tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, setiap tahap dirancang untuk meminimalkan risiko kegagalan dan memaksimalkan efektivitas pencapaian target pembangunan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan Dinas Kesehatan menekankan pada isu-isu strategis pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan kesehatan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Dinas Kesehatan	Keterangan
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**Dinas Kesehatan**		
		1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	
		2. Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat dan siklus hidup termasuk aktivitas fisik/olahraga	Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan yang berkualitas	
		3. Mempercepat penurunan dan pencegahan stunting melalui peningkatan kualitas gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	Mempercepat penurunan dan pencegahan stunting	
		4. Pemerataan akses penjaminan dan pembiayaan kesehatan	Pemerataan akses penjaminan dan pembiayaan kesehatan	
		5. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		6. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	

		7. Meningkatkan kualitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar	Meningkatkan kualitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar	
		8. Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	
		9. Meningkatkan sertifikasi bidang kesehatan	Meningkatkan cakupan Rekomendasi sertifikasi bidang kesehatan	
		10. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas	
		11. Mengimplementasikan transformasi teknologi kesehatan	Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan kesehatan	
		12. Mengimplementasikan transformasi sistem ketahanan kesehatan	Memanfaatkan produk dalam negeri dengan quality insurance, resilience health system, desain ketahanan SDMK dan tenaga cadangan.	
		RSUD Kota Yogyakarta		
		Peningkatan mutu pelayanan RSUD Kota Yogyakarta, melalui: 1. Meningkatkan mutu tata kelola administrasi dan keuangan RSUD Kota Yogyakarta 2. Meningkatkan mutu pelayanan medis, pelayanan penunjang dan asuhan keperawatan RSUD Kota Yogyakarta	1. Pengadaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan RS sesuai standar 2. Pengembangan pelayanan pada Jejaring Pengampuan 11 Pelayanan Prioritas (KJSU-KIA-TB dll) 3. Pengembangan Layanan Home Care Rumah Sakit 4. Penambahan layanan vaksin internasional 5. Peningkatan Kompetensi SDM Medis dan	

			Kesehatan pada Pengampuan 10 Pelayanan Prioritas (KJSU-KIA-TB dll 6. Pemenuhan tenaga Medis dan Kesehatan 7. Peningkatan promosi layanan Kesehatan Ibu dan Anak	
		Peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Peningkatan Tata Kelola Aset dan Barang Persediaan dengan Mengoptimalkan Teknologi Informasi	
		Peningkatan efektivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Peningkatan Tata Laksana dan Sistem Manajemen Rumah Sakit untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima	
		Peningkatan kualitas pengelolaan arsip	Peningkatan Pengelolaan Arsip	
		Rumah Sakit Pratama		
		Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Layanan Penunjang dan Kefarmasian di Rumah Sakit	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	
			Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta menyusun rencana program dan kegiatan. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program-program yang dijalankan dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan antara lain :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat				Prevalensi Balita Stunting (Persentase)		
					Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun (Indeks)		
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan			Angka Kematian Ibu (Angka)		
					Angka Kematian Bayi (Angka)		
					Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC) (Persentase)		
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan		Persentase ketersediaan obat indikator (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat		Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		Presentase Posyandu ILP aktif (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya Pengelolaan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Pengawasan Produk Makanan Minuman yang beredar di masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kesesuaian obat yang tersedia di Puskesmas dengan formularium nasional		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase Alat Kesehatan di Puskesmas yang Terpelihara Sesuai Standar		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta		
					Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas		
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya Pengelolaan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Pengawasan Produk Makanan Minuman yang beredar di masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap		
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kerja, dan Olahraga yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas		
					Persentase Capaian Kelompok Sasaran mengikuti Pengukuran Kebugaran		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Calon Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan		
					Persentase Capaian Minimal Peserta Aktif Jaminan Kesehatan Nasional		
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kerja, dan Olahraga yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan		
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
					Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage		
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)		
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kerja, dan Olahraga yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kerja, dan Olahraga yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
					Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
					Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali		
					Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
					Prevalensi depresi pada usia >= 15 tahun		
					Prevalensi obesitas > 18 tahun		
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan		
					Persentase lanjut usia yang mandiri		
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar		
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
				Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan bagi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase merokok penduduk 10-21 tahun		
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Surveilans Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas		
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Surveilans Penyakit	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Surveilans Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Meningkatnya Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang berkualitas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
			Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN		
					Nilai Tingkat Kematangan Statistik Sektoral		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang berkualitas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Kepatuhan FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKTL (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta yang patuh melaporkan Indikator Nasional Mutu (INM)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standarisasi ASPAK		
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
				Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang berkualitas	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan		Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi (Persentase)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Meningkatnya cakupan Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Persentase Tenaga Kesehatan yang Memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) atau Rekomendasi SIP		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Persentase ketepatan penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT		
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
					Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi		
					Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar		
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya cakupan Rekomendasi sertifikasi bidang kesehatan		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar (Persentase)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Meningkatnya Pengawasan Usaha Bidang Kesehatan dan P-IRT yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)		
					Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah diverifikasi dalam proses Sertifikasi Standar Sektor Kesehatan		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Meningkatnya Pengawasan Usaha Bidang Kesehatan dan P-IRT yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Meningkatnya Pengawasan Usaha Bidang Kesehatan dan P-IRT yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
					Persentase sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang memperoleh rekomendasi sertifikat Laik Sehat		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Meningkatnya Pengawasan Produk Makanan Minuman yang beredar di masyarakat	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
					Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman pada Produk IRTP		
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daera		
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan yang berkualitas		Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif		
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif		
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT PSC 119 YES)		Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT Laboratorium Kesehatan)		Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Kualitas Layanan di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase pendapatan Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta		
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT PSC 119 YES)	Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT Laboratorium Kesehatan)	Meningkatnya Kualitas Layanan di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT PSC 119 YES)	Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan di Laboratorium	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			(UPT Laboratorium Kesehatan)	Kesehatan Kota Yogyakarta			
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT PSC 119 YES)	Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
		Terwujudnya tata kelola Dinas Kesehatan yang baik dan adaptif			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas layanan Dinas Kesehatan		IKM Dinas Kesehatan (Persentase)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Dinas Kesehatan (Poin)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dinas Kesehatan		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan		
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kesehatan		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Kesehatan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Layanan di Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas		
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah (RSUD Kota Yogyakarta) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**				**Prevalensi Balita Stunting (Persentase)**		
					Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun (Indeks)		
		Terwujudnya tata kelola RSUD Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif			**Nilai Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)**		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Yogyakarta		**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)**	**1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
					Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)	**1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran (Persentase)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta			Akreditasi Paripurna Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta		
			Meningkatnya Mutu Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang dan Asuhan Keperawatan RSUD Kota Yogyakarta		Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya kinerja pelayanan medis	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (unit)		
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (paket)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
				Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Meningkatnya mutu pelayanan keperawatan, sumber daya keperawatan dan keselamatan pasien	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
				Meningkatnya kinerja pelayanan sistem informasi kesehatan RS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	

Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah (Rumah Sakit Pratama) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPT RS Pratama							
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat				Prevalensi Balita Stunting (Persentase)		
					Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun (Indeks)		
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pratama			Nilai Akreditasi Rumah Sakit Pratama (Predikat)		
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit Pratama		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama (Persentase)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja RS Pratama Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai RS Pratama	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD RS Pratama	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pratama		Persentase tercapainya indikator SPM layanan Rumah Sakit (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian Sesuai Standar di RS Pratama	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	

Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				417.456.502.633		426.423.625.241		437.247.050.219		449.133.893.267		464.599.998.415		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				326.934.723.719		333.584.359.340		342.051.351.021		351.350.237.593		363.449.123.471		
Meningkatnya kualitas layanan Dinas Kesehatan	IKM Dinas Kesehatan (Persentase)	84,14	85	172.048.592.169	85	170.690.135.765	85	175.471.805.363	85	180.869.271.753	85	188.890.338.050		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan (Nilai)	A	A		A		A		A		A			
	Nilai SPIP Dinas Kesehatan (Poin)	4,424	3,25		3,5		3,75		4		4			
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				141.197.400		144.067.242		147.721.693		151.734.539		156.957.067		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	132.232.400	1	134.921.918	1	138.346.489	1	142.107.527	1	147.001.056		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	3		3		3		3		3			
	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan	100	100		100		100		100		100			
	Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dinas Kesehatan	100	100		100		100		100		100			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.220.000		2.265.153		2.322.647		2.385.790		2.467.945		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	3	2.220.000	3	2.265.153	3	2.322.647	3	2.385.790	3	2.467.945		
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				935.000		954.017		978.232		1.004.826		1.039.427		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	935.000	1	954.017	1	978.232	1	1.004.826	1	1.039.427		
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				935.000		954.017		978.232		1.004.826		1.039.427		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	935.000	1	954.017	1	978.232	1	1.004.826	1	1.039.427		
1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.940.000		1.979.458		2.029.701		2.084.879		2.156.673		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.940.000	1	1.979.458	1	2.029.701	1	2.084.879	1	2.156.673		
1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.940.000		1.979.458		2.029.701		2.084.879		2.156.673		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.940.000	1	1.979.458	1	2.029.701	1	2.084.879	1	2.156.673		
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				120.617.400		123.070.678		126.194.441		129.625.118		134.088.811		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	120.617.400	12	123.070.678	12	126.194.441	12	129.625.118	12	134.088.811		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.645.000		3.719.137		3.813.535		3.917.209		4.052.100		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	3.645.000	1	3.719.137	1	3.813.535	1	3.917.209	1	4.052.100		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				140.382.893.000		138.380.376.387		142.341.962.723		146.838.772.342		153.687.983.239		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.366	1.283	140.372.608.000	1.283	138.369.883.063	1.283	142.331.204.519	1.283	146.827.722.330	1.283	153.676.554.228		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan	5	5		5		5		5		5			
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				140.150.976.000		138.143.743.215		142.099.324.820		146.589.538.832		153.430.168.786		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.366	1.283	140.150.976.000	1.283	138.143.743.215	1.283	142.099.324.820	1.283	146.589.538.832	1.283	153.430.168.786		
1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				118.314.000		120.720.428		123.784.537		127.149.700		131.528.151		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	118.314.000	12	120.720.428	12	123.784.537	12	127.149.700	12	131.528.151		
1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2.310.000		2.356.984		2.416.809		2.482.511		2.567.997		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4	2.310.000	4	2.356.984	4	2.416.809	4	2.482.511	4	2.567.997		
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				58.766.000		59.961.262		61.483.190		63.154.650		65.329.406		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	58.766.000	1	59.961.262	1	61.483.190	1	63.154.650	1	65.329.406		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				660.000		673.424		690.517		709.289		733.714		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	660.000	1	673.424	1	690.517	1	709.289	1	733.714		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				40.812.000		41.642.089		42.699.043		43.859.844		45.370.175		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	11	11	40.812.000	11	41.642.089	11	42.699.043	11	43.859.844	11	45.370.175		
1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				770.000		785.661		805.603		827.504		855.999		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	770.000	1	785.661	1	805.603	1	827.504	1	855.999		
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.840.000		16.162.176		16.572.401		17.022.932		17.609.124		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	15.840.000	4	16.162.176	4	16.572.401	4	17.022.932	4	17.609.124		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan	5	5		5		5		5		5			
1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.320.000		1.346.848		1.381.033		1.418.578		1.467.427		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	1.320.000	2	1.346.848	2	1.381.033	2	1.418.578	2	1.467.427		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.540.000		1.571.323		1.611.206		1.655.007		1.711.998		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2	1.540.000	2	1.571.323	2	1.611.206	2	1.655.007	2	1.711.998		
1.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.100.000		12.346.106		12.659.473		13.003.629		13.451.414		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	11	11	12.100.000	11	12.346.106	11	12.659.473	11	13.003.629	11	13.451.414		
1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				880.000		897.899		920.689		945.718		978.285		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	880.000	4	897.899	4	920.689	4	945.718	4	978.285		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11.088.000		11.312.940		11.599.227		11.914.063		12.324.039		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	6	3.300.000	6	3.367.120	6	3.452.584	6	3.546.444	6	3.668.568		
	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	4,178	4,378		4,478		4,578		4,678		4,778			
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3.300.000		3.367.120		3.452.584		3.546.444		3.668.568		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	6	3.300.000	6	3.367.120	6	3.452.584	6	3.546.444	6	3.668.568		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				924.338.500		943.137.924		967.075.690		993.365.625		1.027.571.468		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	12	766.417.500	12	782.005.924	12	801.854.690	12	823.653.625	12	852.016.468		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	459	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kesehatan	90,67	90,77		90,82		90,87		90,92		90,97			
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.316.800		17.669.012		18.117.485		18.610.020		19.250.864		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	17.316.800	1	17.669.012	1	18.117.485	1	18.610.020	1	19.250.864		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				96.131.600		98.086.853		100.576.480		103.310.716		106.868.262		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	96.131.600	3	98.086.853	3	100.576.480	3	103.310.716	3	106.868.262		
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				90.112.200		91.945.022		94.278.758		96.841.787		100.176.573		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2	90.112.200	2	91.945.022	2	94.278.758	2	96.841.787	2	100.176.573		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				99.999.900		102.033.832		104.623.640		107.467.901		111.168.601		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	12	99.999.900	12	102.033.832	12	104.623.640	12	107.467.901	12	111.168.601		
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.616.000		5.730.226		5.875.670		6.035.403		6.243.235		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	12	5.616.000	12	5.730.226	12	5.875.670	12	6.035.403	12	6.243.235		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				457.241.000		466.540.979		478.382.657		491.387.798		508.308.933		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	459	12	457.241.000	12	466.540.979	12	478.382.657	12	491.387.798	12	508.308.933		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89.542.000		91.362.765		93.681.435		96.228.336		99.541.773		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	69	6	5.200.000	6	5.305.765	6	5.440.435	6	5.588.336	6	5.780.773		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan	5	5		5		5		5		5			
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.200.000		5.305.765		5.440.435		5.588.336		5.780.773		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	69	6	5.200.000	6	5.305.765	6	5.440.435	6	5.588.336	6	5.780.773		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14.910.464.649		15.213.740.382		15.599.862.905		16.024.017.199		16.575.876.274		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	894.538.649	12	912.732.973	12	935.899.833	12	961.342.873	12	994.447.100		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Kesehatan	100	100		100		100		100		100			
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.488.000		5.599.622		5.741.751		5.897.844		6.100.939		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	12	5.488.000	12	5.599.622	12	5.741.751	12	5.897.844	12	6.100.939		
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				42.390.000		43.252.185		44.350.005		45.555.689		47.124.417		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	42.390.000	12	43.252.185	12	44.350.005	12	45.555.689	12	47.124.417		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				846.660.649		863.881.166		885.808.077		909.889.340		941.221.744		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	846.660.649	12	863.881.166	12	885.808.077	12	909.889.340	12	941.221.744		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.567.067.170		1.598.938.253		1.639.517.711		1.684.089.162		1.742.081.660		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	6	767.622.620	6	783.235.555	6	803.115.531	6	824.948.744	6	853.356.184		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	56		56		56		56		56			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	57	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	49	6		6		6		6		6			
	Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan	5	5		5		5		5		5			
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				56.418.000		57.565.505		59.026.624		60.631.301		62.719.164		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	57	1	56.418.000	1	57.565.505	1	59.026.624	1	60.631.301	1	62.719.164		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				348.514.600		355.603.156		364.629.026		374.541.701		387.439.194		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	56	348.514.600	56	355.603.156	56	364.629.026	56	374.541.701	56	387.439.194		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.000.000		34.691.537		35.572.073		36.539.123		37.797.362		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	49	6	34.000.000	6	34.691.537	6	35.572.073	6	36.539.123	6	37.797.362		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				146.992.020		149.981.740		153.788.556		157.969.397		163.409.136		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	146.992.020	6	149.981.740	6	153.788.556	6	157.969.397	6	163.409.136		
1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				181.698.000		185.393.617		190.099.252		195.267.222		201.991.328		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	6	181.698.000	6	185.393.617	6	190.099.252	6	195.267.222	6	201.991.328		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				168.892.293.000		177.185.261.271		181.233.357.236		185.533.093.395		190.129.178.827		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Layanan di Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	18	18	29.090.833.000	18	29.682.521.271	18	30.435.918.881	18	31.263.338.942	18	32.339.904.549		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas	80	81		82		83		84		85			
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				29.090.833.000		29.682.521.271		30.435.918.881		31.263.338.942		32.339.904.549		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	18	18	29.090.833.000	18	29.682.521.271	18	30.435.918.881	18	31.263.338.942	18	32.339.904.549		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				89.030.492.914		90.841.314.140		93.147.035.704		95.679.297.943		98.974.052.812		
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan	Persentase ketersediaan obat indikator (Persentase)	95	95,5	10.732.724.944	96	13.666.358.709	96,5	14.013.236.317	97	14.394.195.174	97,5	14.889.865.053	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				34.085.453.558		37.494.078.493		38.445.696.595		39.490.966.495		40.850.961.209		
Meningkatnya Pengelolaan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Pengawasan Produk Makanan Minuman yang beredar di masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	18	18	10.722.724.944	18	13.656.155.316	18	14.002.773.943	18	14.383.448.373	18	14.878.748.182		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Persentase kesesuaian obat yang tersedia di Puskesmas dengan formularium nasional	95	95		95		96		96		96			
	Persentase Alat Kesehatan di Puskesmas yang Terpelihara Sesuai Standar	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				52.422.000		53.488.229		54.845.860		56.336.880		58.276.863		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	18	18	52.422.000	18	53.488.229	18	54.845.860	18	56.336.880	18	58.276.863		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				295.690.000		3.017.041.389		3.093.619.512		3.177.721.551		3.287.147.666		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	18	18	295.690.000	18	3.017.041.389	18	3.093.619.512	18	3.177.721.551	18	3.287.147.666		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				10.374.612.944		10.585.625.698		10.854.308.571		11.149.389.942		11.533.323.653		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12	12	10.374.612.944	12	10.585.625.698	12	10.854.308.571	12	11.149.389.942	12	11.533.323.653		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)	100	100	42.336.187.907	100	40.958.263.777	100	41.997.915.388	100	43.139.556.941	100	44.627.676.459		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	72,88	73,33		75		78,33		80		80			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				34.085.453.558		37.494.078.493		38.445.696.595		39.490.966.495		40.850.961.209		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	18	18	113.424.000	18	115.730.969	18	118.668.436	18	121.894.514	18	126.092.001		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta	84.33	81		82		83		84		85			
	Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas	35.00	37.00		38.00		39.00		40.00		40.00			
	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				113.424.000		115.730.969		118.668.436		121.894.514		126.092.001		
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	18	18	113.424.000	18	115.730.969	18	118.668.436	18	121.894.514	18	126.092.001		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				54.578.865.736		52.973.614.469		54.318.235.857		55.794.812.567		57.716.021.094		
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12	34.293.239.999	12	32.751.727.637	12	33.583.082.093	12	34.495.960.982	12	35.686.434.809		
	Persentase Capaian Minimal Peserta Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				34.293.239.999		32.751.727.637		33.583.082.093		34.495.960.982		35.686.434.809		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12	34.293.239.999	12	32.751.727.637	12	33.583.082.093	12	34.495.960.982	12	35.686.434.809		
Meningkatnya Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang berkualitas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	12	7.540.944.908	12	7.694.322.732	12	7.889.618.957	12	8.104.103.331	12	8.383.171.377		
	Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas	91	91		91		91		91		100			
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				7.540.944.908		7.694.322.732		7.889.618.957		8.104.103.331		8.383.171.377		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12	12	7.540.944.908	12	7.694.322.732	12	7.889.618.957	12	8.104.103.331	12	8.383.171.377		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	40.400.000	1	41.221.709	1	42.267.993	1	43.417.076	1	44.912.160		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta	84,33	81		82		83		84		85			
	Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas	35,00	37,00		38,00		39,00		40,00		40,00			
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				40.400.000		41.221.709		42.267.993		43.417.076		44.912.160		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	40.400.000	1	41.221.709	1	42.267.993	1	43.417.076	1	44.912.160		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	12	12	243.275.000	12	248.223.052	12	254.523.415	12	261.442.798	12	270.445.686		
	Persentase Calon Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				243.275.000		248.223.052		254.523.415		261.442.798		270.445.686		
Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	12	12	243.275.000	12	248.223.052	12	254.523.415	12	261.442.798	12	270.445.686		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				114.904.000		117.241.071		120.216.868		123.485.041		127.737.297		
Meningkatnya Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang berkualitas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	34	36	44.904.000	36	45.817.318	36	46.980.247	36	48.257.435	36	49.919.199		
	Persentase Kepatuhan FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKTL (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta yang patuh melaporkan Indikator Nasional Mutu (INM)	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				10.000.000		10.203.393		10.462.374		10.746.801		11.116.871		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	50	25	10.000.000	35	10.203.393	45	10.462.374	30	10.746.801	30	11.116.871		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				44.904.000		45.817.318		46.980.247		48.257.435		49.919.199		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	34	36	44.904.000	36	45.817.318	36	46.980.247	36	48.257.435	36	49.919.199		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang berkualitas	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	-	18	60.000.000	18	61.220.360	18	62.774.247	18	64.480.805	18	66.701.227		
	Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standarisasi ASPAK	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000		61.220.360		62.774.247		64.480.805		66.701.227		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	-	18	60.000.000	18	61.220.360	18	62.774.247	18	64.480.805	18	66.701.227		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT Laboratorium Kesehatan)	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)	100	100	925.937.129	100	944.770.076	100	968.750.098	100	995.086.193	100	1.029.352.384		
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				34.085.453.558		37.494.078.493		38.445.696.595		39.490.966.495		40.850.961.209		
Meningkatnya Kualitas Layanan di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	30	30	93.000.000	30	94.891.558	30	97.300.082	30	99.945.247	30	103.386.901		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	9	1		7		3		3		3			
	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	79,57	77,4		77,6		77.8		78		78			
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				3.000.000		3.061.018		3.138.712		3.224.040		3.335.061		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	9	1	3.000.000	7	3.061.018	3	3.138.712	3	3.224.040	3	3.335.061		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				90.000.000		91.830.540		94.161.370		96.721.207		100.051.840		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	30	30	90.000.000	30	91.830.540	30	94.161.370	30	96.721.207	30	100.051.840		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				54.578.865.736		52.973.614.469		54.318.235.857		55.794.812.567		57.716.021.094		
Meningkatnya Kualitas Layanan di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12	12	832.937.129	12	849.878.518	12	871.450.016	12	895.140.946	12	925.965.483		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pendapatan Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				832.937.129		849.878.518		871.450.016		895.140.946		925.965.483		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12	12	832.937.129	12	849.878.518	12	871.450.016	12	895.140.946	12	925.965.483		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (UPT PSC 119 YES)	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)	100	100	1.728.436.650	100	1.763.591.906	100	1.808.355.150	100	1.857.516.450	100	1.921.480.773		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				54.578.865.736		52.973.614.469		54.318.235.857		55.794.812.567		57.716.021.094		
Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	1.728.436.650	1	1.763.591.906	1	1.808.355.150	1	1.857.516.450	1	1.921.480.773		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.631.617.900		1.664.803.927		1.707.059.748		1.753.467.267		1.813.848.615		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12	12	1.631.617.900	12	1.664.803.927	12	1.707.059.748	12	1.753.467.267	12	1.813.848.615		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				96.818.750		98.787.979		101.295.402		104.049.183		107.632.158		
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	96.818.750	1	98.787.979	1	101.295.402	1	104.049.183	1	107.632.158		
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas (Persentase)	88,44	88,97	3.946.301.120	89,3	4.026.566.270	89,46	4.128.768.012	89,7	4.241.011.232	89,75	4.384.353.470		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				54.578.865.736		52.973.614.469		54.318.235.857		55.794.812.567		57.716.021.094		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Surveilans Penyakit	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1	1	780.183.700	1	796.052.120	1	816.257.404	1	838.447.887	1	864.621.494		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	52	52		52		52		52		52			
	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				433.806.700		442.630.041		453.864.815		466.203.422		482.257.324		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	52	52	433.806.700	52	442.630.041	52	453.864.815	52	466.203.422	52	482.257.324		
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				346.377.000		353.422.079		362.392.589		372.244.465		382.364.170		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1	1	346.377.000	1	353.422.079	1	362.392.589	1	372.244.465	1	382.364.170		
Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.250	1.765	2.904.223.800	1.775	2.963.293.788	1.785	3.038.507.696	1.795	3.121.111.487	1.800	3.228.588.211		
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.200	878		749		658		587		533			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9.630	11.650		11.700		11.750		11.800		11.850			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	7.460	4.266		3.642		3.196		2.855		2.591			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	40	60		60		60		60		60			
	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap	96,61	96,67		96,7		96,73		96,76		96,8			
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100		100		100		100		100			
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	91	93		94		94,5		95		95			
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	83,9	86		87		88		90		90			
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				227.300.000		231.923.131		237.809.772		244.274.784		252.686.484		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	7.460	4.266	227.300.000	3.642	231.923.131	3.196	237.809.772	2.855	244.274.784	2.591	252.686.484		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				38.904.000		39.695.282		40.702.822		41.809.354		43.249.076		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9.630	11.650	38.904.000	11.700	39.695.282	11.750	40.702.822	11.800	41.809.354	11.850	43.249.076		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2.618.379.800		2.671.635.911		2.739.447.000		2.813.920.632		2.910.819.116		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	12	2.618.379.800	12	2.671.635.911	12	2.739.447.000	12	2.813.920.632	12	2.910.819.116		
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				440.000		448.949		460.344		472.859		489.142		
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12	12	440.000	12	448.949	12	460.344	12	472.859	12	489.142		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				18.375.000		18.748.735		19.224.613		19.747.247		20.427.251		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.200	878	18.375.000	749	18.748.735	658	19.224.613	587	19.747.247	533	20.427.251		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				440.000		448.949		460.344		472.859		489.142		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.250	1.765	440.000	1.775	448.949	1.785	460.344	1.795	472.859	1.800	489.142		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				385.000		392.831		402.801		413.752		428.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	40	60	385.000	60	392.831	60	402.801	60	413.752	60	428.000		
Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.096	1.105	205.624.000	1.110	209.806.255	1.115	215.131.528	1.120	220.980.018	1.125	228.589.553		
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	84.305	81.081		85.500		86.000		86.500		87.000			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	34.753	34.946		35.043		35.140		35.236		35.333			
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	17.251	17.350		17.400		17.450		17.500		17.550			
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	100	100		100		100		100		100			
	Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali	100	100		100		100		100		100			
	Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100		100		100		100		100			
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100		100		100		100		100			
	Prevalensi depresi pada usia >= 15 tahun	1079	1085		1090		1095		1100		1100			
	Prevalensi obesitas > 18 tahun	10,026	10,100		10,150		10,200		10,250		10,250			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				38.904.000		39.695.282		40.702.822		41.809.354		43.249.076		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	84.305	81.081	38.904.000	85.500	39.695.282	86.000	40.702.822	86.500	41.809.354	87.000	43.249.076		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				440.000		448.949		460.344		472.859		489.142		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	34.753	34.946	440.000	35.043	448.949	35.140	460.344	35.236	472.859	35.333	489.142		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				440.000		448.949		460.344		472.859		489.142		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	17.251	17.350	440.000	17.400	448.949	17.450	460.344	17.500	472.859	17.550	489.142		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				165.840.000		169.213.075		173.508.018		178.224.946		184.362.193		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.096	1.105	165.840.000	1.110	169.213.075	1.115	173.508.018	1.120	178.224.946	1.125	184.362.193		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				251.269.620		256.380.107		262.886.384		270.033.840		279.333.212		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	56.269.620	1	57.414.107	1	58.871.384	1	60.471.840	1	62.554.212		
	Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN	88,62	91,8		93,50		95,93		98,37		100,00			
	Nilai Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				56.269.620		57.414.107		58.871.384		60.471.840		62.554.212		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	56.269.620	1	57.414.107	1	58.871.384	1	60.471.840	1	62.554.212		
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Presentase Posyandu ILP aktif (Persentase)	16,24	88	5.878.696.550	92	5.521.931.352	96	5.662.088.242	100	5.816.015.757	100	6.016.292.592		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				54.578.865.736		52.973.614.469		54.318.235.857		55.794.812.567		57.716.021.094		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20	12	5.060.700.750	12	5.163.632.051	12	5.294.694.638	12	5.438.634.322	12	5.625.915.875		
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.139	1.909		1.757		1.616		1.487		1.487			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.139	1.909		1.757		1.616		1.487		1.487			
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	61.600	61.550		61.550		61.550		61.550		61.550			
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.804	10.589		10.483		10.378		10.274		10.172			
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.980	1.818		1.673		1.539		1.416		1.416			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35.708	36.428		36.788		37.148		37.508		37.868			
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100		100		100		100		100			
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100		100		100		100		100			
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100		100		100		100		100			
	Persentase lanjut usia yang mandiri	79,71	81,31		82,12		82,92		83,72		84,53			
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	12,40			11,40		10,40		9,40		8,40			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.176.990.000		1.200.929.197		1.231.411.014		1.264.887.716		1.308.444.631		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.139	1.909	1.176.990.000	1.757	1.200.929.197	1.616	1.231.411.014	1.487	1.264.887.716	1.487	1.308.444.631		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				2.500.000		2.550.848		2.615.594		2.686.700		2.779.218		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.139	1.909	2.500.000	1.757	2.550.848	1.616	2.615.594	1.487	2.686.700	1.487	2.779.218		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				93.390.000		95.289.491		97.708.115		100.364.373		103.820.461		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.980	1.818	93.390.000	1.673	95.289.491	1.539	97.708.115	1.416	100.364.373	1.416	103.820.461		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				215.980.350		220.373.247		225.966.730		232.109.781		240.102.574		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.804	10.589	215.980.350	10.483	220.373.247	10.378	225.966.730	10.274	232.109.781	10.172	240.102.574		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				409.070.000		417.390.213		427.984.353		439.619.383		454.757.853		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	61.600	61.550	409.070.000	61.550	417.390.213	61.550	427.984.353	61.550	439.619.383	61.550	454.757.853		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				132.974.000		135.678.603		139.122.378		142.904.510		147.825.484		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35.708	36.428	132.974.000	36.788	135.678.603	37.148	139.122.378	37.508	142.904.510	37.868	147.825.484		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2.758.532.400		2.814.639.122		2.886.079.899		2.964.539.840		3.066.624.957		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	18	18	2.758.532.400	18	2.814.639.122	18	2.886.079.899	18	2.964.539.840	18	3.066.624.957		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				132.774.000		135.474.535		138.913.131		142.689.574		147.603.147		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	18	18	132.774.000	18	135.474.535	18	138.913.131	18	142.689.574	18	147.603.147		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				138.490.000		141.306.795		144.893.424		148.832.445		153.957.550		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20	12	138.490.000	12	141.306.795	12	144.893.424	12	148.832.445	12	153.957.550		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kerja, dan Olahraga yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	6	4	351.157.000	4	358.299.301	4	367.393.604	4	377.381.435	4	390.376.717		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	16	1		1		1		1		1			
	Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas	36	39		40		41		42		43			
	Persentase Capaian Kelompok Sasaran mengikuti Pengukuran Kebugaran	45	55		60		65		70		75			
	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan	89,4	90		90,5		91		91,5		92			
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				46.687.000		47.636.583		48.845.688		50.173.589		51.901.337		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	16	1	46.687.000	1	47.636.583	1	48.845.688	1	50.173.589	1	51.901.337		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				257.670.000		262.910.837		269.584.003		276.912.818		286.448.422		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	6	4	257.670.000	4	262.910.837	4	269.584.003	4	276.912.818	4	286.448.422		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				46.800.000		47.751.881		48.963.913		50.295.028		52.026.958		
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1	46.800.000	1	47.751.881	1	48.963.913	1	50.295.028	1	52.026.958		
Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan bagi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	466.838.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan bagi Masyarakat	12,4	11,4		10,4		9,4		8,4		8,4			
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				466.838.800		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	466.838.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				940.373.000		959.499.564		983.853.448		1.010.600.138		1.045.400.558		
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi (Persentase)	100	100	940.373.000	100	959.499.564	100	983.853.448	100	1.010.600.138	100	1.045.400.558	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				207.808.000		212.034.677		217.416.512		223.327.120		231.017.478		
Meningkatnya cakupan Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	6.500	1.000	207.808.000	1.000	212.034.677	1.000	217.416.512	1.000	223.327.120	1.000	231.017.478		
	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) atau Rekomendasi SIP	100	100		100		100		100		100			
1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				207.808.000		212.034.677		217.416.512		223.327.120		231.017.478		
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	6.500	1.000	207.808.000	1.000	212.034.677	1.000	217.416.512	1.000	223.327.120	1.000	231.017.478		
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				91.422.000		93.281.463		95.649.120		98.249.403		101.632.661		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	91.422.000	1	93.281.463	1	95.649.120	1	98.249.403	1	101.632.661		
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT	100	100		100		100		100		100			
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				7.150.000		7.295.426		7.480.598		7.683.963		7.948.563		
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	7.150.000	1	7.295.426	1	7.480.598	1	7.683.963	1	7.948.563		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				84.272.000		85.986.037		88.168.522		90.565.440		93.684.098		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	84.272.000	1	85.986.037	1	88.168.522	1	90.565.440	1	93.684.098		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				641.143.000		654.183.424		670.787.816		689.023.615		712.750.419		
Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	30	15	641.143.000	15	654.183.424	15	670.787.816	15	689.023.615	15	712.750.419		
	Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya manusia kesehatan	100	100		100		100		100		100			
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				641.143.000		654.183.424		670.787.816		689.023.615		712.750.419		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	30	15	641.143.000	15	654.183.424	15	670.787.816	15	689.023.615	15	712.750.419		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				386.674.000		394.538.693		404.552.819		415.550.848		429.860.508		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya cakupan Rekomendasi sertifikasi bidang kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar (Persentase)	100	100	386.674.000	100	394.538.693	100	404.552.819	100	415.550.848	100	429.860.508	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				15.210.000		15.519.361		15.913.272		16.345.884		16.908.761		
Meningkatnya Pengawasan Usaha Bidang Kesehatan dan P-IRT yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	30	30	15.210.000	70	15.519.361	30	15.913.272	20	16.345.884	20	16.908.761		
	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah diverifikasi dalam proses Sertifikasi Standar Sektor Kesehatan	100	100		100		100		100		100			
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				15.210.000		15.519.361		15.913.272		16.345.884		16.908.761		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	30	30	15.210.000	70	15.519.361	30	15.913.272	20	16.345.884	20	16.908.761		
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				227.096.750		231.715.748		237.597.124		244.056.355		252.460.534		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pengawasan Usaha Bidang Kesehatan dan P-IRT yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	120	140	227.096.750	140	231.715.748	140	237.597.124	140	244.056.355	140	252.460.534		
	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen	91%	92%		93%		94%		96%		97%			
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				227.096.750		231.715.748		237.597.124		244.056.355		252.460.534		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	120	140	227.096.750	140	231.715.748	140	237.597.124	140	244.056.355	140	252.460.534		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				10.000.000		10.203.393		10.462.374		10.746.801		11.116.871		
Meningkatnya Pengawasan Usaha Bidang Kesehatan dan P-IRT yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	12	1	10.000.000	12	10.203.393	12	10.462.374	12	10.746.801	12	11.116.871		
	Persentase sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang memperoleh rekomendasi sertifikat Laik Sehat	92	95		96		96		95		96			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				10.000.000		10.203.393		10.462.374		10.746.801		11.116.871		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	12	1	10.000.000	12	10.203.393	12	10.462.374	12	10.746.801	12	11.116.871		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				134.367.250		137.100.191		140.580.049		144.401.808		149.374.342		
Meningkatnya Pengawasan Produk Makanan Minuman yang beredar di masyarakat	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	50	50	134.367.250	50	137.100.191	50	140.580.049	50	144.401.808	50	149.374.342		
	Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman pada Produk IRTP	-	95,5		96		96,5		97		97,5			
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				134.367.250		137.100.191		140.580.049		144.401.808		149.374.342		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	50	50	134.367.250	50	137.100.191	50	140.580.049	50	144.401.808	50	149.374.342		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				164.239.000		643.913.504		660.257.227		678.206.745		701.561.066		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan yang berkualitas	Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)	100	100	164.239.000	100	643.913.504	100	660.257.227	100	678.206.745	100	701.561.066	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		476.333.992		488.424.235		501.702.362		518.978.684		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	-	-	0	14	476.333.992	14	488.424.235	14	501.702.362	14	518.978.684		
	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	-	-		100		100		100		100			
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0		476.333.992		488.424.235		501.702.362		518.978.684		
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	-	-	0	14	476.333.992	14	488.424.235	14	501.702.362	14	518.978.684		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				164.239.000		167.579.512		171.832.992		176.504.383		182.582.382		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	4	12	164.239.000	12	167.579.512	12	171.832.992	12	176.504.383	12	182.582.382		
	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	86,67	100		-		-		-		-			
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				164.239.000		167.579.512		171.832.992		176.504.383		182.582.382		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	4	12	164.239.000	12	167.579.512	12	171.832.992	12	176.504.383	12	182.582.382		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				200.050.000		200.050.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				200.050.000		200.050.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Dinas Kesehatan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik (Persentase)	14,5	43	200.050.000	57,25	200.050.000	71,5	50.000.000	85,75	50.000.000	100	50.000.000	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan				200.050.000		200.050.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (UPT PSC 119 YES)	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	200.050.000	1	200.050.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				200.050.000		200.050.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	200.050.000	1	200.050.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

Tabel 4. 5 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Rsud Kota Yogyakarta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				152.285.989.550		160.241.190.000		163.859.168.000		167.686.613.000		171.668.186.000		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				132.740.085.550		140.297.727.000		143.409.550.000		146.680.978.000		149.939.126.000		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Yogyakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)	84,9	85,2	132.740.085.550	85,4	140.297.727.000	85,6	143.409.550.000	85,8	146.680.978.000	86	149.939.126.000	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)	A	A		A		A		A		A			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)	4,33	4,35		4,36		4,37		4,38		4,4			
	Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.425.000		7.574.000		7.764.000		7.972.000		8.244.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	7.425.000	2	7.574.000	2	7.764.000	2	7.972.000	2	8.244.000		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	0	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.100.000		1.122.000		1.150.000		1.181.000		1.221.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	2	1.100.000	2	1.122.000	2	1.150.000	2	1.181.000	2	1.221.000		
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				550.000		561.000		575.000		590.000		610.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	550.000	2	561.000	2	575.000	2	590.000	2	610.000		
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				550.000		561.000		575.000		590.000		610.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	550.000	2	561.000	2	575.000	2	590.000	2	610.000		
1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				550.000		561.000		575.000		590.000		610.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	2	550.000	2	561.000	2	575.000	2	590.000	2	610.000		
1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				550.000		561.000		575.000		590.000		610.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	2	550.000	2	561.000	2	575.000	2	590.000	2	610.000		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.125.000		4.208.000		4.314.000		4.431.000		4.583.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2	4.125.000	2	4.208.000	2	4.314.000	2	4.431.000	2	4.583.000		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.745.000		8.922.000		9.147.000		9.395.000		9.717.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	8.745.000	2	8.922.000	2	9.147.000	2	9.395.000	2	9.717.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				990.000		1.010.000		1.035.000		1.063.000		1.099.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	2	990.000	2	1.010.000	2	1.035.000	2	1.063.000	2	1.099.000		
1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				330.000		336.000		344.000		353.000		365.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	2	330.000	2	336.000	2	344.000	2	353.000	2	365.000		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.425.000		7.576.000		7.768.000		7.979.000		8.253.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	7.425.000	2	7.576.000	2	7.768.000	2	7.979.000	2	8.253.000		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.848.000		1.885.000		1.932.000		1.984.000		2.052.000		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	3	1.848.000	3	1.885.000	3	1.932.000	3	1.984.000	3	2.052.000		
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.848.000		1.885.000		1.932.000		1.984.000		2.052.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	3	1.848.000	3	1.885.000	3	1.932.000	3	1.984.000	3	2.052.000		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				157.921.000		161.132.000		165.221.000		169.712.000		175.555.000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	157.921.000	1	161.132.000	1	165.221.000	1	169.712.000	1	175.555.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				51.090.000		52.129.000		53.452.000		54.905.000		56.795.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	51.090.000	1	52.129.000	1	53.452.000	1	54.905.000	1	56.795.000		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				106.831.000		109.003.000		111.769.000		114.807.000		118.760.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	106.831.000	1	109.003.000	1	111.769.000	1	114.807.000	1	118.760.000		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				84.342.000		86.057.000		88.241.000		90.640.000		93.761.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	12	84.342.000	13	86.057.000	14	88.241.000	15	90.640.000	16	93.761.000		
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				84.342.000		86.057.000		88.241.000		90.640.000		93.761.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	12	84.342.000	13	86.057.000	14	88.241.000	15	90.640.000	16	93.761.000		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.883.900.000		11.105.276.000		11.387.124.000		11.696.738.000		12.099.570.000		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	10.883.900.000	12	11.105.276.000	12	11.387.124.000	12	11.696.738.000	12	12.099.570.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.898.000.000		2.956.944.000		3.031.989.000		3.114.428.000		3.221.687.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.898.000.000	12	2.956.944.000	12	3.031.989.000	12	3.114.428.000	12	3.221.687.000		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.985.900.000		8.148.332.000		8.355.135.000		8.582.310.000		8.877.883.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	7.985.900.000	12	8.148.332.000	12	8.355.135.000	12	8.582.310.000	12	8.877.883.000		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				794.444.550		810.601.000		831.171.000		853.767.000		883.167.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11	794.444.550	11	810.601.000	11	831.171.000	11	853.767.000	11	883.167.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	290	304		306		308		310		312			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				46.620.000		47.568.000		48.775.000		50.101.000		51.826.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	46.620.000	3	47.568.000	3	48.775.000	3	50.101.000	3	51.826.000		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.824.550		77.366.000		79.329.000		81.485.000		84.291.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11	75.824.550	11	77.366.000	11	79.329.000	11	81.485.000	11	84.291.000		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				372.000.000		379.565.000		389.197.000		399.777.000		413.543.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	290	304	372.000.000	306	379.565.000	308	389.197.000	310	399.777.000	312	413.543.000		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		306.102.000		313.870.000		322.404.000		333.507.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	300.000.000	2	306.102.000	2	313.870.000	2	322.404.000	2	333.507.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				120.801.460.000		128.116.280.000		130.918.950.000		133.850.770.000		136.667.060.000		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	120.801.460.000	1	128.116.280.000	1	130.918.950.000	1	133.850.770.000	1	136.667.060.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				120.801.460.000		128.116.280.000		130.918.950.000		133.850.770.000		136.667.060.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	120.801.460.000	1	128.116.280.000	1	130.918.950.000	1	133.850.770.000	1	136.667.060.000		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				19.545.904.000		19.943.463.000		20.449.618.000		21.005.635.000		21.729.060.000		
Meningkatnya Mutu Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang dan Asuhan Keperawatan RSUD Kota Yogyakarta				19.545.904.000		19.943.463.000		20.449.618.000		21.005.635.000		21.729.060.000	1.02.0.00.0.00.01.0022 - Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	
	Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit (Persentase)	85	86		86,5		87		87,5		88		1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar (Persentase)	64,51	64,8		65		65,2		65,4		65,42			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				19.230.000.000		19.621.135.000		20.119.112.000		20.666.144.000		21.377.879.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kinerja pelayanan medis	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	3	1	5.135.000.000	1	5.239.445.000	1	5.372.419.000	1	5.518.492.000	1	5.708.546.000		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	17	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2.535.000.000		2.586.561.000		2.652.205.000		2.724.316.000		2.818.139.000		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	17	1	2.535.000.000	1	2.586.561.000	1	2.652.205.000	1	2.724.316.000	1	2.818.139.000		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				2.600.000.000		2.652.884.000		2.720.214.000		2.794.176.000		2.890.407.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	3	1	2.600.000.000	1	2.652.884.000	1	2.720.214.000	1	2.794.176.000	1	2.890.407.000		
Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12	2	14.095.000.000	2	14.381.690.000	2	14.746.693.000	2	15.147.652.000	2	15.669.333.000		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	14	14		14		14		14		14			
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2.475.000.000		2.525.340.000		2.589.431.000		2.659.836.000		2.751.439.000		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	14	14	2.475.000.000	14	2.525.340.000	14	2.589.431.000	14	2.659.836.000	14	2.751.439.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				11.620.000.000		11.856.350.000		12.157.262.000		12.487.816.000		12.917.894.000		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12	2	11.620.000.000	2	11.856.350.000	2	12.157.262.000	2	12.487.816.000	2	12.917.894.000		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120.904.000		123.362.000		126.491.000		129.929.000		134.402.000		
Meningkatnya mutu pelayanan keperawatan, sumber daya keperawatan dan keselamatan pasien	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1	110	120.904.000	110	123.362.000	110	126.491.000	110	129.929.000	110	134.402.000		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1	40		40		40		40		40			
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				35.904.000		36.634.000		37.563.000		38.584.000		39.912.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2	2	35.904.000	2	36.634.000	2	37.563.000	2	38.584.000	2	39.912.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				15.000.000		15.305.000		15.693.000		16.119.000		16.674.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1	110	15.000.000	110	15.305.000	110	15.693.000	110	16.119.000	110	16.674.000		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				70.000.000		71.423.000		73.235.000		75.226.000		77.816.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1	40	70.000.000	40	71.423.000	40	73.235.000	40	75.226.000	40	77.816.000		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				195.000.000		198.966.000		204.015.000		209.562.000		216.779.000		
Meningkatnya kinerja pelayanan sistem informasi kesehatan RS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	195.000.000	1	198.966.000	1	204.015.000	1	209.562.000	1	216.779.000		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				195.000.000		198.966.000		204.015.000		209.562.000		216.779.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	195.000.000	1	198.966.000	1	204.015.000	1	209.562.000	1	216.779.000		

Tabel 4. 6 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				26,082,350,614.00		26,612,865,625.00		27,288,300,155.00		28,030,269,036.00		28,995,631,502.00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22,146,046,000.00		22,596,496,575.00		23,169,995,658.00		23,799,987,840.00		24,619,659,421.00		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit Pratama				-		-		-		-		-	1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPT RS Pratama	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	86.82	86.90		86.95		87		87.05		87.10		1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,540,000.00		1,571,324.00		1,611,204.00		1,655,012.00		1,712,011.00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja RS Pratama Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	1,540,000.00	8	1,571,324.00	8	1,611,204.00	8	1,655,012.00	8	1,712,011.00		
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,540,000.00		1,571,324.00		1,611,204.00		1,655,012.00		1,712,011.00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	1,540,000.00	8	1,571,324.00	8	1,611,204.00	8	1,655,012.00	8	1,712,011.00		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,540,000.00		1,571,324.00		1,611,204.00		1,655,012.00		1,712,011.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	8	1,540,000.00	8	1,571,324.00	8	1,611,204.00	8	1,655,012.00	8	1,712,011.00		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1,540,000.00		1,571,324.00		1,611,204.00		1,655,012.00		1,712,011.00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	8	1,540,000.00	8	1,571,324.00	8	1,611,204.00	8	1,655,012.00	8	1,712,011.00		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5,940,000.00		6,060,820.00		6,214,643.00		6,383,619.00		6,603,471.00		
Meningkatnya kualitas kinerja pegawai RS Pratama	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	2	5,940,000.00	2	6,060,820.00	2	6,214,643.00	2	6,383,619.00	2	6,603,471.00		
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5,940,000.00		6,060,820.00		6,214,643.00		6,383,619.00		6,603,471.00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	2	5,940,000.00	2	6,060,820.00	2	6,214,643.00	2	6,383,619.00	2	6,603,471.00		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,132,026,000.00		3,195,731,409.00		3,276,839,072.00		3,365,936,326.00		3,481,859,174.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	3,125,076,000.00	12	3,188,640,046.00	12	3,269,567,730.00	12	3,358,467,277.00	12	3,474,132,890.00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	7	6,950,000.00	7	7,091,363.00	7	7,271,342.00	7	7,469,049.00	7	7,726,284.00		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3,125,076,000.00		3,188,640,046.00		3,269,567,730.00		3,358,467,277.00		3,474,132,890.00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	3,125,076,000.00	12	3,188,640,046.00	12	3,269,567,730.00	12	3,358,467,277.00	12	3,474,132,890.00		
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6,950,000.00		7,091,363.00		7,271,342.00		7,469,049.00		7,726,284.00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	7	6,950,000.00	7	7,091,363.00	7	7,271,342.00	7	7,469,049.00	7	7,726,284.00		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,000,000.00		5,101,698.00		5,231,180.00		5,373,418.00		5,558,476.00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	7	5,000,000.00	7	5,101,698.00	7	5,231,180.00	7	5,373,418.00	7	5,558,476.00		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5,000,000.00		5,101,698.00		5,231,180.00		5,373,418.00		5,558,476.00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	7	5,000,000.00	1	5,101,698.00	1	5,231,180.00	1	5,373,418.00	1	5,558,476.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				19,000,000,000.00		19,386,460,000.00		19,878,488,355.00		20,418,984,453.00		21,122,214,278.00		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD RS Pratama	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	19,000,000,000.00	1	19,386,460,000.00	1	19,878,488,355.00	1	20,418,984,453.00	1	21,122,214,278.00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				19,000,000,000.00		19,386,460,000.00		19,878,488,355.00		20,418,984,453.00		21,122,214,278.00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	19,000,000,000.00	1	19,386,460,000	1	19,878,488,355	1	20,418,984,453	1	21,122,214,278		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3,936,304,614.00		4,016,369,050.00		4,118,304,497.00		4,230,281,196.00		4,375,972,081.00		
Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pratama													1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPT RS Pratama	
	Persentase tercapainya indikator SPM layanan Rumah Sakit	92.00	93.00		93.50		94.00		94.50		95.00		1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3,926,304,614.00		4,006,165,650.00		4,107,842,134.00		4,219,534,361.00		4,364,855,125.00		
Meningkatnya Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian Sesuai Standar di RS Pratama	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	24	234	200,000,000.00	239	204,068,000.00	244	209,247,246.00	249	214,936,678.00	254	222,339,098.00		
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3	2	3,726,304,614.00	2	3,802,097,650.00	2	3,898,594,888.00	2	4,004,597,683.00	2	4,142,516,027.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				200,000,000.00		204,068,000.00		209,247,246.00		214,936,678.00		222,339,098.00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	24	234	200,000,000.00	239	204,068,000.00	244	209,247,246.00	249	214,936,678.00	254	222,339,098.00		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				3,726,304,614.00		3,802,097,650.00		3,898,594,888.00		4,004,597,683.00		4,142,516,027.00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3	2	3,726,304,614.00	2	3,802,097,650.00	2	3,898,594,888.00	2	4,004,597,683.00	2	4,142,516,027.00		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10,000,000.00		10,203,400.00		10,462,363.00		10,746,835.00		11,116,956.00		
Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40	30	10,000,000.00	30	10,203,400.00	30	10,462,363.00	30	10,746,835.00	30	11,116,956.00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				10,000,000.00		10,203,400.00		10,462,363.00		10,746,835.00		11,116,956.00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40	30	10,000,000.00	30	10,203,400.00	30	10,462,363.00	30	10,746,835.00	30	11,116,956.00		

4.2 Program Prioritas Kesehatan

Program prioritas merupakan hasil dari proses cascading kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level outcome yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah terkait. Program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis yang dijabarkan ke dalam program-program unggulan dari Wali Kota terpilih.

Dari delapan program strategis Wali Kota salah satunya adalah "Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan: Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat, Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan Satu Kampung Satu Bidan", Dinas Kesehatan menyelaraskan dengan indikator program yang relevan sehingga dapat diimplementasikan secara efektif. Berikut program prioritas yang diampu oleh Dinas Kesehatan

Tabel 4. 7 Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Kesehatan, RSUD dan RS Pratama dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM STRATEGIS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)		*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan					
1.	Satu Kampung Satu Bidan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pratama	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RS Pratama
				1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			Meningkatnya Mutu Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang dan Asuhan Keperawatan RSUD Kota Yogyakarta	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Kota Yogyakarta
				1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	

NO	PROGRAM STRATEGIS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)		*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
3.	Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan yang berkualitas	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan	

NO	PROGRAM STRATEGIS WALI KOTA	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)		*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
				Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah mengatur prinsip, kriteria, dan tata cara penetapan indikator kinerja, termasuk keterkaitan antara IKU dan IKK. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Mengatur bahwa indikator kinerja, baik IKU maupun IKK, digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan strategis Dinas Kesehatan selama periode rencana strategis. IKU ditetapkan untuk memastikan bahwa arah pembangunan kesehatan daerah selaras dengan kebijakan nasional, prioritas pemerintah daerah, dan kebutuhan masyarakat.

IKU menjadi acuan dalam pengukuran kinerja secara berkelanjutan, baik untuk menilai efektivitas program maupun untuk memastikan bahwa hasil pembangunan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat. Penetapan IKU dilakukan melalui proses analisis terhadap visi, misi, dan tujuan strategis, dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan nasional (RPJMN), RPJMD, *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta regulasi dan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di bidang kesehatan.

Setiap indikator dalam IKU Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dirumuskan dengan memperhatikan prinsip *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), sehingga indikator yang tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas, terukur, dan realistis terkait capaian pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta yang menggambarkan perubahan kondisi kesehatan masyarakat, dan indikator manfaat (*benefit*) yang menunjukkan dampak positif dari pelayanan kesehatan yang diberikan.

IKU juga berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena hasil pengukuran IKU menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta evaluasi oleh pihak eksternal. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian IKU mencerminkan kualitas perencanaan, pengelolaan program, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan selama periode Renstra 2025-2029

Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan									
1.	Prevalensi Balita Stunting	Persentase	10,07	10,06	10,05	10,04	10,03	10,02	10,02	
2.	Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun	Indeks	0,987	0,976	0,977	0,977	0,978	0,979	0,981	
3.	Angka Kematian Ibu	Angka	93,11	93,1	93,09	93,08	93,07	93,06	93,06	
4.	Angka Kematian Bayi	Angka	9,78	9,76	9,74	9,72	9,7	9,68	9,66	
5.	Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Nilai Akreditasi Rumah Sakit Pratama	Predikat	Paripurna (>80)	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	
7.	Akreditasi Paripurna Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta	Predikat	Paripurna (>80)	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	Paripurna (>80	
8.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Predikat	AA	A	A	A	A	A	A	
9.	Nilai Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran perangkat daerah secara lebih spesifik. Jika IKU berfungsi sebagai indikator hasil utama (*outcome*) yang bersifat strategis, maka IKK merupakan indikator turunan yang lebih teknis dan operasional, yang mengukur kinerja pada level sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan.

Penetapan IKK mengacu pada dokumen perencanaan nasional, RPJMD, serta standar dan pedoman kinerja yang berlaku di sektor kesehatan. IKK Dinas Kesehatan disusun untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga arah pembangunan kesehatan di daerah dapat terukur secara jelas.

Fungsi utama IKK meliputi:

1. Mengukur capaian sasaran strategis secara operasional yang telah diturunkan dari IKU.
2. Memonitor kinerja tahunan perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Menjadi dasar evaluasi kinerja internal untuk perbaikan dan pengambilan keputusan.
4. Memastikan keselarasan antara target dan realisasi kinerja pada semua tingkatan.
5. Mempermudah proses pelaporan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) maupun laporan internal lainnya.

Dengan adanya IKK, Dinas Kesehatan dapat mengukur kinerja secara komprehensif, mulai dari capaian strategis yang luas hingga kinerja teknis pada unit kerja, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan lebih terarah, efektif, dan akuntabel.

Tabel 4. 9 Indikator Kinerja Kunci (Ikk) Urusan Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
9.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	positif	Rasio	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	
14	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Rumah Sakit Pratama Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman bersama dalam mewujudkan pembangunan kesehatan daerah yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Dokumen ini merupakan penjabaran dari RPJMN 2025–2029, RPJMD Daerah dan bersifat indikatif, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional dalam kerangka transformasi sistem kesehatan.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja utama yang menjadi komitmen seluruh unit pelaksana kesehatan di Kota Yogyakarta. Penyusunan secara terintegrasi antara Dinas Kesehatan, RSUD, dan RS Pratama Kota Yogyakarta bertujuan untuk:

1. Menguatkan kolaborasi dan sinergi layanan kesehatan primer dan rujukan, sehingga tercipta jejaring layanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Menjamin keterpaduan perencanaan dan penganggaran agar sumber daya kesehatan, baik SDM, sarana prasarana, maupun pembiayaan, dapat dimanfaatkan secara optimal.
3. Mendukung pencapaian target indikator pembangunan kesehatan daerah, termasuk penurunan angka stunting, peningkatan Universal Health Coverage (UHC), pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan mutu layanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
4. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi, baik di lingkup Dinas Kesehatan maupun rumah sakit daerah, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani.

Renstra Dinas Kesehatan, RSUD dan RS Pratama Kota Yogyakarta ini sekaligus menjadi instrumen manajerial dalam memastikan kesinambungan pembangunan kesehatan di daerah. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan tercapai keselarasan antara pelayanan kesehatan masyarakat (public health services) yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan dengan pelayanan kesehatan perorangan (individual health services) yang menjadi tugas rumah sakit.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi Renstra tidak hanya ditentukan oleh dokumen perencanaan yang baik, tetapi juga oleh komitmen, integritas, serta kerja sama seluruh pihak—baik pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan tekad dan sinergi bersama, diharapkan visi “Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya” dapat diwujudkan secara nyata di periode 2025–2029.

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target					Kondisi Akhir	Target	Persetujuan
									2025	2026	2027	2028	2029		2030	
1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	Persentase balita umur 0 sampai 59 bulan dengan katagori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD				Prevalensi Stunting dihitung dari jumlah balita pendek ditambah balita sangat pendek dibandingkan dengan jumlah balita yang diukur di Kota Yogyakarta	%	10,07	10,06	10,05	10,04	10,03	10,02	10,02	10,02	TRUE
						sumber data :										
						Jumlah balita gizi buruk + balita gizi kurang		1122	1115	1109	1102	1095	1089	1089	1089	FALSE
						Jumlah balita yang ditimbang di Kota Yogyakarta		11137	11081	11026	10971	10916	10861	10861	10861	FALSE
	Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun	Kemungkinan seorang anak untuk hidup hingga usia 5 tahun				1 dikurangi angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	indeks	0,987	0,976	0,977	0,977	0,978	0,979	0,979	0,981	TRUE
						sumber data :										
						Angka kematian balita		12,570	23,902	23,380	22,849	22,319	21,308	21,308	19,370	FALSE
						Jumlah kematian anak dibawah 5 tahun		27	49	48	47	46	44	44	40	FALSE
						Jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut		2148	2050	2053	2057	2061	2065	2065	2065	FALSE
			1.1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Jumlah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (tanpa memandang usia gestasi), akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan dan penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cidera atau kejadian incidental	Jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu / tahun yang sama dikali 100.000	angka	93,11	93,1	93,09	93,08	93,07	93,06	93,06	93,06	TRUE
						Sumber data :										
						Jumlah kematian Ibu di Kota Yogyakarta		2	2	2	2	2	2	2	2	FALSE
						Jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut		2148	2050	2053	2057	2061	2065	2065	2065	
				Angka Kematian Bayi	Jumlah bayi yang meninggal sebelum umur 1 tahun karena sebab apapun	Jumlah kematian bayi dibagi Jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut dikali 1000	angka	9,78	9,76	9,74	9,72	9,7	9,68	9,68	9,66	TRUE
						Sumber data :										
						Jumlah kematian bayi di kota yk		21	20	20	20	20	20	20	20	FALSE
						Jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut		2148	2050	2053	2057	2061	2065	2065	2065	
				Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC)	Capaian Minimal UHC sesuai standar yang ditetapkan oleh Nasional sebesar 98% jumlah penduduk	Persentase capaian UHC dihitung dari capaian kepesertaan JKN dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta x 100 dibagi standar UHC nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
						Sumber data :										
						Jumlah kepesertaan JKN Kota Yogyakarta		414.753	414.753	414.753	414.753	414.753	414.753	414.753	414.753	FALSE
						Jumlah penduduk Kota Yogyakarta		414705	414705	414705	414705	414705	414705	414705	414705	FALSE
			1.2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pratama	Nilai Akreditasi Rumah Sakit Pratama	Hasil perhitungan standar tata kelola RS yang ditetapkan oleh KARS untuk memastikan bahwa RS Pratama telah memenuhi standar	Hasil Penilaian Akreditasi RS yang dilakukan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit)	Predikat	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	FALSE
						Sumber data:										FALSE
						Hasil penilaian akreditasi RS Pratama		Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	FALSE
			1.3. Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta	Akreditasi Paripurna Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta	Hasil perhitungan standar tata kelola RS yang ditetapkan oleh KARS untuk memastikan bahwa RSUD Kota Yogyakarta telah memenuhi standar	Hasil Penilaian Akreditasi RS yang dilakukan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit)	Predikat	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	FALSE
						Sumber data :										
						Hasil Penilaian Akreditasi RS yang dilakukan oleh KARS		Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	Paripurna (>80)	FALSE

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target					Kondisi Akhir	Target	Persetujuan
									2025	2026	2027	2028	2029		2030	
			1.4. Terwujudnya tata kelola Dinas Kesehatan yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	"Hasil Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan predikat : AA (lebih dari 90-100) A (lebih dari 80-90) BB (lebih dari 70-80) B (lebih dari 60-70) CC (lebih dari 50-60) C (lebih dari 30-50) D (lebih dari 0-30)"	Hasil Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan predikat :	Nilai	AA (90,375)	(86,25-89,25)	(86,50-89,50)	(86,75-89,75)	(87,00-90,00)	(87,25-90,00)	(87,25-90,00)	(87,50-90,00)	TRUE
						Sumber data :										
						Hasil penilaian RB Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Kesehatan 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinas Kesehatan 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik		AA (90,375)	(86,25-89,25)	(86,50-89,50)	(86,75-89,75)	(87,00-90,00)	(87,25-90,00)	(87,25-90,00)	(87,50-90,00)	TRUE
			1.5. Terwujudnya tata kelola RSUD Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan predikat : AA (lebih dari 90-100) A (lebih dari 80-90) BB (lebih dari 70-80) B (lebih dari 60-70) CC (lebih dari 50-60) C (lebih dari 30-50) D (lebih dari 0-30)	Hasil Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan predikat	Nilai	A (87,59)	(86,25-89,25)	(86,50-89,50)	(86,75-89,75)	(87,00-90,00)	(87,25-90,25)	(87,25-90,25)	(87,50-90,50)	TRUE
						Sumber data :										
						Hasil penilaian RB RSUD Kota Yogyakarta oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Yogyakarta 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) RSUD Kota Yogyakarta 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN RSUD Kota Yogyakarta 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik									TRUE

DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target					Kondisi Akhir	Target	Persetujuan
												2025	2026	2027	2028	2029		2030	
1.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	1.1.1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Presentase Posyandu ILP aktif	1. Melakukan kegiatan hari buka setiap bulan atau sedikitnya 8 kali di akhir tahun 2. Memberikan pelayanan kesehatan untuk semua siklus hidup (ibu hamil, bayi, balita, remaja, dewasa, lansia); dan 3. Memiliki 5 orang kader terlatih					Jumlah posyandu ILP dibagi dengan jumlah posyandu bidang kesehatan yang ada di wilayah dikali 100%	%	16,24	84	88	92	96	100	100	100	TRUE
									Sumber data :										
									Posyandu ILP aktif		103	517	547	572	597	622	622	622	TRUE
									Jml Posyandu		622	622	622	622	622	622	622	622	TRUE
					1.1.1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kerja, dan Olahraga yang berkualitas	Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas	Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di sektor informal yang dibentuk oleh Puskesmas	Jumlah Pos UKK yang dibentuk oleh Puskesmas	jumlah	36	38	39	40	41	42	42	43	FALSE
									Sumber data :										
									Jumlah POS UKK yang dibentuk melalui Puskesmas		36	38	39	40	41	42	42	43	FALSE
									Jumlah Sektor Informal di wilayah Puskesmas										FALSE
							Persentase Capaian Kelompok Sasaran mengikuti Pengukuran Kebugaran	Cakupan kelompok ASN, calon jamaah haji, dan anak usia sekolah yang mengikuti pengukuran kebugaran sesuai standar	Jumlah Peserta Kelompok Sasaran yang telah dilakukan pengukuran kebugaran dibagi dengan jumlah Target Peserta Kelompok Sasaran dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	%	45	50	55	60	65	70	70	75	TRUE
									Sumber data :										
									Jumlah Peserta Kelompok Sasaran calon jamaah haji		104	116	127	139	150	162	162	173	TRUE
									Jumlah Peserta Kelompok Sasaran ASN		571	634	698	761	825	888	888	888	TRUE
									Jumlah Peserta Kelompok Sasaran Anak Usia sekolah		525	583	642	700	758	817	817	817	TRUE
									Jumlah Total peserta kelompok sasaran pengkuran kebugaran		2668	2668	2668	2668	2668	2668	2668	2668	TRUE
							Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan	Cakupan Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum yang di Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan	Jumlah TFU, TPP, Sarana Air Minum yang di IKL dg hasil memenuhi syarat dalam waktu 1 tahun dibagi Jumlah TFU, TPP, Sarana Air Minum yang d-ilKL dikalikan 100 %	%	89,4	89,5	90	90,5	91	91,5	91,5	92	TRUE
									Sumber data :										
									Jumlah TFU dg hasil memenuhi syarat		288	288	290	291	293	295	295	296	TRUE
									Jumlah TPP dg hasil memenuhi syarat		495	496	499	501	504	507	507	510	TRUE
									Jumlah Sarana Air Minum yang di IKL dg hasil memenuhi syarat		174	175	176	176	177	178	178	179	TRUE
									Jumlah TFU, TPP, Sarana Air Minum yang d-ilKL		1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	TRUE
							Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Jumlah Kelurahan yang telah terverifikasi 100% KK Stop Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka dan minimal 75% KK berperilaku minimal 3 pilar STBM lainnya	Jumlah kumulatif Kelurahan yang telah terverifikasi 100% KK Stop Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka dan minimal 75% KK berperilaku minimal 3 pilar STBM lainnya	%	100	N/A	100	100	100	100	100	100	FALSE
									Sumber data : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.										FALSE
									Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta		45	N/A	45	45	45	45	45	45	FALSE
									Jumlah KK		146.543	N/A	146.543	146.543	146.543	146.543	146.543	146.543	FALSE
																			FALSE
						Meningkatnya kesehatan keluarga yang berkualitas	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar kuantitas dan kualitas di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun (nominator) dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data : Web Kesga DIY										
									Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar kuantitas dan kualitas di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun		2139	2075	1909	1757	1616	1487	1487	1487	TRUE
									Jumlah sasaran ibu bersalin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun yang sama		2139	2075	1909	1757	1616	1487	1487	1487	TRUE
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 %	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data : Web Kesga DIY										
									Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun		2139	2075	1909	1757	1616	1487	1487	1487	TRUE
									Jumlah sasaran ibu bersalin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun yang sama		2139	2075	1909	1757	1616	1487	1487	1487	TRUE
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun **dibagi** Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun yang sama **dikali** 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	Target 2030	Persetujuan
								waktu satu tahun	Sumber data : Web Kesga DIY										
									Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun		2139	1976	1818	1673	1539	1416	1416	1416	TRUE
									Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun yang sama		2139	1976	1818	1673	1539	1416	1416	1416	TRUE
							Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah Balita yang berulang tahun ke-1 sampai ke-5 yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah balita yang berulang tahun ke-1 sampai ke-5 di Kota Yogyakarta pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	TRUE
									Sumber data : Web Kesga DIY										
									Jumlah balita yang berulang tahun ke-1 sampai ke-5 yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		10804	10696	10589	10483	10378	10274	10172	10172	TRUE
									Jumlah seluruh sasaran balita yang berulang tahun ke-1 sampai ke-5 pada suatu wilayah kerja		10804	10696	10589	10483	10378	10274	10172	10172	TRUE
							Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar (kelas 1 sd 9) dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di Sekolah yang ada di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi jumlah semua anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah yang ada di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100 %	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data : Web Penjarkes DIY										
									Jumlah anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran		61600	61550	61550	61550	61550	61550	61550	61550	TRUE
									jumlah semua anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah yang ada di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama		61600	61550	61550	61550	61550	61550	61550	61550	TRUE
							Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan	Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar minimal 1 kali di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang berdomisili di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 %	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data : Web Kesga DIY										
									Jumlah sasaran warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang berdomisili di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 %		35708	36068	36428	36788	37148	37508	37868	37868	TRUE
							Persentase lanjut usia yang mandiri	Persentase lansia ≥ 60 tahun yang masih mampu melakukan aktifitas hidup sehari hari tanpa bantuan sama sekali dari orang lain (mandiri: skor ADL20) dan lansia yang mengalami gangguan dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari hingga kadang perlu bantuan orang lain (skor ADL 12-19/ ketergantungan ringan)	Jumlah lansia≥60 tahun (skorADL20) ditambah jumlah lansia > 60 tahun dengan ketergantungan ringan (skor ADL12-19) dibagi jumlah lansia yang diskrining dikali 100%	%	79,71	N/A	81,31	82,12	82,92	83,72	84,53	84,53	FALSE
									Sumber data : Web Kesga DIY										FALSE
									Jumlah lansia ≥60 tahun (skorADL20) ditambah jumlah lansia > 60 tahun dengan ketergantungan ringan (skor ADL12-19) dalam kurun waktu satu tahun yang sama		35708	N/A	36428	36788	37148	37508	37868	37868	FALSE
									jumlah lansia yang diskrining dalam kurun waktu satu tahun yang sama		44800	N/A	44800	44800	44800	44800	44800	44800	FALSE
																			FALSE
						Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan bagi Masyarakat	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Persentase merokok pada penduduk usia10-21 tahun adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur10-21 tahun yang merokok dengan jumlah penduduk umur 10-21 tahun. Definisi merokok adalah merokok tembakau maupun cerutu baik tiap hari maupun kadang-kadang	Jumlah penduduk umur10-21 tahun yang merokok dibagi jumlah semua penduduk umur 10-21 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%) PM 10-21 = (JP10-21 M/ JP 10-21) x 100% PM10-21: Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun JP10-21M: Jumlah penduduk umur 10-21 tahun yang merokok pada waktu tertentu JP10-21: Jumlah penduduk umur 10-21 tahun pada periode waktu yang sama	%	12,40%	N/A	11,40%	10,40%	9,40%	8,40%	8,40%	8,40%	FALSE
									Sumber data : Data Dukcapil Kota Yogyakarta Tahun 2024										FALSE
									Jumlah Penduduk Usia 10-21 tahun yang di lakukan skrining perilaku merokok	orang	75931	N/A	75931	75931	75931	75931	75931	75931	FALSE
									Jumlah Penduduk Usia 10-21 tahun yang merokok	orang	9416	N/A	8657	7897	7137	6379	6379	6379	FALSE
																			FALSE
		Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas	Persentase penderita penyakit menular dan tidak menular yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (Hipertensi, diabetes mellitus, HIV, TB)					Jumlah penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular prioritas yang mendapatkan layanan kesehatan di Kota Yogyakarta dibandingkan dengan jumlah penderita PM dan PTM prioritas dikali 100%	%	88,44%	88,64%	88,97%	89,30%	89,46%	89,70%	89,70%	89,75%	TRUE
									Sumber data : Data pelaporan Program										
									Jumlah kasus TBC yang ditemukan dan memulai pengobatan	orang	1435	855	735	634	559	503	503	456	TRUE

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	Target 2030	Persetujuan
									jumlah notifikasi kasus TBC dalam suatu wilayah selama kurun waktu 1 tahun	orang	1569	929	790	674	592	529	529	480	TRUE
									Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	11195	11600	11650	11700	11750	11800	11800	11850	TRUE
									Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV	orang	11195	11600	11650	11700	11750	11800	11800	11850	TRUE
									Jumlah penderita PTM prioritas (Cakupan pelayanan Hipertensi)	orang	34753	34850	34946	35043	35140	35236	35236	35333	TRUE
									Jumlah estimasi penderita PTM prioritas (Cakupan pelayanan Hipertensi)	orang	54729	54730	54750	54780	54790	54800	54800	54850	TRUE
									Jumlah penderita DM di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	orang	17251	17300	17350	17400	17450	17500	17500	17550	TRUE
									Jumlah estimasi penderita PTM prioritas (Cakupan pelayanan DM)	orang	17458	17500	17525	17550	17575	17600	17600	17625	TRUE
					1.1.1.2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat satu dosis imunisasi Hepatitis B, satu dosis imunisasi BCG, tiga dosis imunisasi DPT-HB-Hib , tiga dosis imunisasi IPV dan satu dosis imunisasi campak rubella dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah anak usia 0-11 bulan yang mendapat satu dosis imunisasi Hepatitis B, satu dosis imunisasi BCG, tiga dosis imunisasi DPT-HB-Hib , tiga dosis imunisasi IPV dan satu dosis imunisasi campak rubella **dibagi** jumlah sasaran anak usia 0-11 bulan dalam kurun waktu satu tahun **dikalikan** 100%	%	96,61	96,64	96,67	96,7	96,73	96,76	96,76	96,8	TRUE
									Sumber data :										
									Jumlah anak usia 0-11 bulan yang mendapat satu dosis imunisasi Hepatitis B, satu dosis imunisasi BCG, tiga dosis imunisasi DPT-HB-Hib , tiga dosis imunisasi IPV dan satu dosis imunisasi campak rubella	bayi	2220	2048	2029	2010	1992	1973	1954	1954	TRUE
									Jumlah sasaran anak usia 0-11 bulan dalam kurun waktu satu tahun (Sasaran awal tahun sesuai sasaran bayi baru lahir dari seksi kesga gizi di baris 39)	bayi	2298	2119	2099	2079	2059	2039	2019	2019	TRUE
							Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di bagi jumlah terduga TBC berdasar perhitungan estimasi dalam suatu wilayah selama kurun waktu 1 tahun dikalikan seratus persen	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data : data TB06 SITB di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan TPMD										
									Jumlah terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	5902	4788	4266	3642	3196	2855	2855	2591	TRUE
									jumlah terduga TBC berdasar perhitungan estimasi dalam suatu wilayah selama kurun waktu 1 tahun	orang	5902	4788	4266	3642	3196	2855	2855	2591	TRUE
							Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Cakupan kasus TBC yang ditemukan dan memulai pengobatan selama kurun waktu satu tahun.	Jumlah kasus TBC yang ditemukan dan memulai pengobatan dibagi jumlah notifikasi kasus TBC dalam suatu wilayah selama kurun waktu 1 tahun dikali seratus persen.	%	91	92	93	94	94,5	95	95	95	TRUE
									Sumber data : data TB03 SITB di Puskemas, Rumah SaKit, Klinik dan TPMD										
									Jumlah kasus TBC yang ditemukan dan memulai pengobatan		1435	855	735	634	559	503	503	456	TRUE
									jumlah notifikasi kasus TBC dalam suatu wilayah selama kurun waktu 1 tahun		1569	929	790	674	592	529	529	480	TRUE
							Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Cakupan kasus TBC yang berhasil sembuh dan pengobatan lengkap yang memulai pengobatan selama kohort satu tahun yang lalu.	Jumlah kasus TBC yang berhasil sembuh dan pengobatan lengkap dibagi jumlah kasus TBC yang diobati selama kurun waktu 1 tahun dikali seratus persen	%	83,9	84,5	86	87	88	90	90	90	TRUE
									Sumber data: data kohort TB03 SITB di Puskesmas, Rumah SAkit, Klinik dan TPMD										
									Jumlah kasus TBC yang berhasil sembuh dan pengobatan lengkap		1206	1108	799	687	593	533	533	476	TRUE
									jumlah kasus TBC yang diobati selama kurun waktu 1 tahun		1436	1312	929	790	674	592	592	529	TRUE
							Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Capaian dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah populasi berisiko terinfeksi HIV, periksa di faskes Kota Yogyakarta, yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah populasi berisiko terinfeksi HIV di faskes Kota Yogyakarta dalam waktu 1 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data: Laporan Layanan Konseling dan Tes HIV di Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas pada fitur Kunjungan Pasien di aplikasi SIHA 2.1										
									Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	orang	11195	11600	11650	11700	11750	11800	11800	11850	TRUE
									Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu 1 tahun	orang	11195	11600	11650	11700	11750	11800	11800	11850	TRUE
						Meningkatnya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran penduduk usia 15-59 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama, dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data: Data Pelaporan SPM										
									Jumlah penduduk usia 15-59 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	orang	84.305	84500	85000	85500	86000	86500	86500	87000	TRUE

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target					Kondisi Akhir	Target	Persetujuan
												2025	2026	2027	2028	2029		2030	
									Jumlah penduduk usia 15-59 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	orang	84.305	84500	85000	85500	86000	86500	86500	87000	TRUE
							Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali	Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah penderita Hipertensi usia ≥15 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah penderita Hipertensi berdasarkan prevalensi Hipertensi usia ≥15 tahun kabupaten/kota di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama, dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data: Data Pelaporan SPM										
									Jumlah penderita Hipertensi usia ≥15 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	orang	34753	34850	34946	35043	35140	35236	35333	35333	TRUE
									Jumlah estimasi penderita Hipertensi usia ≥15 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan prevalensi dalam kurun waktu satu tahun	orang	34753	34850	34946	35043	35140	35236	35333	35333	TRUE
							Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita diabetes melitus, dinilai dari persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah penderita Diabetes Melitus di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah penderita Diabetes Melitus berdasarkan prevalensi diabetes melitus usia ≥15 tahun kabupaten/kota di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama, dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data: Data Pelaporan SPM										
									Jumlah penderita Diabetes Melitus usia ≥15 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	orang	17251	17300	17350	17400	17450	17500	17500	17550	TRUE
									Jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus usia ≥15 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan prevalensi dalam kurun waktu satu tahun	orang	17251	17300	17350	17400	17450	17500	17500	17550	TRUE
							Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama, dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data: Data Pelaporan SPM										
									Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	orang	1096	1100	1105	1110	1115	1120	1120	1125	TRUE
									Jumlah estimasi ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan prevalensi dalam kurun waktu satu tahun	orang	1096	1100	1105	1110	1115	1120	1120	1125	TRUE
							Prevalensi depresi pada usia >= 15 tahun	perbandingan antara jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun yang saat ini mengalami gangguan depresi, terhadap jumlah seluruh penduduk berumur ≥ 15 tahun pada wilayah tertentu	Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang saat ini mengalami gangguan depresi (menurut MINI) dibagi jumlah seluruh penduduk berumur ≥ 15 tahun	%	0,3214%	N/A	0,3232%	0,3247%	0,3262%	0,3276%	0,3276%	0,3276%	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang saat ini mengalami gangguan depresi (menurut MINI)	orang	1.079	N/A	1.085	1.090	1.095	1.100	1.100	1.100	FALSE
									jumlah seluruh penduduk berumur ≥ 15 tahun	orang	335.733	N/A	335.733	335.733	335.733	335.733	335.733	335.733	FALSE
							Prevalensi obesitas > 18 tahun	Persentase jumlah penduduk umur >18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥27 pada wilayah dan periode waktu tertentu	Jumlah penduduk umur >18 tahun dengan hasil pengukuran IMT ≥27, dibagi dengan jumlah penduduk umur >18 dikali 100%	%	1,5640%	N/A	1,5985%	1,6147%	1,6308%	1,6470%	1,6470%	1,6470%	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Jumlah penduduk umur >18 tahun dengan hasil pengukuran IMT ≥27	orang	4.843	N/A	4.950	5.000	5.050	5.100	5.100	5.100	FALSE
									jumlah penduduk umur >18	orang	309.657	N/A	309.657	309.657	309.657	309.657	309.657	309.657	FALSE
																			FALSE
																			FALSE
							Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Surveilans Penyakit	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam dibandingkan dengan Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi dalam periode	Jumlah KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam dibagi seluruh KLB dikalikan 100% = (KLB < 24 jam : Total KLB) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data: STP KLB										
									Jumlah KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam										FALSE
									Jumlah seluruh KLB										FALSE
					1.1.1.3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN	SIKN Merupakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang diintegrasikan dengan platform SATUSEHAT untuk mendukung SIKN ini dilakukan oleh Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik	Persentase Kepatuhan FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKTL (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta yang patuh melaporkan Indikator Nasional Mutu (INM)	%	88,62%	90,24%	91,87%	93,50%	95,93%	98,37%	98,37%	100,00%	TRUE
									Sumber data: SatuSehat dan DFO		88,62%	90,24%	91,87%	93,50%	95,93%	98,37%	98,37%	100,00%	
									Jumlah SIK pada Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik terakreditasi yang terintegrasi dengan SATUSEHAT	unit	109	111	113	115	118	121	121	123	TRUE

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kondisi Akhir	Target 2030	Persetujuan
									Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik terakreditasi di Kota yogyakarta	unit	123	123	123	123	123	123	123	123	TRUE
							Nilai Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	Penilaian penyelenggaraan statistik sektoral yang memenuhi kriteria 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator	Produk data suatu program atau kegiatan seksi, Tim Kerja, programer yang dinilai sesuai kematangan statistik sektoral	Nilai	1	1	1	1	1	1	1	1	TRUE
									Sumber data: Assesment BPS Kota Yogakarta										
									Hasil Self Assesment (SF) BPS Kota Yogyakarta		1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Yogyakarta yang sudah dilakukan akreditasi					Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi dibagi jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Yogyakarta dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										
									Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi		18	18	18	18	18	18	18	18	TRUE
									Jumlah Puskesmas		18	18	18	18	18	18	18	18	TRUE
									Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Yogyakarta		36	36	36	36	36	36	36	36	TRUE
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persentase fasilitas kesehatan (Puskesmas, Klinik Utama, Unit Pengelola Darah, dan Rumah Sakit Pemerintah) dengan akreditasi paripurna					Jumlah fasilitas kesehatan (Puskesmas, Klinik Utama, Unit Pengelola Darah dan Rumah Sakit Pemerintah) yang mendapatkan status akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun waktu 2025-2029 dibagi Jumlah fasilitas kesehatan yang teregistrasi dikali 100%	%	72,88	N/A	73,33	75.00	78.33	80.00	80.00	80	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna		18	N/A	18	18	18	18	18	18	FALSE
									Jumlah Klinik Utama terakreditasi paripurna		22	N/A	23	24	26	27	27	27	FALSE
									Jumlah UTD terakreditasi paripurna		1	N/A	1	1	1	1	1	1	FALSE
									Jumlah RS Pemerintah Terakreditasi paripurna		2	N/A	2	2	2	2	2	2	FALSE
									Jumlah Puskesmas		18	N/A	18	18	18	18	18	18	FALSE
									Jumlah Klinik Utama		38	N/A	39	39	39	39	39	39	FALSE
									Jumlah UTD		1	N/A	1	1	1	1	1	1	FALSE
									Jumlah RS Pemerintah		2	N/A	2	2	2	2	2	2	FALSE
																			FALSE
					1.1.1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus yang berkualitas**	Persentase Calon Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan	Calon Jamaah haji Kota Yogyakarta yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar Kemenkes sebelum keberangkatan di fasilitas Kesehatan yang telah ditentukan	Jumlah Calon Jamaah haji yang dilakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yg telah ditentukan di Kota Yogyakarta dibagi jumlah seluruh calon jamaah Kloter keberangkatan Kota Yogyakarta	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										
									Jumlah Calon Jamaah yang dilakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yg telah ditentukan		408	475	475	475	475	475	475	475	TRUE
									seluruh calon jamaah Kloter keberangkatan Kota Yogyakarta		408	475	475	475	475	475	475	475	TRUE
						Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase Capaian Minimal Peserta Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	Capaian Minimal Peserta Aktif ditentukan oleh Kebijakan Nasional	Persentase peserta JKN yang aktif dibagi standar minimal keaktifan nasional dikali 100%	% Standar Nasional Peserta JKN Aktif (80%)	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										
									Standar minimal keaktifan nasional	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	TRUE
									Persentase Kepesertaan JKN yang aktif		89,26	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	TRUE
									Jumlah peserta JKN yang aktif membayar premi &/ preminya dibayarkan oleh pemerintah pusat/daerah		370169	382357	382357	382357	382357	382357	382357	382357	TRUE
									Jumlah penduduk		414705	415605	415605	415605	415605	415605	415605	415605	TRUE
					1.1.1.5. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang berkualitas**	Persentase Kepatuhan FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKTL (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta yang patuh melaporkan Indikator Nasional	Kepatuhan FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKTL (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta yang patuh melaporkan Indikator Nasional Mutu (INM) ke Kementrian kesehatan	Jumlah Kepatuhan FKTP dan FKTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan patuh melaporkan INM dibagi Jumlah FKTP dan FKTL yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										
									Jumlah Kepatuhan FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melaporkan INM ke Kemenkes		46	46	46	46	46	46	46	46	TRUE
									Jumlah FKTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melaporkan INM ke Kemenkes		14	14	15	15	15	15	15	15	TRUE
									FKTP dan FKTL yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan		60	60	61	61	61	61	61	61	TRUE
						Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang berkualitas	Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standarisasi ASPAK	Kepatuhan RS memenuhi standar minimal 60% nilai SPA di aplikasi ASPAK	Jumlah Rumah Sakit di Kota Yogyakarta yang memenuhi standar minimal nilai ASPAK dibagi jumlah seluh Rumah Sakit di Kota Yogyakarta	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										
									Jumlah Rumah Sakit di Kota Yogyakarta yang memenuhi standar minimal nilai ASPAK 60%		18	18	18	18	18	18	18	18	TRUE
									Jumlah Rumah Sakit di Kota Yogyakarta		18	18	18	18	18	18	18	18	TRUE
					1.1.1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta	Rerata hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu	Jumlah hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah puskesmas yang ada di Kota Yogyakarta	Indeks	84,33	80	81	82	83	84	84	85	TRUE
									Sumber data :										FALSE
									Jumlah hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta		1.517,94	1.440,00	1.458,00	1.476,00	1.494,00	1.512,00	1.512,00	1.530,00	TRUE
									Jumlah puskesmas		18	18	18	18	18	18	18	18	TRUE
							Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas	Cakupan pelayanan Cek Kesehatan Gratis yang dilaksanakan di puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun	Jumlah pelayanan CKG di Puskesmas dibagi jumlah penduduk di kota Yogyakarta dikali 100%		35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	40,00	40,00	TRUE
									Sumber data										FALSE
									Jumlah sasara pelayanan CKG di Puskesmas		145146	149617	153773	157929	162085	166242	166242	166242	TRUE
									Jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta		414705	415605	415605	415605	415605	415605	415605	415605	TRUE
					1.1.1.2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM		Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada	Terpenuhinya Alat Kesehatan, Sarana, dan Prasarana di Puskesmas	Jumlah Puskesmas di Kota Yogyakarta yang memenuhi standar minimal nilai ASPAK dibagi jumlah seluruh Puskesmas di Kota Yogyakarta	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kondisi Akhir	Target 2030	Persetujuan
					dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		ASPAK di Puskesmas	minimal 60% dari standar di aplikasi ASPAK	Sumber data:										
									Jumlah Puskesmas di Kota Yogyakarta yang memenuhi standar minimal nilai ASPAK		18	18	18	18	18	18	18	18	TRUE
									Jumlah Puskesmas di Kota Yogkakarta		18	18	18	18	18	18	18	18	TRUE
					1.1.1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kasus Kegawatdaruratan yang berhasil ditangani oleh Tim PSC dan jejaringnya berbanding dengan jumlah panggilan kasus kegawatdaruratan yang diterima oleh operator	Jumlah kasus kegawatdaruratan pra Hospital yang ditangani PSC dan jejaring dibagi jumlah permintaaan layanan yang memenuhi kriteria gawat darurat pra Hospital dikali 100 persen	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										
									Jumlah kasus kegawatdaruratan pra Hospital yang ditangani PSC dan jejaring		3225	3225	3225	3225	3225	3225	3225	3225	TRUE
									jumlah permintaaan layanan yang memenuhi kriteria gawat darurat pra Hospital		3225	3225	3225	3225	3225	3225	3225	3225	TRUE
					1.1.1.2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Layanan di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Jumlah 50% dari nilai sarana, 10% prasarana dan 40% alat kesehatan yang berfungsi dibagi standar	%	79,57	77.2	77,4	77,6	77.8	78	78	78	TRUE
									Sumber data:										FALSE
									Hasil capaian pemenuhan Alat Kesehatan pada Aplikasi ASPAK Kementerian Kesehatan RI		79,57	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	TRUE
					1.1.1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pendapatan Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	pendapatan Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 1 tahun	Realisasi Pendapatan dibagi target pendapatan x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Realisasi Pendapatan	Rp	231.572.000	242.865.000	266.400.000	296.940.000	342.420.000	351.460.000	351.460.000	379.035.000	FALSE
									target pendapatan	Rp	231.572.000	242.865.000	266.400.000	296.940.000	342.420.000	351.460.000	351.460.000	379.035.000	FALSE
					1.1.1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang berkualitas**	Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas	hasil penilaian kinerja puskesmas yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun dengan kriteria "baik" Nilai "Baik" jika nilai	hasil penilaian kinerja puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan	%	91	91	91	91	91	91	91	100	FALSE
									Sumber data:										
									hasil penilaian kinerja puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan		91	91	91	91	91	91	91	100	FALSE
																			FALSE
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan	Persentase ketersediaan obat indikator	Persentase ketersediaan 40 obat indikator yang tersedia di Puskesmas dengan standar minimal pusat 80%					Jumlah total item obat indikator yang tersedia di Puskesmas dibagi jumlah total item obat indikator yang wajib dilakukan monitoring dikali 100%	%	95	95	95,5	96	96,5	97	97	97,5	TRUE
									Sumber data:										
									Jumlah total item obat indikator yang tersedia di Puskesmas			38	38	38	39	39	39	39	TRUE
									Jumlah total obat indikator yang wajib dilakukan monitoring			40	40	40	40	40	40	40	TRUE
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan rekomendasi sertifikasi standar dalam suatu periode tertentu					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rekomendasi sertifikat standar dibagi Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan sertifikat standar x 100%		100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data										
									Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rekomendasi sertifikat standar		165	30	100	130	100	80	20	20	TRUE
									Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan sertifikat standar		165	30	100	130	100	80	20	20	TRUE
					1.1.1.2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Pengawasan Produk Makanan Minuman yang beredar di masyarakat	Persentase kesesuaian obat yang tersedia di Puskesmas dengan formularium nasional	Tersedianya obat di Puskesmas sesuai dengan Formularium Nasional	Jumlah obat yang tersedia di Puskesmas sesuai formularium nasional dibagi jumlah obat yang ada di Puskesmas dikali 100%	%		95	95	95	96	96	96	96	TRUE
									Sumber data:										
									Jumlah obat yang tersedia di Puskesmas sesuai formularium nasional			190	190	190	192	192	192	192	TRUE
									Jumlah obat yang ada di Puskesmas			200	200	200	200	200	200	200	TRUE
							Persentase Alat Kesehatan di Puskesmas yang Terpelihara Sesuai Standar	Terpeliharanya alat kesehatan yang sesuai standar	Jumlah alat kesehatan di Puskesmas yang telah dikalibrasi dibagi jumlah alat kesehatan yang ada di Puskesmas dikali 100%	%		100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										FALSE
									Jumlah alat kesehatan di Puskesmas yang telah dikalibrasi	Unit		2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	TRUE
									jumlah alat kesehatan yang ada di Puskesmas	Unit		2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	TRUE
	1.1.2. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Meningkatnya cakupan Rekomendasi sertifikasi bidang kesehatan**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan rekomendasi sertifikasi standar dalam suatu periode tertentu					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rekomendasi sertifikat standar dibagi Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan sertifikat standar x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data										FALSE
									Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rekomendasi sertifikat standar		165	30	100	130	100	80	20	20	TRUE
									Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan sertifikat standar		165	30	100	130	100	80	20	20	TRUE
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persentase fasilitas pelaaynan kesehatan (Puskesmas termasuk labkesmas, RS Pemerintah) yang secara konsisten mempertahankan tingkat kecukupan pasokan kesehatan esensial, termasuk diagnostik, reagen, obat-obatan, vaksin, sesuai dengan pedoman untuk memenuhi kebutuhan pasien dan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu						Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan yang memadai sesuai standar dibagi Jumlah total fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100%	%	100		100	100	100	100	100	100	FALSE
									Sumber data :										FALSE

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kondisi Akhir	Target 2030	Persetujuan
									Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan yang memadai sesuai standar										FALSE
									Jumlah Puskesmas Kota Yogyakarta	Sarana	18		18	18	18	18	18	18	FALSE
									Jumlah Labkes Pemerintah Kota YK	Sarana	1		1	1	1	1	1	1	FALSE
									Jumlah RS Pemerintah kota YK	Sarana	2		2	2	2	2	2	2	FALSE
					1.1.2.1. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Meningkatnya Pengawasan Produk Makanan Minuman yang beredar di masyarakat	Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman pada Produk IRTP	Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman Produk IRTP dalam kurun waktu 1 Tahun.	Jumlah Produk IRTP yang diperiksa dibagi jumlah target Produk IRTP yang harus diperiksa dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100 %	%		95	95,5	96	96,5	97	97	97,5	TRUE
									Sumber data:										
									Jumlah produk IRTP yang diperiksa			48	48	48	48	49	49	49	TRUE
									Jumlah target produk IRTP yang harus diperiksa dalam kurun waktu 1 tahun			50	50	50	50	50	50	50	TRUE
							Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan dari lintas sektor dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100%	%	100		100	100	100	100	100	100	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Jumlah rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dari lintas sektor	sarana	5		5	5	5	5	5	5	FALSE
									Jumlah rekomendasi hasil pengawasan pangan dari lintas sektor	sarana	5		5	5	5	5	5	5	FALSE
									jumlah rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 1 tahun	sarana	10		10	10	10	10	10	10	FALSE
																			FALSE
					1.1.2.2. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Meningkatnya Pengawasan Usaha Bidang Kesehatan dan P-IRT yang berkualitas	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah diverifikasi dalam proses Sertifikasi Standar Sektor Kesehatan	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah melalui proses verifikasi pada periode tertentu	jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang terverifikasi dibagi jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang mendaftar dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										
									jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang terverifikasi		32	15	40	31	21	17	18	18	TRUE
									jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang mendaftar		32	15	40	31	21	17	18	18	TRUE
					1.1.2.3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan memenuhi komitmen	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan memenuhi komitmen dibagi Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan verifikasi lapangan dalam kurun waktu 1 tahun di Kota Yogyakarta dikali 100%	%	91%	91%	92%	93%	94%	96%	97%	97%	TRUE
									Sumber data:										FALSE
									Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan memenuhi komitmen		79	82	83	84	85	86	87	87	TRUE
									Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan verifikasi lapangan dalam kurun waktu 1 tahun		87	90	90	90	90	90	90	90	TRUE
					1.1.2.4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang memperoleh rekomendasi sertifikat Laik Sehat	persentase unit usaha di sektor sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang telah mendapatkan rekomendasi sertifikat Laik Sehat pada periode tertentu.	Jumlah unit usaha di sektor sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang telah mendapatkan rekomendasi	%	92%	92%	95%	96%	96%	95%	96%	96%	TRUE
									Sumber data:										
									Jumlah unit usaha di sektor sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang telah mendapatkan rekomendasi sertifikat Laik Sehat		23	23	19	24	24	19	24	24	TRUE
									Jumlah unit usaha di sektor sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang mengajukan sertifikat laik sehat		25	25	20	25	25	20	25	25	TRUE
	1.1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi	persentase SDM Kesehatan yang telah memenuhi kompetensi dalam memberikan pelayanan kesehatan.	Terdapat kesulitan untuk mengukur kompetensi SDMK, biasanya akan menggunakan SKP (kredit), seperti BKPSDM yg mengukur pegawai dengan JPL. untuk mempertahankan SKP biasanya akan mengikuti workshop				Jumlah SDM Kesehatan yang telah memenuhi standar kompetensi dibagi Jumlah Total SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan dalam periode satu tahun dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										
									Jumlah SDM Kesehatan yang telah memenuhi standar kompetensi		7367	7255	7255	7255	7255	7255	7255	7255	TRUE
									Jumlah Total SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan dalam periode satu tahun		7367	7255	7255	7255	7255	7255	7255	7255	TRUE
					1.1.3.1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya cakupan Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) atau Rekomendasi SIP	Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik atau rekomendasi izin praktik di Fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memperoleh SIP atau rekomendasi SIP dibagi Jumlah permohonan yang terverifikasi x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										
									Jumlah Tenaga Kesehatan yang memperoleh SIP atau rekomendasi SIP		485	500	500	500	500	500	500	500	TRUE
									Jumlah permohonan yang terverifikasi		485	500	500	500	500	500	500	500	TRUE
					1.1.3.2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT	Persentase dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT yang disusun tepat waktu dalam periode waktu 1 tahun.	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK Dinas Kesehatan dan UPT yang wajib disusun.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										FALSE
									Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK Dinas Kesehatan dan UPT yang disusun tepat waktu	Dokumen	22	22	22	22	22	22	22	22	FALSE
									Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK Dinas Kesehatan dan UPT yang wajib disusun	Dokumen	22	22	22	22	22	22	22	22	FALSE
					1.1.3.3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya manusia	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang telah menerima pelatihan, peningkatan kompetensi, atau	Jumlah SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya dibagi jumlah SDM Kesehatan yang dilatih x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kondisi Akhir	Target 2030	Persetujuan
					Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kesehatan		pengembangan profesional dalam periode waktu 1 tahun.	Jumlah SDM Kesehatan yang telah dilatih	orang	43	53	50	50	50	50	50	50	TRUE
									Jumlah SDM Kesehatan yang menjadi target pengembangan kapasitas dan kompetensi	orang	36	53	50	50	50	50	50	50	TRUE
							Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang terdata dibagi total populasi dikali 1.000	Jumlah Tenaga medis dan Tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang terdata di dibagi total populasi dikali 1.000	Rasio	11,06	N/A	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Jumlah Tenaga medis dan Tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang terdata di SISDMK		4580	N/A	4580	4580	4580	4580	4580	4580	FALSE
									Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta		414000	N/A	414000	414000	414000	414000	414000	414000	FALSE
																			FALSE
							Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase RSmilik Pemerintah Pusat dan Daerah teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal 7 jenis dokter spesialis (Sp.A, Sp.B, Sp.OG, Sp.PD, Sp.An, Sp.Rad, Sp.PK) dan minimal 1 jenis dokter spesialis layanan unggulan tambahan sesuai dengan jenis pelayanan unggulan pada RS pengampu Pelayanan KJSU-KIA	Jumlah RS teregistrasi dan laik operasional memenuhi standar kriteria yang ditentukan dibagi total RS teregistrasi dan laik operasional pada tahun tertentu lalu dikalikan 100%	%	100	N/A	100	100	100	100	100	100	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Jumlah RS Pemerintah Kota YK ang memenuhi standar minimal 7 jenis dokter spesialis yang teregistrasi dan laik operasional		2	N/A	2	2	2	2	2	2	FALSE
									Jumlah RS Pemerintah Kota YK		2	N/A	2	2	2	2	2	2	FALSE
																			FALSE
	1.1.4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan yang berkualitas	Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	Cakupan kemantren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat GERMAS minimal 3					Jumlah kemantren yang melaksanakan germas dibagi jumlah kemantren seluruhnya dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										
									Jumlah kemantren yang melaksanakan germas		14	14	14	14	14	14	14	14	TRUE
									jumlah kemantren di kota Yogyakarta		14	14	14	14	14	14	14	14	TRUE
					1.1.4.1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesehatan	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	Kelurahan Siaga yang dibina dan memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif	Jumlah Kelurahan Siaga yang dibina dan memenuhi kriteria indikator Kelurahan Siaga Aktif dibagi jumlah Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta dikalikan 100 %	%				100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										
									Jumlah kelurahan siaga di kota yogyakarta					45	45	45	45	45	TRUE
									Jumlah kelurahan yang dilakukan penilaian stratifikasi dan pembinaan					45	45	45	45	45	TRUE
					1.1.4.2.Pembangunan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tk daerah Kab/Kota	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesehatan	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	Kelurahan Siaga yang dibina dan memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif	Jumlah Kelurahan Siaga yang dibina dan memenuhi kriteria indikator Kelurahan Siaga Aktif dibagi jumlah Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta dikalikan 100 %	%	86,67	93,33	100						FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Jumlah kelurahan siaga di kota yogyakarta		45	45	45						FALSE
									Jumlah kelurahan yang dilakukan penilaian stratifikasi dan pembinaan		39	42	45						FALSE
1.2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pratama	1.2.1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pratama	Persentase tercapainya indikator SPM layanan Rumah Sakit	Hasil perhitungan standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada pasien memenuhi standar yang ditetapkan					Jumlah Capaian Indikator SPM pada Rumah Sakit yang tercapai dibagi dengan Jumlah Indikator SPM Rumah Sakit dikali 100	%	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	94,50	95,00	TRUE
									Sumber data:										FALSE
									Nilai rata-rata SPM instalasi di RS Pratama										FALSE
					1.2.1.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian Sesuai Standar di RS Pratama	Persentase Pengelolaan Penyediaan Obat dan Vaksin, Bahan Habis Pakai serta Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di RS Pratama.	Tersedianya Obat dan Vaksin, Bahan Habis Pakai serta Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik di RS Pratama	Jumlah Obat BMHP yang tersedia dibagi jumlah Obat, BMHP yang dibutuhkan dikali 100 % dan jumlah alat kesehatan atau alat penunjang medik yang dipelihara dibagi jumlah alat kesehatan atau alat penunjang medik yang harus dipelihara dikali 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TRUE
									Sumber data:										FALSE
									Jumlah Obat BMHP yang tersedia										FALSE
									jumlah Obat BMHP yang dibutuhkan										FALSE
									jumlah alat kesehatan atau alat penunjang medik yang dipelihara										FALSE
									jumlah alat kesehatan atau alat penunjang medik yang harus dipelihara										FALSE
					1.2.1.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan BMHP untuk Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di RS Pratama	BMHP untuk Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di RS Pratama yang tersedia	Jumlah BMHP yang tersedia dibagi jumlah BMHP yang dibutuhkan untuk pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di RS Pratama dikali 100 %	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Jumlah BMHP yang tersedia										FALSE
									jumlah BMHP yang dibutuhkan untuk pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di RS Pratama										FALSE
	1.2.2.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit Pratama	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	Hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama					(Capaian Mutu Layanan / Standar Layanan) x 100	%	86,82	86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,05	87,10	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey										FALSE
					1.2.2.1. Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD RS Pratama	Persentase laporan hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang berkualitas dan tepat waktu	Tersusunnya laporan hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang tersedia dibagi dengan Target Laporan Hasil Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama dikali 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TRUE
									Sumber data:										FALSE

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kondisi Akhir	Target 2030	Persetujuan
									Laporan realisasi anggaran BLUD										FALSE
					1.2.2.2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja RS Pratama Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinkes (RS Pratama)		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan RS Pratama yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan RS Pratama yang wajib disusun	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan RS Pratama yang disusun tepat waktu										FALSE
									Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan RS Pratama yang wajib disusun										FALSE
					1.2.2.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai RS Pratama	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinkes (RS Pratama)		Hasil nilai IP ASN RS Pratama	persen	**91**	**87,82 - 91,2**	**87,84 - 91,4**	**87,86 - 91,6**	**87,88 - 91,8**	**87,90 - 92**	**87,90 - 92**	**87,92 - 92,2**	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Hasil nilai IP ASN RS Pratama										FALSE
					1.2.2.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP RS Pratama	Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan di aplikasi SiRUP RS Pratama pada kurun waktu tertentu	Jumlah belanja RS Pratama yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA RS Pratama dikali 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE
									Sumber Data :										FALSE
									Jumlah belanja RS Pratama yang diinputkan pada SIRUP	Rupiah	32.492.917.539,00	35.904.407.189,00	37.699.627.548,45	39.584.608.925,87	41.563.839.372,17	43.642.031.340,77	45.824.132.907,81	48.115.339.553,20	FALSE
									Jumlah belanja pada DPA RS Pratama	Rupiah	32.492.917.539,00	35.904.407.189,00	37.699.627.548,45	39.584.608.925,87	41.563.839.372,17	43.642.031.340,77	45.824.132.907,81	48.115.339.553,20	FALSE
					1.2.2.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RS Pratama	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan RS Pratama oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan RS Pratama oleh BPKAD										FALSE
					1.2.2.6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan aset RS Pratama	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset RS Pratama oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE
									Sumber data:										
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset RS Pratama oleh BPKAD										
Perbaikan Data Kinerja Program Kegiatan RSUD																			
1.3. Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta	1.3.1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Mutu Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang dan Asuhan Keperawatan RSUD Kota Yogyakarta	Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit	Hasil perhitungan standar mutu tata kelola Kelola Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang dan Asuhan Keperawatan RS untuk memastikan bahwa Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang dan Asuhan Keperawatan pada pasien di RSUD Kota Yogyakarta memenuhi standar					(Σ Indikator SPM Pelayanan yang Tercapai : Σ Indikator SPM Pelayanan) x 100	%	85,00%	85,50%	86,00%	86,50%	87,00%	87,50%	87,50%	88,00%	TRUE
									Sumber data: Hasil Capaian Indikator SPM Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang dan Asuhan Keperawatan RSUD Kota Yogyakarta										
									Jumlah Indikator SPM Pelayanan yang Tercapai										FALSE
									Jumlah Indikator SPM Pelayanan										FALSE
			Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar	Hasil capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar perhitungan pada Aplikasi ASPAK Kementerian Kesehatan RI					Capaian Pemenuhan Alat Kesehatan dalam Aplikasi ASPAK Kementerian Kesehatan RI	%	64,51%	64,60%	64,80%	65,00%	65,20%	65,40%	65,40%	65,42%	TRUE
									Sumber data:										
									Hasil capaian pemenuhan Alat Kesehatan pada Aplikasi ASPAK Kementerian Kesehatan RI										
					1.3.1.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya kinerja pelayanan medis	Persentase tercapainya SPM pelayanan medis rumah sakit	Hasil perhitungan standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pelayanan medis di RSUD Kota Yogyakarta yang diberikan kepada pasien memenuhi standar yang ditetapkan	Σ Indikator SPM Pelayanan Medis yang Tercapai : Σ Indikator SPM Pelayanan Medis) x 100	%	87,76%	88,00%	88,50%	89,00%	89,50%	90,00%	90,00%	90,50%	TRUE
									Sumber data: Hasil Capaian Indikator SPM Pelayanan Medis RSUD Kota Yogyakarta										
									Jumlah Indikator SPM Pelayanan Medis yang Tercapai										FALSE
									Jumlah Indikator SPM Pelayanan Medis										FALSE
					1.3.1.1.Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2. Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang	Persentase tercapainya SPM pelayanan penunjang rumah sakit	Hasil perhitungan standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pelayanan penunjang di RSUD Kota Yogyakarta yang diberikan kepada pasien memenuhi standar yang ditetapkan	Σ Indikator SPM Pelayanan Penunjang yang Tercapai : Σ Indikator SPM Pelayanan Penunjang) x 100	%	80,65%	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	86,00%	86,00%	87,00%	TRUE
									Sumber data: Hasil Capaian Indikator SPM Pelayanan Penunjang RSUD Kota Yogyakarta										
									Jumlah Indikator SPM Pelayanan Penunjang yang Tercapai										FALSE
									Jumlah Indikator SPM Pelayanan Penunjang										FALSE
					1.3.1.3. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya mutu pelayanan keperawatan, sumber daya keperawatan dan keselamatan pasien	Persentase tercapainya instrumen mutu asuhan keperawatan dan kebidanan	Hasil perhitungan standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pelayanan keperawatan dan kebidanan di RSUD Kota Yogyakarta yang diberikan kepada pasien memenuhi	(Nilai kelengkapan dokumen keperawatan + Skor persepsi pasien asuhan keperawatan + Nilai pelaksanaan asuhan keperawatan) : 3 x 100	%	93,40%	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	89,00%	90,00%	TRUE
									Sumber data:										
									Nilai kelengkapan dokumen keperawatan										FALSE
									Skor persepsi pasien asuhan keperawatan										FALSE
									Nilai pelaksanaan asuhan keperawatan										FALSE
					1.3.1.4. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatnya kinerja pelayanan sistem informasi kesehatan RS	Jumlah Pengembangan Modul Sistem Informasi Manajemen RS dalam Aplikasi SMARTA	Pengembangan Modul Sistem Informasi Manajemen RS dalam Aplikasi SMARTA sesuai dengan kebutuhan pelayanan	Jumlah modul SIM RS yang dikembangkan setiap tahun	Modul	28	29	30	31	32	33	33	34	TRUE
									Sumber data:										
									- Aplikasi SMARTA (jenis modul yang akan dikembangkan)										
1.4. Terwujudnya tata kelola Dinas Kesehatan yang baik dan adaptif	1.4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas layanan Dinas Kesehatan	IKM Dinas Kesehatan	Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di Dinas Kesehatan, UPT dan Puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu					Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di Dinas Kesehatan, UPT dan Puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu	%	84,14	85	85	85	85	85	85	85	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Kesehatan										FALSE
									hasil survey kepuasan masyarakat di UPT (Labkes dan PSC)										FALSE
									hasil survey kepuasan masyarakat Puskesmas										FALSE
			Nilai AKIP Dinas Kesehatan	mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80)					Hasil Penilaian SAKIP Dinas Kesehatan Oleh Inspektorat	Nilai	A (89,21)	A (86,50-87,50)	A (87,51-88,51)	A (88,52-88,80)	A (88,81-89,00)	A (89,01-89,20)	A (89,01-89,20)	A ((89,01-89,20)	TRUE
									Sumber data:										FALSE
									Hasil nilai SAKIP oleh Inspektorat		A (89,21)	A (86,50-87,50)	A (87,51-88,51)	A (88,52-88,80)	A (88,81-89,00)	A (89,01-89,20)	A (89,01-89,20)	A ((89,01-89,20)	TRUE
			Nilai SPIP Dinas Kesehatan	menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00					Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Oleh Inspektorat (SPIP)	Poin	4.424	3	3,25	3,5	3,75	4	4	4	FALSE
									Sumber data:										FALSE

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kondisi Akhir	Target 2030	Persetujuan
				2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00					Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat		4,424	3	3,25	3,5	3,75	4	4	4	FALSE
					1.4.1.1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kesehatan	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan yang wajib disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan yang disusun tepat waktu		11	11	11	11	11	11	11	11	FALSE
									Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan yang wajib disusun		11	11	11	11	11	11	11	11	FALSE
							Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dinas Kesehatan		Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE
									Sumber Data :										FALSE
									Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan										FALSE
									Jumlah Data statistik sektoral										FALSE
					1.4.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan oleh BPKAD	nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan oleh BPKAD		5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE
					1.4.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan oleh BPKAD	nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE
									Sumber data:										FALSE
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan oleh BPKAD										TRUE
					1.4.1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan oleh BPKAD	nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE
									Sumber data:										FALSE
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan oleh BPKAD		5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE
					1.4.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan	Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan oleh BPKAD	nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE
									Sumber data:										FALSE
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan oleh BPKAD		5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE
					1.4.1.6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas Kesehatan	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan		Hasil penilaian IP ASN Dinas Kesehatan	Nilai	4,178	4,278	4,378	4,478	4,578	4,678	4,678		TRUE
									Sumber data:										FALSE
									Hasil penilaian IP ASN Dinas Kesehatan										TRUE
					1.4.1.7. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kesehatan		Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	90,67	90,72	90,77	90,82	90,87	90,92	90,92	90,97	TRUE
									Sumber data:										FALSE
									Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum										TRUE

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kondisi Akhir	Target 2030	Persetujuan
					1.4.1.8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan	Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Kesehatan	Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan di aplikasi SiRUP pada kurun waktu tertentu	Jumlah belanja Dinkes yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Dinkes dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	FALSE
									Sumber Data :										FALSE
									Jumlah belanja Dinkes yang diinputkan pada SIRUP	rupiah	287.337.983.512,00	252.037.176.923,00	264.639.035.769,15	277.870.987.557,61	291.764.536.935,49	306.352.763.782,26	306.352.763.782,26	321.670.401.971,38	FALSE
									Jumlah belanja pada DPA Dinkes	rupiah	287.337.983.512,00	252.037.176.923,00	264.639.035.769,15	277.870.987.557,61	291.764.536.935,49	306.352.763.782,26	306.352.763.782,26	321.670.401.971,38	FALSE
					1.4.1.9. Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Kualitas Layanan di Puskesmas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas	Hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas pada kurun waktu tertentu	Hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas pada kurun waktu tertentu	Indeks	80,00	80	81	82	83	84	84	85	FALSE
									Sumber data :										FALSE
									hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas		80,00	80	81	82	83	84	84	85	FALSE
1.5. Terwujudnya tata kelola RSUD Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif	1.5.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Yogyakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Kota Yogyakarta	Hasil perhitungan berdasarkan Survei kepada Masyarakat pengguna layanan di RSUD Kota Yogyakarta					Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap RSUD Kota Yogyakarta	Nilai	84,90	85,00	85,20	85,40	85,60	85,80	85,80	86,00	TRUE
									Sumber data:										
									Nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey										
			Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian SAKIP RSUD Kota Yogyakarta yang dikeluarkan Oleh Inspektorat					Hasil Penilaian SAKIP Rumah Sakit Oleh Inspektorat	Nilai	A (84,14)	A (84,15-87,10)	A (84,20-87,15)	A (84,25-87,20)	A (84,30-87,25)	A (84,35-87,30)	A (84,35-87,30)	A (84,40-87,35)	TRUE
									Sumber data:										
									Hasil Penilaian SAKIP RSUD Kota Yogyakarta Oleh Inspektorat			A (84,15-87,10)	A (84,20-87,15)	A (84,25-87,20)	A (84,30-87,25)	A (84,35-87,30)	A (84,35-87,30)		
			Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta yang dikeluarkan Oleh Inspektorat					Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Rumah Sakit Oleh Inspektorat	Nilai	4,33	4,34	4,35	4,36	4,37	4,38	4,38	4,40	TRUE
									Sumber data:										
									Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern RSUD Kota Yogyakarta Oleh Inspektorat										
			Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran	Hasil capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran					Realisasi Pendapatan : Target Pendapatan dalam 1 Tahun Anggaran x 100	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TRUE
									Sumber data:										
									Laporan realisasi anggaran pendapatan BLUD										
					1.5.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja RSUD Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Kota Yogyakarta	Mengukur prosentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Kota Yogyakarta yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Kota Yogyakarta yang wajib disusun	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	TRUE
									Sumber data:										
									Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Kota Yogyakarta yang disusun tepat waktu										
									Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Kota Yogyakarta yang wajib disusun										
					1.5.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE
									Sumber data:										
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta oleh BPKAD										
					1.5.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai RSUD Kota	Nilai Indeks Profesionalitas ASN RSUD Kota	Skor yang menggambarkan tingkat kompetensi, kinerja, integritas, dan disiplin ASN di	Hasil nilai IP ASN RSUD Kota Yogyakarta	Nilai	83,73	83,73	78,66	78,7	78,74	78,78	78,78	78,8	TRUE
									Sumber data:										
									Hasil nilai IP ASN RSUD Kota Yogyakarta										
					1.5.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum RSUD Kota Yogyakarta	Skor yang menunjukkan tingkat kepatuhan pengelolaan arsip administrasi umum terhadap standar kearsipan yang	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum RSUD Kota Yogyakarta	Nilai	86,87	87,00	87,33	87,67	88,00	88,33	88,33	88,67	FALSE
									Sumber data:										
									Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum RSUD Kota Yogyakarta										
					1.5.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE
									Sumber data:										FALSE
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan RSUD Kota Yogyakarta oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	FALSE
					1.5.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa RSUD Kota Yogyakarta	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP RSUD Kota Yogyakarta	Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan di aplikasi SiRUP pada kurun waktu 1 tahun	Jumlah belanja RSUD Kota Yogyakarta yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA RSUD Kota Yogyakarta dikali 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TRUE
									Sumber Data :										
									Jumlah belanja RSUD Kota Yogyakarta yang diinputkan pada SIRUP	Rupiah	169.712.332.710,00	151.461.077.075,00	152.285.989.550,00	160.241.190.000,00	163.859.168.000,00	167.686.613.000,00	167.686.613.000,00	171.668.186.000,00	
									Jumlah belanja pada DPA RSUD Kota Yogyakarta	Rupiah	169.712.332.710,00	151.461.077.075,00	152.285.989.550,00	160.241.190.000,00	163.859.168.000,00	167.686.613.000,00	167.686.613.000,00	171.668.186.000,00	FALSE
					1.5.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset RSUD Kota Yogyakarta oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	TRUE
									Sumber data:										
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan RSUD Kota Yogyakarta oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	5	
					1.5.1.8. Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD RSUD Kota Yogyakarta	Persentase laporan hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD RSUD Kota Yogyakarta yang berkualitas dan tepat waktu	Tersusunnya laporan hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD RSUD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang tersedia dibagi dengan Target Laporan Hasil Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RSUD Kota Yogyakarta dikali 100%	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TRUE
									Sumber data:										
									Laporan Penilaian Kinerja BLUD RSUD Kota Yogyakarta										

| No | Misi/ Prioritas Daerah | Tujuan | Indikator Kinerja | DEFINISI OPERASIONAL | Formula Perhitungan | Simbol | Kondisi Awal | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Kondisi akhir | 2029 | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | DEFINISI OPERASIONAL | Formula Perhitungan | Simbol | Kondisi Awal | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Kondisi akhir | 2029 | Program | Sasaran Program | Indikator Kinerja | DEFINISI OPERASIONAL | Formula Perhitungan | Simbol | Kondisi Awal | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Kondisi akhir | 2029 | Pengampu | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | DEFINISI OPERASIONAL | Formula Perhitungan | Simbol | Kondisi Awal | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Kondisi akhir | 2029 | Sub Kegiatan | Sasaran Operasional (Sub Output) | Indikator Kinerja (Sub Output) | Simbol | Kondisi Awal | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Kondisi akhir | 2029 |
|---|---|---

Misi 1 RPJPD

Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial

Terlaksananya Sumber Daya Manusia yang berkualitas unggul

IK. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

IK. Usia Harapan Hidup

OUTCOME

DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan

IK.
1. Angka Kematian Ibu
2. Angka Kematian Bayi
3. Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC)

DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

Terwujudnya Tata Kelola Dinas Kesehatan yang baik dan adaptif

IK.
Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan

INTERMEDIATE OUTCOME

Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

IK.
1. Persentase Posyandu ILP Aktif

Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

IK.
1. Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan

IK.
1. Persentase ketersediaan obat indikator

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat

IK.
1. Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi

Meningkatnya kualitas layanan Dinas Kesehatan

IK. 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan2. Nilai AKIP Dinas Kesehatan3. Nilai SPIP Dinas Kesehatan

INTERMEDIATE OUTCOME

Meningkatnya kesediaan rata-rata yang sesuai standar untuk pelayanan kesehatan

IK.
1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2. Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan
3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
5. Persentase anak usia SD kelas 1s dan setingkat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
6. Persentase usia produktif dan usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Meningkatnya pelayanan kesehatan penderita penyakit tertentu

IK.
1. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
2. Persentase penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
3. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan Komunitas Rentan

IK.
1. Cakupan KLB yang ditindak lanjuti kurang dari 1 x 24 jam

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

IK.
1. Persentase cakupan informasi kesehatan yang dikelola sesuai standar (SPM)
2. Nilai Tingkat Kematangan Sistem Informasi

Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi dan Pengawasan Produk Makanan Minuman Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

IK.
1. Persentase kesesuaian dan ketepatan waktu dalam pelaporan data kesehatan sesuai standar
2. Persentase Jasi Surveilans di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran obat, makanan dan kosmetik

IK.
1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi ketentuan sesuai standar

Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran obat, makanan dan kosmetik

IK.
1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi ketentuan sesuai standar

Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan

IK.
1. Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

IK.
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan2. Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standar pelayanan3. Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standar pelayanan4. Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standar pelayanan5. Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standar pelayanan6. Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standar pelayanan7. Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standar